DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
PROVINSI KALIMANTAN BARAT
JL. AHMAD SOOD NO. 25 PONTIANAK. KODE POS 78124
NO. TELP : (0561) 583047

PROFIL PERKEMBANGAN KEPENDUDUKAN PROVINSI KALIMANTAN BARAT TAHUN 2018

DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
PROVINSI KALIMANTAN BARAT
TAHUN 2019

PROFIL
PERKEMBANGAN KEPENDUDUKAN PROVINSI KALIMANTAN BARAT TAHUN 2018

HOME http://dukcapil.kalbarprov.go.id CONTACT US dukcapil@kalbarprov.go.id

Sambutan Gubernur Kalimantan Barat

Dengan memanjatkan puji dan syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena atas perkenanNya maka buku Profil Perkembangan Kependudukan Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2018 dapat diselesaikan tepat pada waktunya.

Berdasarkan Pasal 6 huruf (d) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Pemerintah Provinsi berkewajiban dan bertanggung jawab menyelenggarakan urusan administrasi kependudukan, yang dilakukan oleh Gubernur dengan kewenangan meliputi “Penyajian Data Kependudukan berskala provinsi berasal dari data kependudukan yang telah dikonsolidasikan dan dibersihkan oleh Kementerian yang bertanggung jawab dalam urusan pemerintahan dalam negeri”.

Dengan terbangunnya database kependudukan Provinsi Kalimantan Barat yang bersumber dari database kependudukan Kabupaten/Kota, maka database kependudukan tersebut harus dimanfaatkan untuk kepentingan perumusan kebijakan di bidang pemerintahan dan pembangunan, sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan Pasal 83 Ayat (1) “Data Penduduk yang dihasilkan oleh Sistem Informasi Administrasi Kependudukan dan tersimpan di dalam database kependudukan dimanfaatkan untuk kepentingan perumusan kebijakan di bidang pemerintahan dan pembangunan”.

Dari database kependudukan Provinsi Kalimantan Barat dimaksud, maka disusunlah profil perkembangan kependudukan Provinsi Kalimantan Barat tahun 2018, untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Demikian, diharapkan profil perkembangan kependudukan yang disusun ini dapat dijadikan bahan/referensi bagi pemerintah maupun pihak lain dalam penentuan kebijakan, perencanaan pembangunan, dan evaluasi hasil-hasil pembangunan.

Pontianak, Juni 2019

GUBERNUR KALIMANTAN BARAT,

H. SUTARMIDJI, SH, M.HUM

Kata Pengantar

Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Puji dan syukur kami sampaikan kepada Tuhan Yang Maha Esa atas Rahmat dan Karunianya, maka penyusunan Profil Perkembangan Kependudukan Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2018 dapat diselesaikan dengan baik, meskipun masih terdapat hal-hal yang perlu disempurnakan dalam penyusunannya.

Profil perkembangan kependudukan ini merupakan kondisi kependudukan Provinsi Kalimantan Barat yang dihasilkan dari pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil, selain itu juga untuk memenuhi ketentuan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah bahwa Pemerintah Daerah diwajibkan menyusun profil perkembangan kependudukan yang dilaksanakan setiap tahun.

Tak lupa kami ucapkan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada semua pihak yang telah memberikan sumbang saran serta masukan, sehingga buku profil perkembangan kependudukan tahun 2018 Provinsi Kalimantan Barat ini dapat terselesaikan tepat pada waktunya semoga dapat memberikan gambaran kependudukan untuk dipergunakan sebagai sumber data bagi semua stakeholder dalam rangka penyusunan perencanaan pembangunan dan pengambilan kebijakan secara umum di Provinsi Kalimantan Barat.

Kami menyadari bahwa dalam penyusunan Buku Profil Perkembangan Kependudukan Provinsi Kalimantan Barat tahun 2018 masih terdapat kekurangan dan kelemahan, maka kami sangat mengharapkan masukan, kritik dan saran untuk perbaikan penyusunan pada waktu yang akan datang.

Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Y. ANTHONIUS R, SE, M.SI
Pembina Utama Muda
NIP. 19660902 199403 1 005

DAFTAR ISI

SAMBUTAN GUBERNUR KALIMANTAN BARAT i
KATA PENGANTAR ii
DAFTAR ISI iii
DAFTAR TABEL vi
DAFTAR GRAFIK ix

BAB I. PENDAHULUAN 1
A. Latar Belakang 1
B. Tujuan 2
C. Ruang Lingkup 2
D. Sumber Data 2
E. Pengertian Umum 2
F. Sistematika Penyajian Profil Kependudukan 6

BAB II. GAMBARAN UMUM KONDISI PROVINSI KALBAR 7

A. Letak Geografis 7
B. Gambaran Ekonomi 8
C. Pendidikan 9
D. Pertanian 10
E. Perkebunan 11
F. Kelautan dan Perikanan 11
G. Budaya 12
H. Pariwisata 12
I. Perdagangan 13
J. Industri dan Pertambangan 14
K. Pelabuhan 15

BAB III. PERKEMBANGAN KEPENDUDUKAN 16

A. Kuantitas Penduduk 16
A.1 Jumlah Dan Persebaran Penduduk 16
A.1.1 Jumlah dan Pertumbuhan Penduduk 16
A.1.2 Persebaran dan Kepadatan Penduduk 18
A.2 Penduduk Menurut Karakterisrik Demografi 19

A.2.1 Jumlah dan Proporsi Penduduk Berdasarkan Umur dan Jenis Kelamin 19
A.2.2 Umur Median (Median Age) 21
A.2.3 Penduduk Lansia 23
A.2.4 Sex Ratio dan Dependency Ratio 23
A.2.5 Lahir – Mati (Fertilitas – Mortalitas) 28
A.2.6 Pendidikan 29
A.2.7 Status Pekerjaan 31
A.2.8 Agama 32
A.2.9 Golongan Darah 33
A.3 Dokumen Kependudukan 34
A.3.1 Keluarga yang memiliki Kartu Keluarga (KK) 35
A.3.2 Kepemilikan Kartu Tanda Penduduk Elektronik (KTP-el) 36
A.3.3 Kepemilikan Akta Kelahiran 36
A.3.4 Kepemilikan Akta Nikah/Akta Perkawinan 37
A.3.5 Kepemilikan Akta Kematian 38
A.3.6 Kepemilikan Akta Perceraian 39
A.3.7 Jumlah dan Proporsi Penduduk Menurut Status Kawin 40
A.4 Penyandang Cacat 42
A.5 Kabupaten, Kecamatan dan Desa Daerah Perbatasan 42
A.6 Orang Asing dan Kepemilikan Dokumen Keimigrasian 58
A.7 Rentan Administrasi Kependudukan 60
A.7.1 Penduduk Rentan 60
A.7.2 Penduduk Terpencil 60
B. Kualitas Penduduk 61
B.1 Indikator Pendidikan 61
B.1.1 Angka Melek Huruf 62
B.1.2 Angka Partisipasi Kasar (APK) 63
B.1.3 Angka Partisipasi Murni (APM) 65
B.1.4 Rata-Rata Lamanya Bersekolah 68
B.1.5 Angka Putus Sekolah 69
B.2 Indikator Kesehatan 70
B.2.1 Kelahiran 70
B.2.2 Kematian (Mortalitas) 73
B.3 Indikator Ekonomi 81

B.3.1 Jumlah Tenaga Kerja dan Angkatan Kerja 81
B.3.2 Angka Partisipasi Angkatan Kerja (APAK) 85
B.3.3 Jumlah dan Proporsi Penduduk Menurut Jenis Pekerjaan 87
B.3.4 Pengangguran Terbuka 91
B.4 Indikator Sosial 94
B.4.1 Jumlah Penduduk Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial 94
B.4.2 Proporsi Penduduk Penyandang Cacat Berdasarkan Kabupaten/Kota 96
B.4.3 Program Pengentasan Kemiskinan 98
C. Mobilitas Penduduk 99
C.1 Mobilitas Penduduk Permanen (Migrasi) 99
C.2 Mobilitas Penduduk Non Permanen 101

BAB IV. KEPEMILIKAN DOKUMEN KEPENDUDUKAN 102

A. Kepemilikan Kartu Keluarga 102
B. Kepemilikan Kartu Tanda Penduduk Elektronik (KTP-el) 103
C. Dokumen Akta Pencatatan Sipil 104
1. Pencatatan Kelahiran 105
2. Pencatatan Kematian 106
3. Pencatatan Perkawinan 107
4. Pencatatan Perceraian 107
5. Pencatatan Pengakuan Anak dan Pengesahan Anak 108

BAB V. PENUTUP 110

DAFTAR TABEL

Tabel 3.1: Jumlah Penduduk Laki-Laki Dan Perempuan Tahun 2018 16
Tabel 3.2: Pertumbuhan Penduduk 17
Tabel 3.3: Persebaran Penduduk Dan Kepadatan Penduduk. 19
Tabel 3.4: Penduduk Berdasarkan Kelompok Umur Dan Jenis Kelamin. 20
Tabel 3.5: Jumlah Penduduk Menurut Kelompok Umur Lima Tahunan Dan Jumlah Kumulatifnya 22
Tabel 3.6: Sex Ratio Jenis Kelamin Berdasarkan Kelompok Umur 24
Tabel 3.7: Sex Ratio Jenis Kelamin Penduduk Per Kabupaten/Kota Kalimantan Barat 25
Tabel 3.8: Persentase Penduduk Berdasarkan Usia Muda, Produktif dan Usia Tua 27
Tabel 3.9: Jumlah Penduduk Menurut Pendidikan Terakhir 30
Tabel 3.10: Persentase Penduduk Menurut Pendidikan Terakhir 31
Tabel 3.11: Jumlah Penduduk Menurut Jenis Pekerjaan Penduduk di Prov. Kalimantan Barat Tahun 2018 32
Tabel 3.12: Jumlah Penduduk Menurut Agama 33
Tabel 3.13: Penduduk Berdasarkan Golongan Darah 2018 34
Tabel 3.14: Kepemilikan Kartu Keluarga (KK) di Prov. Kalbar 35
Tabel 3.15: Wajib KTP Penduduk di Provinsi Kalbar 36
Tabel 3.16: Penduduk Menurut Kepemilikan Akta Kelahiran 37
Tabel 3.17: Jumlah Akta Perkawinan 38
Tabel 3.18: Jumlah Akta Kematian 39
Tabel 3.19: Jumlah Akta Perceraian..... 39
Tabel 3.20: Jumlah Penduduk Menurut Status Perkawinan 40
Tabel 3.21: Jumlah Penduduk Menurut Status Cerai 41
Tabel 3.22: Jumlah Penduduk Penyandang Cacat 42
Tabel 3.23: Kabupaten, Kecamatan dan Desa serta Penduduk Daerah Perbatasan Provinsi Kalbar Tahun 2018 43
Tabel 3.24: Data Gedung Sekolah di Kawasan Perbatasan Tahun 2018 58
Tabel 3.25: Pengeluaran Dokumen Keimigrasian 59
Tabel 3.26: Komunitas Terpencil Di Kalimantan Barat 61
Tabel 3.27: Jumlah Sekolah dan Jumlah guru TK, SD, SMP,SMA Provinsi Kalbar 62
Tabel 3.28: Angka Partisipasi Kasar / Gross Enrollment Ratio Tahun 2018 63
Tabel 3.29: APK SD Se-Kab/Kota Tahun 2018 64
Tabel 3.30: APK SMP-SMA Se-Kab/Kota Tahun 2018 65
Tabel 3.31: APM SD se Kabupaten/Kota Tahun 2018 66

Tabel 3.32: APM SMP – SMA se Kabupaten/Kota Tahun 2018 67
Tabel 3.33: Angka Partisipasi Murni/Net Enrollment Ratio Tahun 2018 68
Tabel 3.34: Angka Harapan Lama Sekolah dan Angka Rata-Rata Lama Sekolah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2018 69
Tabel 3.35: Angka Putus Sekolah 70
Tabel 3.36: Angka Kelahiran Menurut Kelompok Umur (ASFR) 71
Tabel 3.37: Angka Kelahiran Total (Total Fertility Rate/TFR) 72
Tabel 3.38: Bayi Lahir Mati Kabupaten/Kota di Prov. Kalbar 74
Tabel 3.39: Angka Kematian Neonatal / NNDR 75
Tabel 3.40: Penyebab Kematian Neonatal 76
Tabel 3.41: Angka Kematian Post Neo-Natal 77
Tabel 3.42: Angka Kematian Balita Kab / Kota di Prov. Kalbar 78
Tabel 3.43: Kematian Ibu/Maternal Mortality Prov. Kalbar 2018 79
Tabel 3.44: Status Gizi Buruk di Prov. Kalbar Tahun 2018 81
Tabel 3.45: Proporsi Tenaga Kerja Berdasarkan Kelompok Umur Prov. Kalbar 82
Tabel 3.46: Proporsi Tenaga Kerja Kabupaten/Kota di Prov. Kalbar 83
Tabel 3.47: Proporsi Angkatan Kerja Berdasarkan Kelompok Umur Di Provinsi Kalimantan Barat 84
Tabel 3.48: Proporsi Angkatan Kerja Menurut Kabupaten/Kota Di Provinsi Kalimantan Barat 85
Tabel 3.49: Angka Partisipasi Angkatan Kerja (APAK) 86
Tabel 3.50: Jumlah dan Proporsi Penduduk Angkatan Kerja Menurut Pendidikan yang ditamatkan dan Jenis Kelamin 87
Tabel 3.51: Jumlah Penduduk Menurut Jenis Pekerjaan di Provinsi Kalimantan Barat (Sesuai Formulir F 1.01) 88
Tabel 3.52: Jumlah dan Proporsi Penduduk Menurut Jenis Pekerjaan 91
Tabel 3.53: Tingkat Pengangguran Terbuka Menurut Kelompok Umur di Provinsi Kalimantan Barat 92
Tabel 3.54: Tingkat Pengangguran Terbuka Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Kalimantan Barat 93
Tabel 3.55: Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2018 94
Tabel 3.56: Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2018 96
Tabel 3.57: Angka Kecacatan Prov. Kalbar Tahun 2018 97
Tabel 3.58: Data Fakir Miskin Kalimantan Barat Tahun 2018 98
Tabel 3.59: Mobilitas Penduduk Permanen (Migrasi) 100
Tabel 4.1: Kepemilikan Kartu Keluarga di Provinsi Kalbar 103
Tabel 4.2: Persentase Penduduk Wajib KTP-el dan Kepemilikan KTP-el Kabupaten/Kota di Kalbar 104

Tabel 4.3: Jumlah Penerbitan Akta Kelahiran Kabupaten/Kota di Provinsi Kalimantan Barat 105
Tabel 4.4: Penerbitan Akta Kematian Kabupaten/Kota di Provinsi Kalimantan Barat 106
Tabel 4.5: Jumlah Penerbitan Akta Perkawinan Kabupaten/Kota di Provinsi Kalimantan Barat 107
Tabel 4.6: Jumlah Penerbitan Akta Perceraian Kabupaten 108

DAFTAR GRAFIK

Grafik 3.1: Pertumbuhan Penduduk Tahun 2017-2018 18
Grafik 3.2: Piramida Penduduk Berdasarkan Kelompok Umur Dan Jenis Kelamin 21
Grafik 3.3: Sex Ratio Penduduk Kalimantan Barat 26
Grafik 3.4: Penduduk Berdasarkan Usia Muda, Produktif dan Usia Tua 28

BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Penduduk merupakan salah satu dasar pembentukan sebuah negara, selain pemerintahan yang berdaulat dan wilayah negara. Sedangkan tujuan suatu negara dibentuk adalah dalam rangka mensejahterakan penduduk yang tinggal dalam negara tersebut.

Untuk mencapai tujuan pembentukan negara tersebut, penyelenggara negara (pemerintah) membutuhkan data dan informasi kependudukan yang akurat agar kebijakan yang disusun benar-benar efisien dan efektif untuk keperluan penduduk.

Efisiensi dan efektivitas kebijakan yang disusun harus didukung oleh data kependudukan yang akurat, maka dari itu Undang-undang Nomor 24 tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan mengamanatkan bahwa satu-satunya data kependudukan yang digunakan untuk menyusun kebijakan perencanaan pembangunan nasional, provinsi dan kabupaten/kota adalah data kependudukan yang dihasilkan oleh Kementerian Dalam Negeri. Hal senada juga, diatur dalam Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, menegaskan bahwa dalam Perencanaan Pembangunan Daerah harus didasarkan pada data dan informasi yang dikelola dalam sistem informasi pembangunan Daerah.

Untuk memudahkan pemanfaatan data dan informasi kependudukan, sesuai Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 65 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Profil Perkembangan Kependudukan disajikan dalam bentuk buku Profil Perkembangan Kependudukan. Buku Profil Perkembangan Kependudukan juga berisi gambaran kondisi kependudukan di suatu wilayah (provinsi dan kabupaten/kota) dan prediksi prospek kependudukan di masa yang akan datang.

Kerangka pikir pedoman penyusunan profil perkembangan kependudukan mencakup 5 (lima) hal pokok, yaitu :

1. Menyajikan perkembangan profil secara kuantitatif sehingga tampak jelas apa yang sudah berlangsung, kondisi terakhir dan apa yang diproyeksikan di kemudian hari;
2. Mengidentifikasi kelompok atau segmen kependudukan yang membutuhkan perhatian khusus dan upaya-upaya yang diperlukan untuk penanganannya sehingga menjadi berkualitas;
3. Dari point 1 dan 2 teridentifikasi potensi penduduk yang dapat dijadikan asset pembangunan daerah dan nasional;
4. Mengkoordinasikan, melakukan bimbingan teknis dengan instansi terkait untuk memperoleh kesepakatan dan pemahaman dalam penyusunan dan pemanfaatannya;
5. Mendorong percepatan terwujudnya data base penduduk dan analisa untuk kebijakan pembangunan daerah.

B. Tujuan

Penyusunan profil perkembangan kependudukan adalah dalam rangka menyiapkan acuan bagi instansi pemerintah dalam rangka menyusun kebijakan pembangunan.

C. Ruang Lingkup

1. Data kuantitatif yang berkaitan dengan pengendalian kuantitas penduduk;
2. Data kualitatif yang berkaitan dengan pengembangan kualitas penduduk; dan
3. Data kuantitatif dan kualitatif yang berkaitan dengan pengarahan mobilitas penduduk.

D. Sumber Data

Sumber data penyusunan Buku Profil Perkembangan Kependudukan Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2019, terdiri dari :

1. Data yang bersumber dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten/Kota se Kalimantan Barat.
2. Data yang bersumber dari Satuan Kerja Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Barat, Kantor Imigrasi, Kantor Wilayah Kementerian Agama, dan instansi vertikal lainnya yang terkait.

E. Pengertian Umum

1. ***Penduduk*** adalah Warga Negara Indonesia dan Orang Asing yang bertempat tinggal di Indonesia (Undang-undang No. 24 tahun 2013);

2. ***Administrasi Kependudukan*** adalah rangkaian kegiatan penataan dan penertiban dalam penerbitan dokumen dan data kependudukan melalui pendaftaran penduduk, pencatatan sipil, pengelolaan informasi administrasi kependudukan serta pendayagunaan hasilnya untuk pelayanan publik dan pembangunan sektor lain (Undang-undang No. 24 tahun 2013);
3. ***Perkembangan kependudukan*** adalah kondisi yang berhubungan dengan perubahan keadaan kependudukan yang dapat berpengaruh dan dipengaruhi oleh keberhasilan pembangunan berkelanjutan (Undang-undang No 52 tahun 2009)
4. ***Data Kependudukan*** adalah data perseorangan dan atau data agregat yang terstruktur sebagai hasil dari kegiatan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil (Undang-undang No. 24 tahun 2013);
5. ***Kualitas Penduduk*** adalah kondisi penduduk dalam aspek fisik dan non fisik yang meliputi derajat kesehatan, pendidikan, pekerjaan, produktivitas, tingkat sosial, ketahanan, kemandirian, kecerdasan, sebagai ukuran dasar untuk mengembangkan kemampuan dan menikmati kehidupan sebagai manusia yang bertakwa, berbudaya, berkepribadian, berkebangsaan dan hidup layak. (Undang-undang No. 52 tahun 2009);
6. ***Profil Perkembangan Kependudukan*** adalah kumpulan data dan informasi tentang perkembangan kependudukan dalam bentuk tertulis, yang mencakup segala kegiatan yang berhubungan dengan perubahan keadaan penduduk yang meliputi kuantitas, kualitas dan mobilitas yang mempunyai pengaruh terhadap pembangunan dan lingkungan hidup;
7. ***Peristiwa Kependudukan*** adalah kejadian yang dialami penduduk yang harus dilaporkan karena membawa akibat terhadap penerbitan atau perubahan Kartu Keluarga, Kartu Tanda Penduduk, dan/atau surat keterangan kependudukan lainnya meliputi pindah datang, perubahan alamat, serta status tinggal terbatas menjadi tinggal tetap (Undang-undang No. 24 tahun 2013);
8. ***Peristiwa Penting*** adalah kejadian yang dialami oleh seseorang meliputi kelahiran, kematian, lahir mati, perkawinan, perceraian, pengakuan anak, pengesahan anak, pengangkatan anak, perubahan nama, dan perubahan status kewarganegaraan (Undang-undang No. 24 tahun 2013);

9. ***Kematian atau mortalitas*** menurut WHO adalah: suatu peristiwa menghilangnya semua tanda-tanda kehidupan secara permanent yang bisa terjadi setiap saat setelah kelahiran hidup (Badan Pusat Statistik);
10. ***Ratio jenis kelamin*** adalah suatu angka yang menunjukkan perbandingan jenis kelamin antara banyaknya penduduk laki-laki dan penduduk perempuan di suatu daerah pada waktu tertentu;
11. ***Mobilitas Penduduk*** adalah merupakan gerak penduduk secara keruangan dengan melewati batas daerah administrai tertentu seperti Provinsi, Kabupaten/Kota, Kecamatan, desa/kelurahan ;
12. ***Mobilitas penduduk Permanen (migrasi)*** adalah perpindahan penduduk dengan tujuan untuk menetap dari suatu tempat ke tempat lain melewati batas administratif (migrasi internal) atau batas politik/Negara (migrasi internasional);
13. ***Mobilitas Penduduk non-permanent (circulation/sirkuler)*** adalah perpindahan penduduk dengan tujuan untuk tidak menetap dari suatu tempat ke tempat lain melewati batas administratif. Mobilitas penduduk *non-permanent* dibagi menjadi dua yaitu ulang-alik atau *nglaju (commuting)* dan menginap/mondok.
14. ***Penduduk musiman*** merupakan salah satu jenis mobilitas penduduk *non-permanent* yang bekerja tidak pada daerah domisilinya dan menetap dalam kurun waktu lebih dari satu hari tetapi kurang dari satu tahun dan dilakukan secara berulang.
15. ***Mobilitas penduduk ulang-alik atau nglaju (commuting)*** adalah gerak penduduk dari daerah asal ke daerah tujuan dalam batas waktu tertentu dan kembali ke daerah asal pada hari yang sama.
16. ***Migrasi kembali (return migration)*** adalah banyaknya penduduk yang pada waktu diadakan sensus bertempat tinggal di daerah yang sama dengan tempat lahir dan pernah bertempat tinggal di daerah yang berbeda.
17. ***Migrasi semasa hidup (life time migration)*** adalah bentuk migrasi dimana pada waktu diadakan sensus tempat tinggal sekarang berbeda dengan tempat kelahirannya.
18. ***Migrasi risen (recent migration)*** adalah bentuk migrasi melewati batas wilayah administrasi (desa/kec/kab/provinsi) dimana pada waktu diadakan

sensus bertempat tinggal di daerah yang berbeda dengan tempat tinggal lima tahun yang lalu.

19. ***Transmigrasi*** adalah perpindahan penduduk secara sukarela untuk meningkatkan kesejahteraan dan menetap di wilayah pengembangan transmigrasi atau lokasi permukiman transmigrasi.
20. ***Urbanisasi*** adalah suatu proses bertambahnya konsentrasi penduduk di perkotaan dan atau proses perubahan suatu daerah perdesaan menjadi perkotaan, baik secara fisik maupun ukuran-ukuran spasial dan/atau bertambahnya fasilitas perkotaan, serta lembaga-lembaga sosial, maupun perilaku masyarakat.
21. ***Penduduk Usia Kerja*** adalah penduduk yang berusia 15 tahun sampai dengan 64 tahun.
22. ***Angka Partisipasi Angkatan Kerja*** adalah proporsi angkatan kerja terhadap penduduk usia kerja.
23. ***Pengangguran*** adalah orang yang termasuk angkatan kerja, namun pada saat pendataan/*survey* atau sensus tidak bekerja dan sedang mencari kerja.
24. ***Angka Pengangguran*** adalah proporsi jumlah pengangguran terhadap angkatan kerja.
25. ***Bukan Angkatan Kerja*** adalah penduduk usia 15 tahun ke bawah dan penduduk berusia 64 tahun ke atas.
26. ***Lahir hidup*** adalah suatu kelahiran bayi tanpa memperhitungkan lamanya di dalam kandungan, dimana si bayi menunjukkan tanda-tanda kehidupan pada saat dilahirkan, misalnya ada nafas, ada denyut jantung atau denyut tali pusar atau gerakan otot.
27. ***Lahir mati*** adalah kelahiran seorang bayi dari kandungan yang berumur paling sedikit 28 minggu tanpa menunjukkan tanda-tanda kehidupan pada saat dilahirkan.
28. ***Angka Kelahiran Total (Total Fertility Rate/TFR)*** adalah rata-rata banyaknya anak yang akan dimiliki oleh seorang wanita pada masa reproduksinya jika ia mengikuti pola fertilitas pada saat TFR dihitung.
29. ***Angka Kematian Bayi Baru Lahir*** adalah banyaknya kematian baru lahir, usia kurang dari satu bulan (0-28) hari pada suatu periode per 1.000 kelahiran hidup pada pertengahan periode yang sama.

30. ***Angka Kematian Bayi Lepas Baru Lahir*** adalah banyaknya kematian bayi lepas baru lahir (usia 1-11 bulan) pada satu periode per 1.000 kelahiran hidup pada pertengahan periode yang sama.
31. ***Angka Kematian Bayi/IMR*** adalah banyaknya kematian bayi usia kurang dari satu tahun (9-11 bulan) pada suatu periode per 1.000 kelahiran hidup pertengahan periode yang sama.
32. ***Angka Kematian Ibu/MMR*** adalah banyaknya kematian ibu pada waktu hamil atau selama 42 hari sejak terminasi kehamilan per 100.000 kelahiran hidup, tanpa memandang lama dan tempat kelahiran yang disebabkan karena kehamilannya atau pengelolaannya.
33. ***Angka Kematian Kasar/CDR*** adalah banyaknya kematian yang terjadi pada suatu tahun tertentu untuk setiap 1000 penduduk.
34. ***Rumah Tangga*** adalah sekumpulan orang yang tinggal dalam satu rumah/bangunan tempat tinggal dan makan dari satu dapur.
35. ***Keluarga*** adalah sekumpulan orang yang tinggal dalam satu rumah yang mempunyai hubungan kekerabatan akibat perkawinan, adopsi dll.
    - *Keluarga luas* (ayah, ibu, anak dan keluarga lain)
    - *Keluarga inti* (ayah, ibu dan anak kandung/tiri atau ayah dengan anak atau ibu dengan anak).

F. Sistematika Penyajian Profil Kependudukan

Adapun materi yang disajikan dalam buku Profil Perkembangan Kependudukan Provinsi Kalimantan Barat ini, tersusun dalam sistematika sebagai berikut :

Bab I : Pendahuluan

Pada bagian pendahuluan ini, diuraikan latar belakang, tujuan, ruang lingkup, sumber data dan konsep penyusunan buku Profil Kependudukan.

Bab II : Gambaran Umum Daerah Provinsi Kalimantan Barat

Bab III : Perkembangan Kependudukan

Bab IV : Kepemilikan Dokumen Kependudukan

Bab V : Penutup

BAB II
GAMBARAN UMUM
PROVINSI KALIMANTAN BARAT

Provinsi Kalimantan Barat adalah salah satu dari 34 provinsi yang ada di Indonesia, yang beribu kota di Kota Pontianak. Luas wilayah 147.275,26 km² atau sekitar 7,53% dari luas Indonesia. Dari Utara ke Selatan sepanjang lebih dari 600 KM dan sekitar 850 KM dari Timur ke Barat. Di sebelah barat berbatasan dengan Selat Karimata dengan lebar 400 KM dan kedalaman perairan laut natuna sampai dengan 200M, sedangkan di sebelah timur berbatasan dengan Provinsi Kalimantan Timur dan Provinsi Kalimantan Tengah. Sebelah Utara berbatasan langsung dengan Sarawak (Malaysia Timur) dan Provinsi Kalimantan Utara, sedangkan sebelah selatan berbatasan dengan Laut Jawa dan Provinsi Kalimantan Tengah.

Memperhatikan batas-batas wilayah tersebut, maka letak Provinsi Kalimantan Barat sangat strategis untuk dikembangkan. Jalur transportasi udara antar kabupaten/kota dan antar provinsi di Pulau Kalimantan dan di luar Pulau Kalimantan sudah tersambung dengan moda transportasi pesawat udara,sedangkan transportasi darat antar kabupaten/kota juga sudah tersambung melalui jalan darat. Bahkan dengan provinsi lain di Pulau Kalimantan sudah tersambung melalui Jalan Trans Kalimantan, begitu juga transportasi darat menuju Serawak dan Brunai Darussalam sudah dapat menggunakan transportasi darat. Selain transportasi darat dan udara, moda transportasi laut juga sering digunakan untuk menyeberang ke Pulau Natuna, Pulau Jawa dan pulau-pulau lainnya di Indonesia.

A. Letak Geografis

Provinsi Kalimantan Barat terletak antara $2^{0}08$ LU dan $3^{0}05$ LS serta di antara $108^{o}0$ BT dan $114^{o}10$ BT.Dengan letak geografis seperti itu, Provinsi Kalimantan Barat dilalui oleh garis khatulistiwa (garis lintang 0°) tepatnya di Kota Pontianak.

Karena berbatasan dengan negara Malaysia bagian timur, saat ini Provinsi Kalimantan Barat memiliki 5 (lima) pintu masuk di daerah perbatasan

(border) untuk masuk ke Negara Malaysia bagian timur, yaitu di Kabupaten Sambas border Aruk, di Kabupaten Bengkayang border Jagoi Babang, di Kabupaten Sanggau border Entikong, di Kabupaten Sintang Border Jasa, dan di Kabupaten Kapuas Hulu border Badau.

Wilayah Kalimantan Barat sebagian besar merupakan daratan dengan tofografi dataran rendah dengan luas sekitar 147.307 km2 atau 7,53 persen dari luas Indonesia atau 1,13 kali luas pulau Jawa. Wilayah ini membentang lurus dari Utara ke Selatan sepanjang lebih dari 600 km dan sekitar 850 km dari Barat ke Timur, Dilihat dari besarnya wilayah, Kalimantan Barat termasuk Provinsi terbesar ketiga, setelah Irian Jaya (421.891 km2) dan Kalimantan Tengah (152.600 km2).

Provinsi Kalimantan Barat memiliki ratusan sungai ada yang besar dan ada juga yang kecil, sebagian besar digunakan untuk jalur transportasi sungai terutama untuk mencapai daerah pedalaman. Bahkan sungai Kapuas merupakan sungai terpanjang di Indonesia dengan panjang 1.086 km, dari panjang tersebut yang dapat dilayari sepanjang 942 km. Sungai-sungai panjang lainnya adalah Sungai Melawi yang dapat dilayari 471 km, Sungai Pawan sepanjang 197 km, Sungai Kendawangan sepanjang 128 km, Sungai Jelai sepanjang 135 km, Sungai Sekadau sepanjang 117 km, Sungai Sambas sepanjang 233 km, dan Sungai Landak sepanjang 178 km. Selain sungai juga terdapat danau yang terkenal yaitu Danau Sentarum dan Danau Luar yang berada di Kabupaten Kapuas Hulu. Danau Sentarum seluas 117.500 hektar, pada musim kemarau Danau Sentarum airnya kering, dan dimanfaatkan masyarakat sekitar untuk menangkap ikan.

B. Gambaran Ekonomi

Ekonomi Kalimantan Barat triwulan IV-2018 tumbuh 5,07 persen (*y-on-y*). Dari sisi produksi, pertumbuhan didorong oleh hampir semua lapangan usaha, dengan pertumbuhan tertinggi dicapai Lapangan Usaha Pertambangan dan Penggalian yang tumbuh 9,86 persen. Dari sisi Pengeluaran, pertumbuhan tertinggi dicapai oleh Komponen Pengeluaran LNPRT yang tumbuh sebesar 8,94 persen.

Dari sisi Pengeluaran, pertumbuhan tertinggi dicapai oleh Komponen Pengeluaran LNPRT (Lembaga Non Profit yang Melayani Rumah Tangga) yang

tumbuh sebesar 8,94 persen diikuti oleh Komponen Konsumsi Rumah Tangga (PK-RT) sebesar 5,57 persen; dan Komponen Ekspor Barang dan Jasa sebesar 2,30 persen.

Ekonomi Kalimantan Barat triwulan IV-2018 tumbuh sebesar 1.75 persen (*q-to-q*). Dari sisi produksi, pertumbuhan tertinggi pada Lapangan Usaha Jasa Pendidikan sebesar 6,33 persen. Sementara dari sisi Pengeluaran dicapai oleh Komponen Pengeluaran Konsumsi Pemerintah yaitu sebesar 14,74 persen.

Ekonomi Kalimantan Barat triwulan IV-2018 (*c-to-c*) tumbuh 5,06 persen. Dari sisi produksi, pertumbuhan didorong oleh Lapangan Usaha Jasa Keuangan dan Asuransi sebesar 8,15 persen. Sementara dari sisi pengeluaran terutama didorong oleh Komponen LNPRT yang tumbuh sebesar 9,68 persen.

Struktur ekonomi Kalimantan Barat pada triwulan IV-2018 didominasi oleh Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan sebesar 18,70 persen, Industri Pengolahan 16,51 persen, Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Motor 14,03 persen dan Konstruksi 13,35 persen. (Sumber data; Badan Pusat Statistik Provinsi Kalimantan Barat, Ir. Martalena, M.M Kepala Bidang NWAS)

C. Pendidikan

Kualitas penduduk dapat dilihat dari tingkat pendidikannya. Semakin tinggi tingkat pendidikan seharusnya semakin tinggi kualitas penduduk tersebut. Indikator kualitas pendidikan dapat dilihat dari angka partisipasi sekolah, pendidikan tertinggi yang ditamatkan, dan juga angka melek huruf (kemampuan membaca dan menulis).

Menurut Lembaga Penjamin Mutu Pendidikan Kalimantan Barat kekurangan guru juga menjadi masalah yang dapat mengurangi kualitas pendidikan. Kekurangan tenaga guru di Kalimantan Barat sangat parah, tidak hanya terjadi pada sekolah negeri, pada sekolah swastapun tidak kalah pentingnya juga mengalami keterbatasan.Keterbatasan tenaga guru terjadi juga di daerah perkotaan, apalagi pada daerah pedalaman,

Walaupun masih dalam kondisi yang masih cukup memprihatinkan seperti yang disampaikan di atas, Provinsi Kalimantan Barat masih dapat menunjukkan prestasi di tingkat nasional dan internasional, banyak prestasi yang diraih oleh siswa-siswi baik di bidang seni maupun pada perlombaan bidang studi. Demikian juga halnya dengan prestasi di tingkat perguruan tinggi,

banyak prestasi yang diperoleh pada perlombaan tingkat Kabupaten/Kota, Provinsi dan Nasional.

D. Pertanian

Wilayah Provinsi Kalimantan Barat memiliki lahan pertanian menurut Plt. Kabid Prasarana dan Sarana Pertaninan Dinas Pertanian, Tanaman dan Hortikultura (Distan TPH) Kalbar, Ida Kysdianti mengatakan (07/02/2019) "Dari data statistik pertanian tersebut luas pertanian di Kalbar yang tersebar di 14 kabupaten atau kota di Kalbar yakni 300 ribuan hektare," yang terbagi untuk area sawah dan pertanian lainnya. Dengan ketersediaan lahan tersebut maka peranan sektor pertanian memegang peran yang strategis dalam perekonpomian suatu daerah. Peranan strategis sektor pertanian bagi pertumbuhan ekonomi Provinsi Kalimantan Barat antara lain berkontribusi dalam PDRB, Penerimaan devisa melalui ekspor hasil pertanian, penyediaan bahan baku industri serta berperan dalam pemertaan pembangunan melalui ketahanan pangan, penyediaan lapangan kerja, peningkatan pendapatan dan peningkatan pasar dalam negeri.

Pemerintah provinsi Kalimantan Barat ingin mewujudkan pertanian tanaman pangan dan hortikultura yang modern, budaya industri yang berbasis pedesaan dan berdaya saing melalui peningkatan pembangunan tanaman pangan dan hortikultura yang berkelanjutan dan berwawasan lingkungan, meningkatkan daya saing serta meningkatkan managemen pembangunan pertanian tanaman pangan dan hortikultura.

Namun demikian dalam melaksanakan pembangunan pertanian di Kalimantan Barat masih banyak ditemukan permasalahan seperti keterbatasan sarana dan prasarana untuk membagun sektor pertanian, keterbatasan ketrampilan teknologi di bidang pertanian, akses layanan usaha yaitu permodalan terbatas, keterbatasan infrastruktur pengairan, keterbatasan pupuk bersubsidi dan masih banyak permasalahan teknis lainnya di lapangan. Permasalahan tersebut mengakibatkan produktivitas belum optimal, luasan lahan petani sempit dan adanya ancaman alih fungsi lahan, wilayah pemasaran skala lokal, pembiayaan usaha tani terbatas, saat panen melimpah harga sangat rendah.

Dalam melaksanakan pembangunan pertanian diharapkan pemerintah provinsi kalimantan barat melalui instansi terkait diharapkan dapat melakukan langkah-langkah yang konkrit yang didukung dengan ketersediaan sumber daya manusia, sumber daya alam, inovasi teknologi terapan, membangun kelembagaan yang memadai dan menjaga iklim usaha yang kondusif serta penyediaan sarana produksi dan permodalan yang memadai. Sehingga tujuan pemerintah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dapat tercapai.

E. Perkebunan

Selain dari lahan pertanian, bahwa Provinsi Kalimantan Barat memiliki potensi lahan untuk sektor perkebunan. Luas area yang dapat dikembangkan untuk perkebunan sekitar 3.5 juta Ha. Dari luas area tersebut terbagi untuk kebun kelapa sawit, karet, kelapa, kopi, lada, kakao, sagu, pinang dan tanaman perkebunan lainnya.

Sektor Perkebunan di Provinsi Kalimantan Barat komoditi andalan didominasi oleh kelapa sawit dengan hasil olehan menjadi CPO dan PKO, selanjutnya karet dan Kelapa (kelapa dalam, kelapa hibrida, kelapa deres), sedangkan untuk perkebunan lainnya jumlahnya tidak signifikan dan sebarannya terbatas pada daerah-daerah tertentu. Meskipun harga jual karet yang sampai saat ini belum mampu bersaing namun masyarakat petani karet tetap bertahan dan merambah ke usaha perkebunan sawit, sehingga petani kelapa sawit semakin bertambah.

Selain kedua komoditi andalan tersebut di atas, Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat tetap mengembangkan potensi perkebunan yang ada pada daerah-daerah tertentu yang dapat meningkatkan penghasilan masyarakat perkebunan melalui intensifikasi dan ekstensifikasi bidang perkebunan. Meningkatkan produktifitas perkebunan dengan upaya memperbaiki jaringan irigasi, penyiapan bibit unggul, menjaga ketersediaan pupuk setiap daerah, memberikan subsidi pupuk, meningkatkan ketrampilan petani melalui penyuluhan dan pelatihan dan sebagainya. Ekstensifikasi sektor perkebunan melalui upaya meningkatkan luasan lahan perkebunan bagi petani atau dengan upaya alih fungsi lahan.

F. Kelautan dan Perikanan

Sektor kelautan dan perikanan telah dijadikan salah satu sektor andalan karena perannya yang sangat strategis yaitu sebagai penyedia lapangan kerja,

peningkatan pendapatan, sebagai bahan baku industri perikanan serta sebagai penyediaan makanan yang mengandung protein tinggi untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia masyarakat Kalbar.

Pola usaha perikanan umumnya merupakan pola konvensional (nelayan tangkap), Demikian juga dengan perairan umum masih bersifat konvensional, sedangkan perikanan budidaya umumnya sudah merupakan pola agribisnis baik perorangan ataupun perusahaan.

G. Budaya

Provinsi Kalimantan Barat mempunyai keragaman budaya sebagai karya dari berbagai suku yang ada di Provinsi Kalimantan Barat. Keragaman budaya merupakan asset daerah yang tak ternilai dan tentunya merupakan kebanggaan masyarakat Kalimantan Barat.

Masuknya pengaruh Islam di Kalimantan Barat sekitar abad XV melalui jalur barat, selatan dan timur. Jalur barat pertama kali orang Islam dating dari China dan mendirikan komunitas Muslim Hanafi di Sambas tahun 1407. Ajaran Islam merupakan pilar utama kebudayaan Melayu, adat istiadat berdasarkan ajaran Islam. Domisili masyarakat Melayu disekitar pesisir sungai dan pantai tidak jauh dari perairan, terlihat dari istana raja dan masjid selalu menghadap atau terletak di tepi sungai.

Dalam memeriahkan event-event budaya, masyarakat Kalimantan Barat sering berkolaborasi antara Melayu, Dayak dan Tionghoa yang menggambarkan keharmonisan suku. Keragaman seni tari sering dipagelarkan kepada tamu-tamu yang mengunjungi Kalimantan Barat serta menjadi wahana promosi seni budaya Kalimantan Barat di luar negeri.

Budaya Naik Dango yang ditampilkan oleh masyarakat dayak sebagai ucapan terimakasih atas keberhasilan panen padi telah menjadi event daerah yang setiap tanggal 27 April setiap tahun dilaksanakan.

Ada juga upacara adat Robo-Robo yang setiap tahun dilaksanakan. Upacara adat robo-robo menceritakan prosesi kedatangan raja kabupaten Mempawah.

Pesta yang dilaksanakan sebagai ucapan terimakasih kepada sang pencipta atas panen padi yang berlimpah, yang dapat melambangkan persatuan,

aspirasi, identitas kemakmuran yaitu upacara Gawai Dayak. Gawai Dayak dilaksanakan setelah panen padi.

H. Pariwisata

Sektor pariwisata mempunyai konstribusi untuk meningkatkan pendapatan masyarakat dan pemerintah. Sektor pariwisata Kalimantan Barat secara keseluruhan belum digarap secara optimal, sehingga belum memberiakn konstribusi yang diharapkan.

Obyek wisata Kalimantan Barat secara garis besar dibedakan menjadi wisata alam dan wisata yang dibuat oleh manusia. Obyek wisata alam berupa, pantai, sungai, bukit, air terjun, sedangkan obyek wisata buatan meliputi hasil kerajinan, makanan olahan dan lain-lain.

Upacara adat yang dilakukan oleh berbagai etnis juga menjadi magnet wisatawan berkunjung ke Kalimantan Barat, seperti barongsai dan naga di Kota Singkawang, upacara naik dango dan gaway dayak di Kabupaten Landak, Sanggau, Sekadau, Sintang, Melawi, Kapuas Hulu, Ketapang dan Bengkayang, lomba sampan di Sambas, robo-robo di Kabupaten Mempawah, dan fenomena alam di garis khatulistiwa di Kota Pontianak.

I. Perdagangan

Sebagai bagian dari NKRI, perdagangan di Kalimantan Barat dilakukan antar kabupaten/kota, antar provinsi, antar pulau dan antar negara. Perdagangan antar kabupaten/kota dilakukan untuk memenuhi kebutuhan dasar berupa papan, beras, sayur-sayuran dan buah-buahan, ikan, kebutuhan daging ayam, kambing dan sapi. Perdagangan antar provinsi dan antar pulau biasanya untuk memenuhi kebutuhan beras, garam, gula, kopi, pakan ternak, pakaian atau bahan pakaian dan lain-lain, sedangkan pasar eksport dominan adalah produk perkebunan, perikanan dan peternakan.

Nilai impor Kalimantan Barat Februari 2019 turun 11,92 persen dibanding Januari 2019 yaitu dari US$34,52 juta turun menjadi US$30,41 juta. Bahan Bakar Mineral (HS27), Mesin-mesin/Pesawat Mekanik (HS84) serta Pupuk (HS31), merupakan penyumbang impor terbesar Kalimantan Barat pada Februari 2019. Ketiga golongan barang tersebut menyumbang masing-masing 48,93 persen, 17,73 persen, dan 9,75 persen dengan kontribusi 76,41 persen. Malaysia, Tiongkok, dan Singapura merupakan tiga negara pemasok terbesar Impor

Kalimantan Barat pada Februari 2019 yaitu masing-masing 44,84 persen, 24,96 persen, dan 11,75 persen, dengan kontribusi US$24,80 Juta atau 81,55 persen dari keseluruhan nilai impor Kalimantan Barat. Sebagian besar impor Kalimantan Barat berasal dari Asia yaitu US$27,70 juta atau 91,09 persen sedangkan kontribusi nilai impor berasal dari Negara Utama Lainnya (Belarus, Jerman, dan Amerika Serikat) US$2,31 juta atau sekitar 7,61 persen serta 1,30 persen berasal dari negara lainnya.

Untuk ekspor, Nilai ekspor Kalimantan Barat Februari 2019 naik 8,15 persen dibanding Januari 2019 yaitu dari US$84,79 juta menjadi US$91,70 juta. Tujuan ekspor Kalimantan Barat Februari 2019 masih didominasi negara Asia yaitu dengan kontribusi 97,51 persen, sedangkan kontribusi nilai ekspor ke negara tujuan utama lainnya (Argentina) sebesar 0,90 persen serta 1,59 persen ke negara tujuan lainnya. Malaysia, Tiongkok, dan India merupakan tiga negara tujuan ekspor Kalimantan Barat terbesar pada Februari 2019, masing-masing mencapai nilai ekspor US$40,67 juta, US$28,01 juta dan US$13,48 juta dengan kontribusi US$82,16 juta atau 89,59 persen

Dilihat dari barang yang diekspor, Bahan Kimia Anorganik (HS28), Bijih, Kerak, dan Abu Logam (HS26), serta Lemak & Minyak Hewan/Nabati (HS15), merupakan tiga komoditi unggulan ekspor Kalimantan Barat Februari 2019, yaitu masing-masing berkontribusi 42,17 persen, 29,83 persen, dan 11,20 persen. (Sumber data; Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Kalimantan Barat, Arianto,S,Si.,S.E.,M.Si. Kabid Statistik Distribusi BPS Prov. Kalbar).

J. Industri dan Pertambangan

Provinsi Kalimantan Barat terus mengembangkan sector industry untuk menciptakan keseimbangan pembangunan antara bidang pertanian dan industri demi memenuhi kebutuhan pokok rakyat dan menciptakan kesejahteraan masyarakat. Ada tiga jenis kelompok industri yang menjadi tumpuan perkembangan industri di Kalimantan barat, yaitu perusahaan industri pengolahan besar, industry sedang, industry kecil dan mikro berupa industri makanan dan minuman, kayu atau bukan kayu, barang-barang anyaman dari rotan, bambu dan sejenisnya dan lain-lain.

Secara umum bahwa daratan Kalimantan Barat merupakan dataran rendah dan banyak sungai, sedikit berbukit, rawa, gambut dan hutan mangrove.

Untuk daratan sebagian besar terdiri dari jenis tanah Podsolik Merah Kuning, tanah Otgasol, Gley dan Humus, serta tanah aluvial.

Potensi sumber daya mineral di Kalimantan Barat cukup besar, hampir semua jenis galian terdapat di Kalimantan barat yang tersebar di seluruh kabupaten yang ada. Beberapa potensi jenis galian atau jenis tambang antara lain radio aktif terdapat di Kabupaten Melawi, Migas di Melawi dan Sintang, sedangkan Logam, Non Logam, Batubara, Batuan tersebar di seluruh kabupaten di Kalimantan Barat.

Jenis komoditas sumber daya mineral atau pertambangan yang menjadi unggulan dan sudah dikelola oleh perusahaan antara lain adalah logam seperti Bouksit di Kabupaten Sanggau dan Kabupaten Ketapang, Batubara di Sintang, dan jenis batuan yang diolah dan tersebar di seluruh kabupaten. Sedangkan untuk jenis Radioaktif yaitu Uranium telah dikelola oleh Badan usaha Milik Negara LAPAN di Kabupaten Sintang.

K. Pelabuhan

Pelabuhan laut Dwikora Pontinak merupakan pelabuhan yang teramai dan paling sibuk di antara pelabuhan lainnya di Kalimantan Barat. Hal ini ditunjukkan dengan banyaknya kegiatan bongkar muat barang setiap tahunnya untuk keperluan ekspor dan impor kebeberapa Negara tujuan, yaitu mencapai sebesar antara 70 persen dan 90 persen dari total bongkar muat di Kalimantan Barat.

Untuk Pelabuhan udara di Kalimantan Barat terdapat di Kabupaten Kubu Raya (sebelumnya Kabupaten Pontianak) yang sampai saat ini masih bernama Bandara Supadio. Bandara Udara Supadio saat ini sudah berstatus Bandar Udara Internasional. Selain Supadio, juga terdapat bandar udara perintis di Ketapang, Sintang, Melawi dan Kapuas Hulu.

BAB III
PERKEMBANGAN KEPENDUDUKAN

A. Kuantitas Penduduk

A.1. Jumlah dan Persebaran Penduduk

A.1.1. Jumlah dan Pertumbuhan Penduduk

Provinsi Kalimantan Barat sebagian besar merupakan wilayah daratan seluas 146.807 km² dengan jumlah penduduk sebanyak 5.422.814 jiwa, yang terdiri dari 2.791.477 jiwa (51,48 persen) laki-laki dan 2,631,337 jiwa (48,52 persen) perempuan. Jumlah penduduk terbesar terdapat di Kota Pontianak sebanyak 665.694 jiwa (12.28%), sedangkan penduduk terkecil terdapat di Kabupaten Kayong Utara sebanyak 125.974 jiwa (2,32%). Untuk jelasnya lihat Tabel 3.1 berikut ini:

Tabel 3.1
Jumlah Penduduk Laki-Laki dan Perempuan
Kabupaten/Kota di Kalimantan Barat

NO	KABUPATEN/KOTA	LAKI-LAKI	PEREMPUAN	JUMLAH	%
1	Kab. Sambas	325.898	309.481	635.379	11,72
2	Kab. Mempawah	156.359	148.436	304.795	5,62
3	Kab. Sanggau	252.514	233.615	486.129	8,96
4	Kab. Ketapang	302.406	279.188	581.594	10,72
5	Kab. Sintang	211.466	197.375	408.841	7,54
6	Kab. Kapuas Hulu	124.321	117.849	242.170	4,47
7	Kab. Bengkayang	149.196	137.925	287.121	5,29
8	Kab. Landak	209.018	190.403	399.421	7,37
9	Kab. Sekadau	110.028	102.174	212.202	3,91
10	Kab. Melawi	120.004	112.532	232.536	4,29
11	Kab. Kayong Utara	64.958	61.016	125.974	2,32
12	Kab. Kubu Raya	310.493	294.070	604.563	11,15
13	Kota Pontianak	334.083	331.611	665.694	12,28
14	Kota Singkawang	120.733	115.662	236.395	4,36
JUMLAH		2.791.477	2.631.337	5.422.814	100
%		51,48	48,52	100	

Sumber : Data SIAK Hasil Konsolidasi Berkala Kemendagri Semester II Tahun 2018
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Prov. Kalbar

Apabila dibandingkan dengan jumlah penduduk Kalimantan Barat Tahun 2017 sebesar 0.61 %, pertumbuhan penduduk Kalimantan Barat Tahun 2018 ada kenaikan yaitu 0,77 % sebagaimana ditampilkan pada Tabel 3.2. di bawah ini.

Tabel 3.2
Pertumbuhan Penduduk Provinsi Kalimantan Barat

Kabupaten /Kota	Jumlah Penduduk (jiwa)		Pertumbuhan Per Tahun (%)
	2017	2018	
Kab. Sambas	633.182	635.379	0,35
Kab. Mempawah	302.262	304.795	0,83
Kab. Sanggau	483.981	486.129	0,44
Kab. Ketapang	578.840	581.594	0,47
Kab. Sintang	405.211	408.841	0,89
Kab. Kapuas Hulu	238.797	242.170	1,40
Kab. Bengkayang	284.835	287.121	0,80
Kab. Landak	397.038	399.421	0,60
Kab. Sekadau	209.737	212.202	1,17
Kab. Melawi	229.755	232.536	1,20
Kab. Kayong Utara	123.506	125.974	1,98
Kab. Kubu Raya	602.306	604.563	0,37
Kota Pontianak	658.477	665.694	1,09
Kota Singkawang	233.501	236.395	1,23
Kalimantan Barat	5.381.428	5.422.814	0,77

Sumber : Data SIAK Hasil Konsolidasi Berkala Kemendagri Semester II Tahun 2018
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Prov. Kalbar

Dari tabel tersebut terlihat bahwa pertumbuhan penduduk di Kalimantan Barat, terbesar terdapat di Kabupaten Kayong Utara sebesar 1,98 persen dan yang terendah pertumbuhan penduduknya di Kabupaten Sambas sebesar 0,35 persen. Secara grafik pertumbuhan penduduk Kalimantan Barat disajikan pada grafik batang 3.1 di berikut ini.

Grafik 3.1

Pertumbuhan Penduduk Tahun 2017-2018

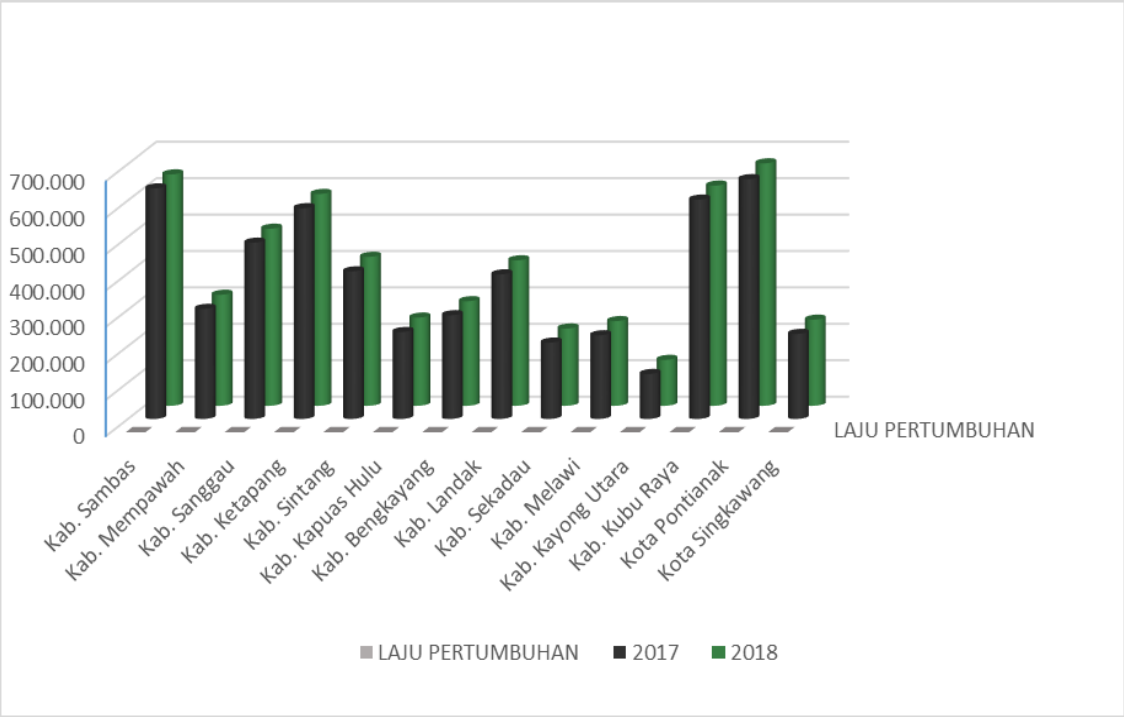

A.1.2 Persebaran dan Kepadatan Penduduk

Penduduk Kalimantan Barat tersebar di 14 kabupaten/kota, 174 Kecamatan dan 2.031 Desa dan 99 kelurahan, kondisi persebaran penduduk tersebut masih belum merata, ada yang padat ada pula yang jarang.

Tingkat kepadatan penduduk Kalimantan Barat rata-rata adalah 37 jiwa/Km². Kota Pontianak merupakan wilayah terpadat penduduknya yaitu 665,694 jiwa yang luas wilayah 118,44 Km² (5,621 jiwa/Km²), sedangkan jumlah penduduk yang relatif jarang/kecil adalah Kabupaten Kapuas Hulu dengan jumlah penduduk sebanyak 242,170 jiwa yang luas wilayah 31,327,69 Km² (8 jiwa/Km²). Tingkat kepadatan penduduk Kalimantan Barat tersaji dalam Tabel 3.3. di berikut ini.

Tabel 3.3
Persebaran Penduduk dan Kepadatan Penduduk Kabupaten/Kota di Kalimantan Barat

Kabupaten/Kota	Jumlah Penduduk (Jiwa)	Persentase (%)	Luas Wilayah (Km²)	Kepadatan (Jiwa/Km²)
Kab. Sambas	635.379	11,72	5.960,04	107
Kab. Mempawah	304.795	5,62	1.917,96	159
Kab. Sanggau	486.129	8,96	12.497,35	39
Kab. Ketapang	581.594	10,72	30.058,48	19
Kab. Sintang	408.841	7,54	21.924,17	19
Kab. Kapuas Hulu	242.170	4,47	31.327,69	8
Kab. Bengkayang	287.121	5,29	5.487,03	52
Kab. Landak	399.421	7,37	8.350,22	48
Kab. Sekadau	212.202	3,91	6.263,10	34
Kab. Melawi	232.536	4,29	10.122,36	23
Kab. Kayong Utara	125.974	2,32	4.104,83	31
Kab. Kubu Raya	604.563	11,15	8.593,81	70
Kota Pontianak	665.694	12,28	118,44	5.621
Kota Singkawang	236.395	4,36	549,77	430
KALBAR	**5.422.814**	**100**	**147.275,26**	**37**

Sumber : Data Siak Hasil Konsolidasi Berkala Kemendagri Semester II Tahun 2018
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Prov. Kalbar
**Biro Pemerintahan Setda Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2018, diolah*

A.2. Penduduk Menurut Karakteristrik Demografi

A.2.1. Jumlah dan Proporsi Penduduk Berdasarkan Umur dan Jenis Kelamin

Pengelompokan penduduk menurut umur di Provinsi Kalimantan Barat dapat dilihat tabel 3.4. berikut ini.

Tabel 3.4
Penduduk Berdasarkan Kelompok Umur dan Jenis Kelamin

Gol Umur	Lk (jiwa)	Pr (jiwa)	Lk + Pr	Persen (%)
00-04 Tahun	195.664	181.192	376.856	6,95
05-09 Tahun	256.993	240.665	497.658	9,18
10-14 Tahun	255.653	241.230	496.883	9,16
15-19 Tahun	268.476	255.303	523.779	9,66
20-24 Tahun	241.799	228.462	470.261	8,67
25-29 Tahun	236.909	227.872	464.781	8,57
30-34 Tahun	244.638	232.206	476.844	8,79
35-39 Tahun	245.449	227.578	473.027	8,72
40-44 Tahun	203.678	189.754	393.432	7,26
45-49 Tahun	175.754	159.570	335.324	6,18
50-54 Tahun	136.891	128.807	265.698	4,90
55-59 Tahun	112.089	107.172	219.261	4,04
60-64 Tahun	83.524	78.998	162.522	3,00
65-69 Tahun	56.649	53.345	109.994	2,03
70-74 Tahun	35.906	36.212	72.118	1,33
>=75 Tahun	41.405	42.971	84.376	1,56
JUMLAH	2.791.477	2.631.337	5.422.814	100%

Sumber : Data SIAK Hasil Konsolidasi Berkala Kemendagri Semester II Tahun 2018
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Prov. Kalbar

Dari tabel di atas kelompok usia muda (usia 0 s.d. 14 tahun) sebesar 25,29 persen, usia produktif (usia 15 s.d.59 tahun) sebesar 66,80 persen, sedangkan yang tergolong usia lanjut (usia 60 tahun ke atas) adalah 7,91 persen. Piramida pengelompokan usia sebagai berikut :

Grafik 3.2
Piramida Penduduk Berdasarkan Kelompok Umur dan Jenis Kelamin

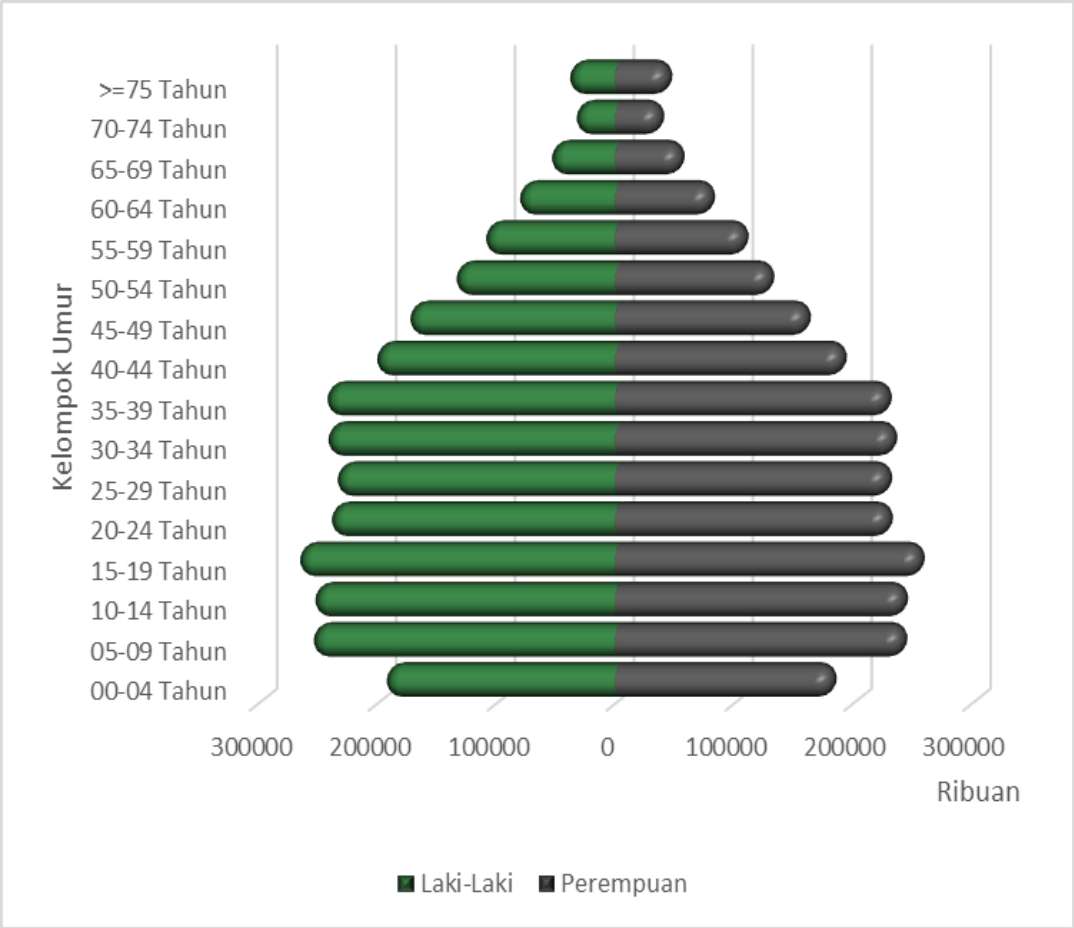

Sumber: Data SIAK Hasil Konsolidasi Berkala Kemendagri Semester II Tahun 2018 Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Prov. Kalbar

Berdasarkan komposisi usia dan jenis kelamin karakteristik penduduk dari suatu negara, piramida penduduk dapat dibedakan atas tiga model yaitu ekspansif, stationer dan constructive. Model piramida yang ditampilkan di atas adalah **model *ekspansif*** yaitu kelompok usia muda yang terdapat dalam suatu wilayah lebih banyak dari pada kelompok usia tua.

A.2.2. Umur Median (*Median Age*)

Umur median adalah umur yang membagi penduduk menjadi dua bagian dengan jumlah yang sama, yaitu bagian yang pertama lebih muda dan bagian yang kedua lebih tua dari umur median. Kegunaan dari umur median adalah untuk mengukur tingkat pemusatan penduduk pada kelompok-kelompok umur tertentu. Berdasarkan umur median ini, penduduk di suatu daerah dapat dikategorikan sebagai penduduk muda, penduduk intermediate dan penduduk tua.

Bagaimana kondisi penduduk di Kalimantan Barat, dapat dilihat pada perhitungan penduduk di bawah ini.

- Penduduk *muda* , yaitu umur median kurang dari 20 tahun.
- Penduduk *intermediate*, jika umur median antara 20 tahun sampai 30 tahun (20 tahun < median < 30 tahun).
- Penduduk *tua*, jika umur median berada pada posisi > 30 tahun.

Untuk menentukan umur median, dapat dihitung dengan menggunakan tabel jumlah penduduk menurut kelompok umur lima tahunan dan jumlah kumulatifnya.

Tabel 3.5
Jumlah Penduduk Menurut Kelompok Umur Lima Tahunan dan Jumlah Kumulatifnya

KELOMPOK UMUR	JUMLAH PENDUDUK	Kumulatif	% Kumulatif
00-04 Tahun	376.856	376.856	6,95
05-09 Tahun	497.658	874.514	16,13
10-14 Tahun	496.883	1.371.397	25,29
15-19 Tahun	523.779	1.895.176	34,95
20-24 Tahun	470.261	2.365.437	43,62
25-29 Tahun	464.781	2.830.218	52,19
30-34 Tahun	476.844	3.307.062	60,98
35-39 Tahun	473.027	3.780.089	69,71
40-44 Tahun	393.432	4.173.521	76,96
45-49 Tahun	335.324	4.508.845	83,15
50-54 Tahun	265.698	4.774.543	88,05
55-59 Tahun	219.261	4.993.804	92,09
60-64 Tahun	162.522	5.156.326	95,09
65-69 Tahun	109.994	5.266.320	97,11
70-74 Tahun	72.118	5.338.438	98,44
>=75 Tahun	84.376	5.422.814	100
JUMLAH	5.422.814		

Sumber : Data SIAK Hasil Konsolidasi Berkala Kemendagri Semester II Tahun 2018 Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Prov. Kalbar

Dengan demikian, umur median penduduk Kalimantan Barat pada tahun 2018 adalah 29 tahun, artinya setengah dari penduduk Kalimantan Barat pada tahun 2018 berusia di bawah 29 tahun dan setengahnya lagi berusia lebih tua dari 29 tahun. Umur Median ini terletak diantara 20 dan 30 tahun, berarti penduduk Kalimantan Barat dapat dikategorikan sebagai penduduk *intermediate,* yaitu transisi dari penduduk muda (*young population*) ke penduduk tua (*old population*).

A.2.3 Penduduk Lansia

Menurut Undang-Undang Nomor 13 tahun 1998 tentang Kesejahteraan Lanjut Usia, yang dimaksud dengan lanjut usia adalah seseorang yang telah mencapai usia 60 tahun ke atas. Namun Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) menggolongkan lanjut usia menjadi 4 (empat) kategori, yaitu usia pertengahan (middle age) 45–59 tahun, lanjut usia (eiderly) 60–70 tahun, lanjut usia tua (old) 75–90 tahun, dan usia sangat tua (very old) di atas 90 tahun.

Oleh karena itu terjadi perbedaan mengenai batasan usia seseorang untuk dikatakan lanjut usia, bahwa batasan usia bagi lanjut usia di setiap negara juga berbeda-beda, hal ini tergantung pada tingkat kesejahteraan sebuah negara, semakin tinggi tingkat kesejahteraan suatu negara maka semakin meningkat pula usia harapan hidup manusia. Dengan meningkatnya usia harapan hidup seseorang, maka Pemerintah dituntut untuk memberikan perhatian yang lebih besar terhadap hak-hak lanjut usia khususnya dalam rangka memelihara kesejahteraan sosial lanjut usia.

A.2.4 Sex Ratio dan Dependency Ratio

Sex Ratio (Rasio Jenis Kelamin) adalah perbandingan jumlah penduduk laki-laki dengan perempuan. RJK dinyatakan dalam banyaknya penduduk laki-laki per 100 penduduk perempuan. Data mengenai rasio jenis kelamin berguna untuk pengembangan perencanaan pembangunan yang berwawasan gender, terutama yang berkaitan dengan perimbangan pembangunan laki-laki dan perempuan secara adil, juga untuk merancang pengembangan pendidikan berwawasan gender. Informasi tentang rasio jenis kelamin juga dianggap penting untuk diketahui oleh para politisi, terutama untuk mengetahui keterwakilan perempuan dalam parlemen.

Sex ratio menurut kelompok umur antara laki-laki dan perempuan pada tingkatan struktur umur tergambar pada tabel 3.6 berikut ini.

Tabel 3.6
Sex Rasio Jenis Kelamin Berdasarkan Kelompok Umur Di Provinsi Kalimantan Barat

Kelompok umur	Laki - laki	Perempuan	Sex Ratio
0 – 4 tahun	195.664	181.192	108
5 – 9 tahun	256.993	240.665	107
10 - 14 tahun	255.653	241.230	106
15 - 19 tahun	268.476	255.303	105
20 - 24 tahun	241.799	228.462	106
25 - 29 tahun	236.909	227.872	104
30 - 34 tahun	244.638	232.206	105
35 - 39 tahun	245.449	227.578	108
40 - 44 tahun	203.678	189.754	107
45 - 49 tahun	175.754	159.570	110
50 - 54 tahun	136.891	128.807	106
55 - 59 tahun	112.089	107.172	105
60 - 64 tahun	83.524	78.998	106
65 - 69 tahun	56.649	53.345	106
70 - 74 tahun	35.906	36.212	99
> 75 tahun	41.405	42.971	96
KALBAR	2.791.477	2.631.337	106

Sumber : Data SIAK Hasil Konsolidasi Berkala Kemendagri Semester II Tahun 2018 Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Prov. Kalbar

Dari tabel di atas dapat diketahui bahwa sex ratio penduduk Kalimantan Barat pada tahun 2018 sebesar 106 persen, artinya dari 100 penduduk perempuan terdapat 106 orang penduduk laki-laki. Struktur umur di atas 60 – 64 tahun sex rationya semakin kecil, ini menunjukkan bahwa laki-laki pada umur di atas 65 tahun resiko kematiannya lebih tinggi dibanding perempuan, sehingga struktur umur 70 tahun keatas akan lebih banyak perempuan dari pada laki-laki.

Rasio jenis kelamin di suatu daerah dipengaruhi oleh jenis kelamin waktu lahir, pola mortalitas antara penduduk laki-laki dan perempuan, pola migrasi antara penduduk laki-laki dan perempuan. Data *sex ratio* atau ratio jenis kelamin (RJK) penduduk Kalimantan Barat pada tahun 2018 dapat dilihat pada tabel 3.7 di bawah ini.

Tabel 3.7
Sex Rasio Jenis Kelamin
Per Kabupaten/Kota Di Provinsi Kalimantan Barat

NO	KABUPATEN / KOTA	LAKI-LAKI	PEREMPUAN	SEX RATIO
1	Kab. Sambas	325.898	309.481	105
2	Kab. Mempawah	156.359	148.436	105
3	Kab. Sanggau	252.514	233.615	108
4	Kab. Ketapang	302.406	279.188	108
5	Kab. Sintang	211.466	197.375	107
6	Kab. Kapuas Hulu	124.321	117.849	105
7	Kab. Bengkayang	149.196	137.925	108
8	Kab. Landak	209.018	190.403	110
9	Kab. Sekadau	110.028	102.174	108
10	Kab. Melawi	120.004	112.532	107
11	Kab. Kayong Utara	64.958	61.016	106
12	Kab. Kubu Raya	310.493	294.070	106
13	Kota Pontianak	334.083	331.611	101
14	Kota Singkawang	120.733	115.662	104
KALBAR		2.791.477	2.631.337	106

Sumber : Data SIAK Hasil Konsolidasi Berkala Kemendagri Semester II Tahun 2018
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Prov. Kalbar

Sex ratio atau ratio jenis kelamin pada grafik 3.3 menunjukkan ratio jenis kelamin tertinggi terjadi di Kabupaten Landak, yaitu 110, sedangkan rasio jenis kelamin terkecil adalah Kota Pontianak 101. Rasio jenis kelamin disajikan dalam grafik batang berikut.

Grafik 3.3
Sex Ratio Penduduk Kalimantan Barat

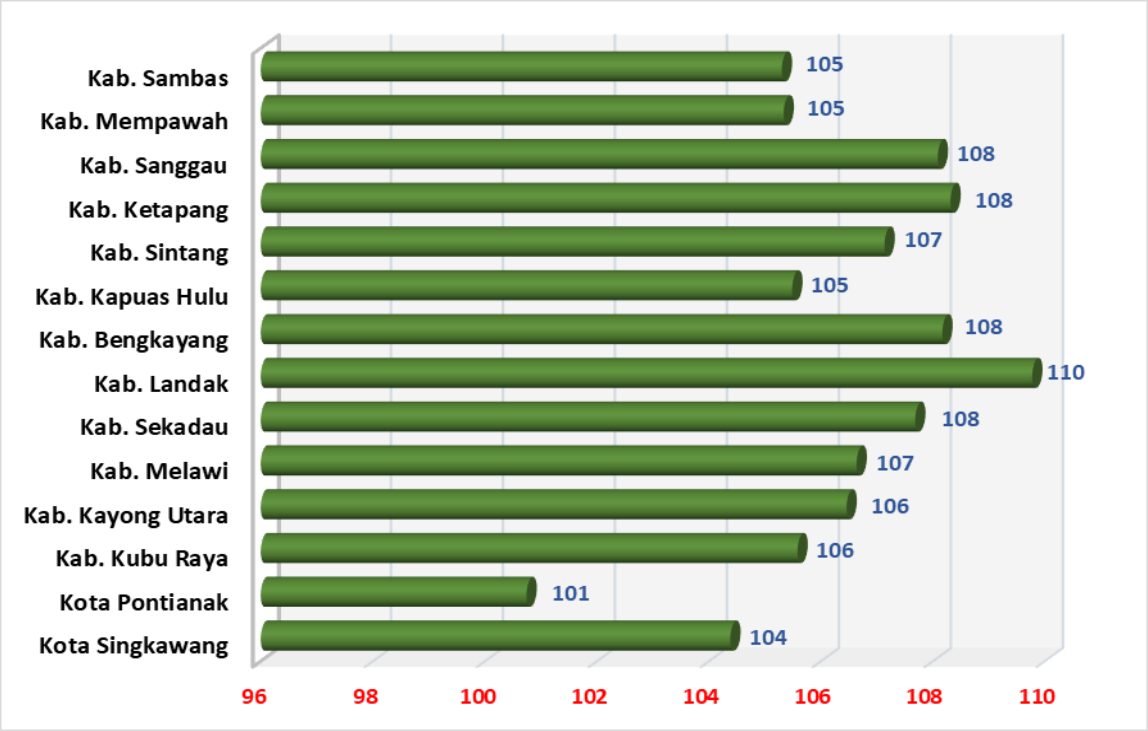

Sumber : Data SIAK Hasil Konsolidasi Berkala Kemendagri Semester II Tahun 2018
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Prov. Kalbar

Rasio Ketergantungan *(Dependency Ratio)* adalah angka yang menyatakan perbandingan antara banyaknya penduduk usia non produktif dengan banyaknya penduduk usia produktif, penduduk muda berusia di bawah 15 tahun umumnya dianggap sebagai penduduk yang belum produktif karena secara ekonomis masih tergantung pada orang tua atau orang lain yang menanggungnya. Selain itu, penduduk berusia di atas 64 tahun juga dianggap tidak produktif lagi sesudah melewati masa pensiun, walaupun kenyataannya ada yang masih produktif pada usia tersebut. Penduduk usia 15 – 64 tahun, adalah penduduk usia kerja yang dianggap usia produktif. Atas dasar konsep ini dapat digambarkan berapa besar jumlah penduduk yang tergantung pada penduduk usia kerja, rasio ketergantungan semacam ini memberikan gambaran ekonomis penduduk dari sisi demografi.

Rasio ketergantungan dapat dilihat menurut usia yakni Rasio Ketergantungan Muda dan Rasio Ketergantungan Tua.

⇨ <u>Rasio Ketergantungan Muda</u> adalah perbandingan jumlah penduduk umur 0-14 tahun dengan jumlah penduduk umur 15 – 64 tahun.

⇨ Rasio Ketergantungan Tua adalah perbandingan jumlah penduduk umur 65 tahun ke atas dengan jumlah penduduk di usia 15 – 64 tahun.

Rasio ketergantungan dapat digunakan sebagai indikator yang secara kasar dapat menunjukkan keadaan ekonomi suatu negara apakah tergolong negara maju atau negara yang sedang berkembang. *Dependency ratio* merupakan salah satu indikator demografi yang penting. Semakin tinggi persentase *dependency ratio* menunjukkan semakin tingginya beban yang harus ditanggung penduduk yang produktif untuk membiayai hidup penduduk yang belum produktif dan tidak produktif lagi.Sedangkan persentase *dependency ratio* yang semakin rendah menunjukkan semakin rendahnya beban yang ditanggung penduduk yang produktif untuk membiayai penduduk yang belum produktif dan tidak produktif lagi.

Tabel 3.8
Persentase Penduduk Berdasarkan Usia Muda, Produktif dan Usia Tua

Kelompok Umur	Laki-Laki	Perempuan	Σ Penduduk	%
0 - 14 Tahun (Muda)	708.310	663.087	1.371.397	25,29
15 - 64 Tahun (Produktif)	1.949.207	1.835.722	3.784.929	69,80
>65 Tahun (Tua)	133.960	132.528	266.488	4,91
Prov. Kalbar	2.791.477	2.631.337	5.422.814	100

Sumber : Data SIAK Hasil Konsolidasi Berkala Kemendagri Semester II Tahun 2018 Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Prov. Kalbar

Tabel 3.8 menunjukkan proporsi persentase penduduk berdasarkan usia muda, produktif dan usia tua. Dimana persentase kelompok umur 0-14 tahun sebesar 25,29 persen, kelompok umur 15-64 tahun sebesar 69,80 persen dan kelompok umur di atas 65 tahun sebesar 4,91 persen. Untuk mengetahui Rasio Ketergantungan atau Rasio Beban tanggungan adalah :

$$RK = \frac{1.371.397 + 266.488}{3.784.929} \times 100 = 43,27$$

Rasio ketergantungan total sebesar 43,27 persen artinya setiap 100 orang penduduk usia produktif mempunyai beban tanggungan sebanyak 44 orang yang belum produktif dan dianggap tidak produktif lagi.

Grafik 3.4
Penduduk Berdasarkan Usia Muda, Produktif dan Usia Tua

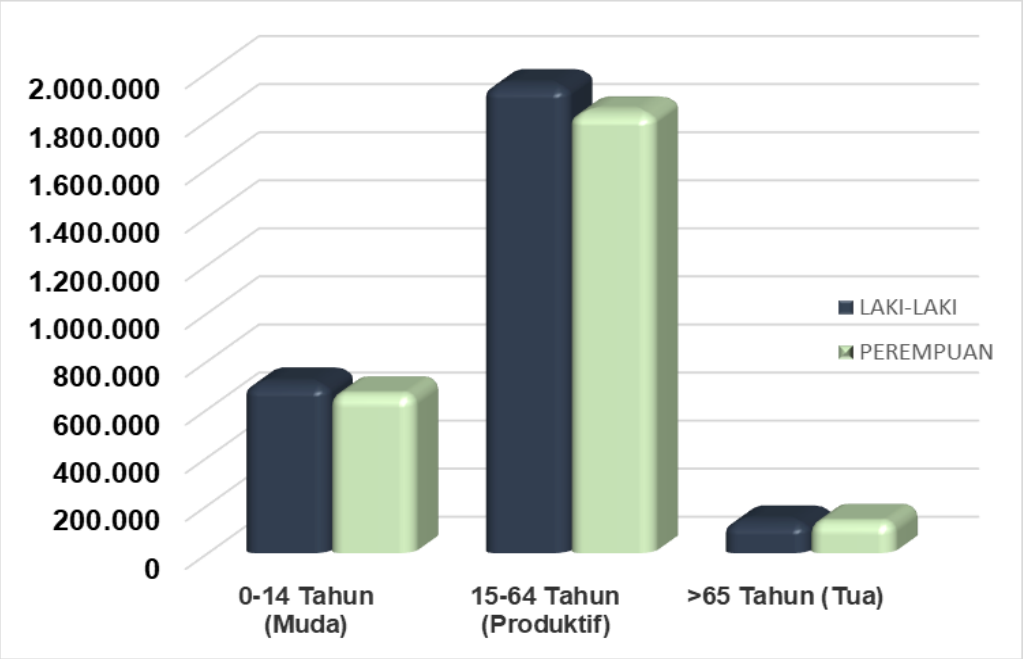

Sumber: Data SIAK Hasil Konsolidasi Berkala Kemendagri Semester II Tahun 2018 Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Prov. Kalbar

A.2.5 . Lahir – Mati (Fertilitas – Mortalitas)

a. Fertilitas

Fertilitas atau kelahiran merupakan salah satu faktor yang menambah jumlah penduduk di samping migrasi masuk. Kelahiran bayi membawa konsekuensi pemenuhan kebutuhan tumbuh kembang bayi tersebut, termasuk pemenuhan gizi dan kecukupan kalori, perawatan kesehatan. Pada gilirannya, bayi ini akan tumbuh menjadi anak usia sekolah yang menuntut pendidikan, lalu masuk angkatan kerja dan menuntut pekerjaan. Bayi perempuan akan tumbuh menjadi remaja perempuan dan perempuan usia subur yang akan menikah dan melahirkan bayi.

Tingkat kelahiran di masa lalu mempengaruhi tingginya fertilitas masa kini. Jumlah kelahiran yang besar di masa lalu disertai dengan penurunan kematian bayi menyebabkan jumlah penduduk bertambah banyak. Bayi-bayi perempuan yang dilahirkan 15 tahun kemudian akan membentuk kelompok perempuan usia subur.

b. Mortalitas (Kematian)

Mortalitas atau kematian dapat menimpa siapa saja, tua, muda, kapan dan dimana saja. Kasus kematian terutama dalam jumlah banyak berkaitan

dengan masalah sosial, ekonomi, adat istiadat maupun masalah kesehatan lingkungan. Indikator kematian berguna untuk memonitor kinerja Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Daerah dalam peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Kelahiran dan Kematian merupakan dua variabel kependudukan yang dapat mempengaruhi perubahan jumlah penduduk. Selisih positif antara kelahiran dan kematian akan menambah jumlah penduduk. Sebaliknya, selisih negatif antara kelahiran dan kematian akan mengurangi jumlah penduduk.

A.2.6 Pendidikan

Kualitas penduduk (sumber daya manusia) umumnya diukur dari tingkat pendidikan formal dan tingkat kesehatan fisik penduduk. Berdasarkan data yang ditampilkan pada tabel 3.9, menunjukkan tingkat pendidikan penduduk Kalimantan Barat pada tahun 2018 masih tergolong rendah. Hal ini tergambar dari jumlah penduduk yang berpendidikan menamatkan SD sebanyak 27,49 persen, penduduk yang menamatkan pendidikan SLTP sederajat sebanyak 12,97 persen, tamat SLTA sederajat sebanyak 14,17 persen, tamat diploma/akademi sebanyak 1,47 persen, tamat Strata Satu hingga Strata Tiga jumlahnya baru mencapai 2,57 persen.

Keterangan lebih rinci tentang pendidikan terakhir penduduk yang ditamatkan di masing-masing Kabupaten/Kota di Provinsi Kalimantan Barat adalah sebagai berikut :

a. Tidak/belum sekolah masih banyak terdapat di Kabupaten Kayong Utara (35,13 %) dan yang kecil jumlahnya berada di Sanggau (22,79%).
b. Tidak tamat SD/sederajat masih banyak terdapat di Kabupaten Sanggau (18,98%) dan lebih sedikit berada di Kota Pontianak (9,73%).
c. Tamat SD/sederajat masih banyak terdapat di Kabupaten Sambas (37,93%) dan terkecil terdapat di Kota Pontianak (16,05%).
d. Tamat SLTP/sederajat masih banyak terdapat di Kabupaten Landak (14,21%) dan terkecil berada di Kabupaten Kayong Utara (10,26%).
e. Tamat SLTA/sederajat masih banyak terdapat di Kota Pontianak (25,96%) dan terkecil berada di Kabupaten Kayong Utara (8,35%).
f. Diploma I hingga Strata III masih banyak terdapat di Kota Pontianak (9,79%) dan terkecil berada di Kabupaten Sambas (2,26 %).

Data lebih rinci tentang jenjang pendidikan yang dapat ditamatkan oleh penduduk di Provinsi Kalimantan Barat, mulai pendidikan dasar hingga menamatkan pendidikan S-3 di kabupaten/kota pada tabel berikut ini.

Tabel 3.9
Jumlah Penduduk Menurut Pendidikan Terakhir

KABUPATEN / KOTA	Tidak/ Belum Sekolah	Belum Tamat SD/ Sederajat	Tamat SD/ Sederajat	SLTP/ Sederajat	SLTA/ Sederajat	Diploma I/II	Akademi / Diploma III/ S. Muda	Diploma IV/ Strata I	Strata II	Strata III	Jumlah
Kab. Sambas	159.425	73.723	241.002	82.418	64.430	2.186	3.214	8.610	363	8	635.379
Kab. Mempawah	92.176	50.049	77.967	38.543	37.357	1.334	1.840	5.259	266	4	304.795
Kab. Sanggau	110.768	92.268	134.592	64.918	67.403	2.059	4.019	9.765	307	30	486.129
Kab. Ketapang	139.482	88.313	188.014	75.990	71.206	2.302	4.918	10.832	518	19	581.594
Kab. Sintang	130.290	76.280	95.305	47.092	44.975	2.328	3.181	8.774	610	6	408.841
Kab. Kapuas Hulu	56.379	38.838	66.725	33.413	35.324	1.875	2.798	6.618	196	4	242.170
Kab. Bengkayang	67.028	51.704	81.905	37.100	39.596	821	2.699	6.043	217	8	287.121
Kab. Landak	115.014	60.925	103.599	56.748	51.488	1.989	2.902	6.542	209	5	399.421
Kab. Sekadau	54.279	35.614	66.070	25.975	24.417	867	1.533	3.341	106	0	212.202
Kab. Melawi	67.011	33.909	69.356	28.546	25.943	1.231	1.715	4.631	192	2	232.536
Kab. Kayong Utara	44.250	20.668	34.048	12.919	10.513	595	772	2.146	63	0	125.974
Kab. Kubu Raya	169.544	87.186	165.819	77.670	84.132	2.742	5.121	11.577	719	53	604.563
Kota Pontianak	163.130	64.762	106.859	92.910	172.801	5.019	16.391	39.776	3.755	291	665.694
Kota Singkawang	59.586	38.916	59.310	29.280	38.600	849	2.598	6.890	359	7	236.395
JUMLAH	1.428.362	813.155	1.490.571	703.522	768.185	26.197	53.701	130.804	7.880	437	5.422.814

Sumber : Data SIAK Hasil Konsolidasi Berkala Kemendagri Semester II Tahun 2018
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Prov. Kalbar

Tabel 3.10
Persentase Penduduk Menurut Pendidikan Terakhir

KABUPATEN / KOTA	Pendidikan Terakhir (Jiwa)									
	Tidak/ Belum Sekolah (%)	Belum Tamat SD/ Sederajat (%)	Tamat SD/ Sederajat (%)	SLTP/ Sederajat (%)	SLTA/ Sederajat (%)	Diploma I/II (%)	Akademi/ Diploma III/ S. Muda (%)	Diploma IV/ Strata I (%)	Strata II (%)	Strata III (%)
Kab. Sambas	25,09	11,60	37,93	12,97	10,14	0,34	0,51	1,36	0,06	0,00
Kab. Mempawah	30,24	16,42	25,58	12,65	12,26	0,44	0,60	1,73	0,09	0,00
Kab. Sanggau	22,79	18,98	27,69	13,35	13,87	0,42	0,83	2,01	0,06	0,01
Kab. Ketapang	23,98	15,18	32,33	13,07	12,24	0,40	0,85	1,86	0,09	0,00
Kab. Sintang	31,87	18,66	23,31	11,52	11,00	0,57	0,78	2,15	0,15	0,00
Kab. Kapuas Hulu	23,28	16,04	27,55	13,80	14,59	0,77	1,16	2,73	0,08	0,00
Kab. Bengkayang	23,34	18,01	28,53	12,92	13,79	0,29	0,94	2,10	0,08	0,00
Kab. Landak	28,80	15,25	25,94	14,21	12,89	0,50	0,73	1,64	0,05	0,00
Kab. Sekadau	25,58	16,78	31,14	12,24	11,51	0,41	0,72	1,57	0,05	0,00
Kab. Melawi	28,82	14,58	29,83	12,28	11,16	0,53	0,74	1,99	0,08	0,00
Kab. Kayong Utara	35,13	16,41	27,03	10,26	8,35	0,47	0,61	1,70	0,05	0,00
Kab. Kubu Raya	28,04	14,42	27,43	12,85	13,92	0,45	0,85	1,91	0,12	0,01
Kota Pontianak	24,51	9,73	16,05	13,96	25,96	0,75	2,46	5,98	0,56	0,04
Kota Singkawang	25,21	16,46	25,09	12,39	16,33	0,36	1,10	2,91	0,15	0,00
JUMLAH	26,34	15,00	27,49	12,97	14,17	0,48	0,99	2,41	0,15	0,01

Sumber : Data SIAK Hasil Konsolidasi Berkala Kemendagri Semester II Tahun 2018
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Prov. Kalbar

A.2.7 Status Pekerjaan

Berdasarkan status pekerjaan, penduduk Kalimantan Barat dikelompokkan menjadi 2 (dua), kelompok penduduk tidak/belum bekerja (T/BB) dan kelompok penduduk bekerja. Menurut konsep ketenagakerjaan, orang-orang yang disebut pengangguran terbuka adalah penduduk usia kerja (15 tahun ke atas) yang belum bekerja dan sedang mencari pekerjaan.

Menurut data yang diperoleh dari SIAK, penduduk Kalimantan Barat yang sudah memiliki pekerjaan sebesar 2.030.600 orang, sedangkan penduduk yang tidak/belum bekerja sebesar 1.508.975 orang, sisanya sebesar 1.883.239 orang adalah sebagai pelajar, mahasiswa dan mengurus rumah tangga. Penduduk yang bekerja terbagi dalam 89 jenis pekerjaan, termasuk Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Walikota dan Wakil Walikota, dan anggota legislatif (DPRD), yang dirinci dalam delapan kategori, seperti pada tabel berikut ini.

Tabel 3.11
Jumlah Penduduk Menurut Jenis Pekerjaan Penduduk di Prov. Kalbar Tahun 2018

KABUPATEN /KOTA	PEKERJAAN							
	Belum /Tidak Bekerja	Mengurus Rumah Tangga	Pelajar /Mahasiswa	Pensiunan	PNS	TNI	POLRI	Lainnya
Kab. Sambas	170.118	52.179	99.382	1.050	7.718	460	629	303.843
Kab. Mempawah	95.146	67.320	48.474	1.352	4.993	1.221	575	85.714
Kab. Sanggau	110.706	85.277	91.833	5.404	5.895	627	806	185.581
Kab. Ketapang	157.813	133.653	91.721	1.441	7.388	421	738	188.419
Kab. Sintang	122.322	76.435	55.285	1.208	6.175	703	632	146.081
Kab. Kapuas Hulu	49.022	40.188	46.680	817	4.378	574	465	100.046
Kab. Bengkayang	68.257	48.808	63.146	490	4.344	356	454	101.266
Kab. Landak	124.721	66.225	67.396	585	4.998	612	416	134.468
Kab. Sekadau	58.230	28.183	33.045	347	2.974	54	196	89.173
Kab. Melawi	69.399	45.597	30.960	332	3.349	158	243	82.498
Kab. Kayong Utara	35.959	28.768	20.157	254	1.573	24	91	39.148
Kab. Kubu Raya	189.000	130.920	94.977	1.410	6.866	2.263	1.563	177.564
Kota Pontianak	197.146	135.644	110.302	5.024	21.309	1.569	3.023	191.677
Kota Singkawang	61.136	44.968	45.716	1.835	6.114	1.283	824	74.519
Kalimantan Barat	1.508.975	984.165	899.074	21.549	88.074	10.325	10.655	1.899.997

Sumber : Data SIAK Hasil Konsolidasi Berkala Kemendagri Semester II Tahun 2018
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Prov. Kalbar

A.2.8 Agama

Penduduk Kalimantan Barat yang beragama Islam sebanyak 59,72 persen; Kristen 11,50 persen; Khatolik 22,26 persen; Hindu 0,06 persen; Budha 6,18 persen, dan Konghucu sebanyak 0,24 persen dan yang menganut aliran Kepercayaan adalah sebanyak 0,05 persen dari total penduduk, sebagaimana pada tabel 3.12 berikut ini.

Tabel 3.12
Jumlah Penduduk Menurut Agama Kabupaten/Kota di Kalimantan Barat

Kabupaten/ Kota	Islam	Kristen	Katholik	Hindu	Budha	Kong huchu	Kepercayaan	Jumlah
Kab. Sambas	555.452	11.745	18.246	214	46.579	3.129	14	635.379
Kab. Mempawah	225.903	19.187	23.208	82	34.686	1.200	529	304.795
Kab. Sanggau	164.664	80.535	236.245	156	3.807	107	615	486.129
Kab. Ketapang	373.792	45.881	152.408	567	7.213	853	880	581.594
Kab. Sintang	157.373	97.360	151.372	120	2.195	420	1	408.841
Kab. Kapuas Hulu	146.912	20.050	74.577	29	291	309	2	242.170
Kab. Bengkayang	101.512	76.364	88.501	292	17.508	2.644	300	287.121
Kab. Landak	63.964	118.104	214.826	38	2.337	146	6	399.421
Kab. Sekadau	81.972	29.215	99.191	11	1.499	240	74	212.202
Kab. Melawi	121.863	54.090	55.074	36	1.249	223	1	232.536
Kab. Kayong Utara	120.483	1.601	896	508	2.053	432	1	125.974
Kab. Kubu Raya	498.897	23.799	34.686	575	45.714	828	64	604.563
Kota Pontianak	502.553	32.940	40.134	360	88.023	1.679	5	665.694
Kota Singkawang	123.329	12.585	17.714	58	81.723	960	26	236.395
JUMLAH	3.238.669	623.456	1.207.078	3.046	334.877	13.170	2.518	5.422.814
PERSEN	59,72	11,50	22,26	0,06	6,18	0,24	0,05	100

Sumber : Data SIAK Hasil Konsolidasi Berkala Kemendagri Semester II Tahun 2018 Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Prov. Kalbar

Berdasarkan tabel 3.12 di atas, penduduk yang beragama Islam lebih banyak di Kabupaten Sambas, Kota Pontianak dan Kabupaten Kubu Raya, sedangkan penduduk yang memeluk agama Kristen dan Khatolik banyak terdapat di Kabupaten Landak, Kabupaten Sanggau dan Kabupaten Sintang. Untuk penduduk yang beragama Hindu hanya sebesar 0,06 persen atau sekitar 3.046 jiwa, tersebar di Kabupaten Ketapang, Kabupaten Kubu Raya dan Kabupaten Kayong Utara, dan penduduk yang beragama Budha banyak terdapat di Kota Pontianak, Kota Singkawang dan Kabupaten Sambas, penduduk agama Konghucu terdapat di Kabupaten Sambas, Kabupaten Bengkayang dan Kota Pontianak, Kabupaten Mempawah, serta penduduk dengan aliran kepercayaan banyak terdapat di Kabupaten Sanggau dan Kabupaten Ketapang.

A.2.9. Golongan Darah

Golongan darah penduduk Kalimantan Barat dapat dilihat pada tabel 3.13. Pentingnya mengetahui golongan darah seseorang adalah dalam rangka

membantu seseorang yang memerlukan bantuan darah yang dimilikinya, agar apabila terjadi kecelakaan atau sakit yang segera membutuhkan darah. Jenis golongan darah diketahui melalui pendaftaran penduduk yang tercatat sebanyak 5,15 persen (279.402 Jiwa), sedangkan yang belum diketahui golongan darahnya sebanyak 94,89 persen.

Tabel 3.13
Penduduk Berdasarkan Golongan Darah

KABUPATEN/ KOTA	GOLONGAN DARAH													JUMLAH
	A	B	AB	O	A+	A-	B+	B-	AB+	AB-	O+	O-	TIDAK TAHU	
Kab. Sambas	577	733	266	827	28	11	31	15	30	27	76	388	632.370	635.379
Kab. Mempawah	21.535	3.655	1.465	6.269	50	22	50	15	39	31	74	206	271.384	304.795
Kab. Sanggau	1.795	2.011	771	3.027	81	24	71	28	38	26	42	127	478.088	486.129
Kab. Ketapang	5.097	4.555	2.235	7.128	297	29	254	23	196	79	286	351	561.064	581.594
Kab. Sintang	6.328	6.593	2.665	9.580	1.864	22	121	32	132	148	268	496	380.592	408.841
Kab. Kapuas Hulu	6.720	6.158	2.402	7.560	509	8	534	24	205	21	463	225	217.341	242.170
Kab. Bengkayang	1.278	1.307	737	1.751	250	5	71	5	30	7	60	123	281.497	287.121
Kab. Landak	968	1.079	6.090	1.469	157	20	129	157	274	344	468	1.007	387.259	399.421
Kab. Sekadau	705	735	323	1.257	79	2	64	13	39	17	93	135	208.740	212.202
Kab. Melawi	4.157	3.903	1.750	6.465	549	46	525	73	326	163	851	631	213.097	232.536
Kab. Kayong Utara	732	589	321	1.014	49	3	28	14	33	16	81	69	123.025	125.974
Kab. Kubu Raya	6.729	6.649	2.480	11.341	153	26	167	27	121	88	242	554	575.986	604.563
Kota Pontianak	18.116	20.399	6.629	33.763	340	57	266	41	263	138	473	576	584.633	665.694
Kota Singkawang	1.809	2.189	735	2.958	27	0	18	7	18	36	79	183	228.336	236.395
JUMLAH	76.546	60.555	28.869	94.409	4.433	275	2.329	474	1.744	1.141	3.556	5.071	5.143.412	5.422.814
%	1,41	1,12	0,53	1,74	0,08	0,01	0,04	0,01	0,03	0,02	0,07	0,09	94,85	100

Sumber : Data SIAK Hasil Konsolidasi Berkala Kemendagri Semester II Tahun 2018
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Prov. Kalbar

A.3. Dokumen Kependudukan

Tertib dokumen kependudukan dan tertib administrasi kependudukan adalah kewajiban setiap penduduk Indonesia. Dokumen kependudukan mempunyai kekuatan hukum yang mengikat secara perdata bagi pemiliknya, sedangkan bagi Pemerintah tertib dokumen kependudukan akan memudahkan untuk memberikan pelayanan publik, mempermudah memprogramkan kegiatan pembangunan, memberikan hak pilih pada saat pemilu presiden dan wakil

presiden, pemilu legislatif, pimilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah dan lain-lain.

Maka dari itu, setiap penduduk Indonesia wajib untuk memperbaharui data kependudukannya pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil. Setiap kali terjadi perubahan elemen data penduduk, maka penduduk wajib melaporkannya pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil setempat.

A.3.1 Keluarga yang memiliki Kartu Keluarga (KK)

Indikator ini menguraikan jumlah dan proporsi kepemilikan Kartu Keluarga (KK) yang menggambarkan kepedulian keluarga terhadap tertib administrasi kependudukan. Untuk mengetahui gambaran kepedulian penduduk terhadap kepemilikan KK di Provinsi Kalimantan Barat sebagaimana tabel di bawah ini.

Tabel 3.14
Kepemilikan Kartu Keluarga (KK) di Kalimantan Barat

Kabupaten/Kota	Memiliki KK	Persentase (%)
Kab. Sambas	176.939	11,72
Kab. Mempawah	81.003	5,37
Kab. Sanggau	134.408	8,90
Kab. Ketapang	176.844	11,72
Kab. Sintang	114.851	7,61
Kab. Kapuas Hulu	76.367	5,06
Kab. Bengkayang	74.481	4,93
Kab. Landak	101.280	6,71
Kab. Sekadau	58.980	3,91
Kab. Melawi	67.431	4,47
Kab. Kayong Utara	35.811	2,37
Kab. Kubu Raya	162.109	10,74
Kota Pontianak	185.653	12,30
Kota Singkawang	63.275	4,19
Kalimantan Barat	1.509.432	100

Sumber : Data SIAK Hasil Konsolidasi Berkala Kemendagri Semester II Tahun 2018 Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Prov. Kalbar

A.3.2 Kepemilikan Kartu Tanda Penduduk Elektronik (KTP-el)

Penduduk Kalimantan Barat yang telah memenuhi syarat untuk memperoleh KTP-el belum seluruhnya memiliki KTP-el. Beberapa alasan penduduk Kalimantan Barat belum memiliki KTP-el adalah belum melakukan perekaman bio data, belum melaporkan bahwa usianya sudah memenuhi syarat untuk memiliki KTP-el, kehabisan blanko di Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dan lain-lain.Jumlah wajib KTP-el penduduk Kalimantan Barat sebagai berikut :

Tabel 3.15
Wajib KTP Penduduk di Provinsi Kalimantan Barat

Kabupaten/Kota	Jumlah Wajib KTP		Jumlah
	Laki-laki	Perempuan	
Kab. Sambas	227.487	217.117	444.604
Kab. Mempawah	110.628	105.459	216.087
Kab. Sanggau	182.112	167.718	349.830
Kab. Ketapang	215.014	198.017	413.031
Kab. Sintang	149.477	138.831	288.308
Kab. Kapuas Hulu	86.387	82.315	168.702
Kab. Bengkayang	103.425	94.939	198.364
Kab. Landak	146.991	132.495	279.486
Kab. Sekadau	78.281	72.387	150.668
Kab. Melawi	86.673	81.129	167.802
Kab. Kayong Utara	45.352	42.442	87.794
Kab. Kubu Raya	217.405	207.368	424.773
Kota Pontianak	239.882	242.886	482.768
Kota Singkawang	83.859	81.326	165.185
Kalimantan Barat	1.972.973	1.864.429	3.837.402

Sumber : Data SIAK Hasil Konsolidasi Berkala Kemendagri Semester II Tahun 2018
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Prov. Kalbar

A.3.3 Kepemilikan Akta Kelahiran

Akta kelahiran menunjukkan hubungan perdata dari pemilik akta dengan orang tuanya. Masih banyak penduduk Kalimantan Barat yang belum memiliki Akta Kelahiran, datanya dapat dilihat pada tabel 3.16.

Tabel 3.16
Penduduk Menurut Kepemilikan Akta Kelahiran
Di Kalimantan Barat

KABUPATEN / KOTA	BELUM MEMILIKI	SUDAH MEMILIKI	JUMLAH PENDUDUK (Jiwa)
Kab. Sambas	389.379	246.000	635.379
Kab. Mempawah	193.124	111.671	304.795
Kab. Sanggau	356.962	129.167	486.129
Kab. Ketapang	354.517	227.077	581.594
Kab. Sintang	280.117	128.724	408.841
Kab. Kapuas Hulu	149.641	92.529	242.170
Kab. Bengkayang	242.331	44.790	287.121
Kab. Landak	268.660	130.761	399.421
Kab. Sekadau	132.445	79.757	212.202
Kab. Melawi	171.217	61.319	232.536
Kab. Kayong Utara	75.283	50.691	125.974
Kab. Kubu Raya	343.025	261.538	604.563
Kota Pontianak	302.817	362.877	665.694
Kota Singkawang	120.500	115.895	236.395
KALBAR	**3.380.018**	**2.042.796**	**5.422.814**

Sumber : ***Data SIAK Hasil Konsolidasi Berkala Kemendagri Semester II Tahun 2018***
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Prov. Kalbar

A.3.4 Kepemilikan Akta Nikah/Akta Perkawinan

Akta Nikah atau Akta Perkawinan juga merupakan salah satu produk yang dihasilkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten/Kota, setiap pasangan non muslim yang melangsungkan pernikahan harus mencatatkan pernikahannya dan kemudian akan dibuatkan akta nikah oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil. Data ini akan menggambarkan jumlah penduduk di kabupaten/kota yang telah memiliki Akta Nikah sampai dengan tahun 2018.

Tabel 3.17
Kepemilikan Akta Perkawinan

Kabupaten/Kota	Akta Perkawinan	Persentase (%)
Kabupaten Sambas	26.830	5,07
Kabupaten Mempawah	30.617	5,79
Kabupaten Sanggau	55.169	10,43
Kabupaten Ketapang	34.695	6,56
Kabupaten Sintang	37.829	7,15
Kabupaten Kapuas Hulu	37.313	7,05
Kabupaten Bengkayang	4.767	0,90
Kabupaten Landak	10.793	2,04
Kabupaten Sekadau	26.708	5,05
Kabupaten Melawi	18.912	3,58
Kabupaten Kayong Utara	12.624	2,39
Kabupaten Kubu Raya	53.867	10,18
Kota Pontianak	149.070	28,18
Kota Singkawang	29.722	5,62
JUMLAH	528.916	100

Sumber : Data SIAK Hasil Konsolidasi Berkala Kemendagri Semester II Tahun 2018 Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Prov. Kalbar

A.3.5 Kepemilikan Akta Kematian

Kepemilikan akta kematian di kalangan penduduk Kalimantan Barat masih sangat kecil, pada hal pendekatan untuk melaporkan peristiwa kematian sudah diubah yang semula wajib dilaporkan oleh keluarga yang mengalami musibah, diubah menjadi kewajiban Ketua Rukun Tetangga untuk melaporkannya secara berjenjang kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten/Kota.

Data penduduk Kalimantan Barat yang telah memperoleh akta kematian tersaji dalam tabel 3.18. Kiranya masih sangat perlu dilakukan sosialisasi untuk menjelaskan manfaat dari perlunya penduduk Kalimantan Barat yang telah meninggal memiliki Akta Kematian.

Tabel 3.18
Jumlah Akta Kematian

NO	Kabupaten/Kota	Akta Kematian	Persentase (%)
1	Kabupaten Sambas	562	3,53
2	Kabupaten Mempawah	1.182	7,42
3	Kabupaten Sanggau	529	3,32
4	Kabupaten Ketapang	3.034	19,03
5	Kabupaten Sintang	4.069	25,53
6	Kabupaten Kapuas Hulu	134	0,84
7	Kabupaten Bengkayang	184	1,15
8	Kabupaten Landak	474	2,97
9	Kabupaten Sekadau	212	1,33
10	Kabupaten Melawi	93	0,58
11	Kabupaten Kayong Utara	1.448	9,08
12	Kabupaten Kubu Raya	414	2,60
13	Kota Pontianak	3.208	20,13
14	Kota Singkawang	397	2,49
Jumlah		15.940	100

Sumber : Dinas Dukcapil Kabupaten/Kota Tahun 2018, diolah

A.3.6. Kepemilikan Akta Perceraian

Akta perceraian diperlukan bukan saja untuk tertib administrasi kependudukan akan tetapi dapat pula dijadikan sebagai masukan yang terkait masalah sosial khususnya kehidupan rumah tangga. Kecilnya jumlah akta perceraian dikarenakan masih lemahnya pelaporan dan informasi yang diterima terhadap pembuatan akta perceraian.

Data ini akan menggambarkan jumlah penduduk di kabupaten/kota yang telah memiliki Akta Perceraian sampai dengan tahun 2018.

Tabel 3.19
Jumlah Akta Perceraian

Kabupaten/Kota	Akta Perceraian	Persentase (%)
Kabupaten Sambas	2.335	14,34
Kabupaten Mempawah	1.254	7,70
Kabupaten Sanggau	900	5,53
Kabupaten Ketapang	392	2,41
Kabupaten Sintang	844	5,18

Kabupaten Kapuas Hulu	213	1,31
Kabupaten Bengkayang	149	0,92
Kabupaten Landak	98	0,60
Kabupaten Sekadau	58	0,36
Kabupaten Melawi	92	0,57
Kabupaten Kayong Utara	107	0,66
Kabupaten Kubu Raya	1.440	8,84
Kota Pontianak	7.055	43,33
Kota Singkawang	1.344	8,26
Jumlah	16.281	100

Sumber : Data SIAK Hasil Konsolidasi Berkala Kemendagri Semester II Tahun 2018 Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Prov. Kalbar

A.3.7. Jumlah dan Proporsi Penduduk Menurut Status Kawin

Data di bawah ini adalah data penduduk Kalimantan Barat yang dihimpun dalam kategori kawin dan belum kawin dengan tidak memperhatikan kelompok umur, hanya semata-mata membedakan yang berstatus kawin dan tidak kawin, yang terdapat dalam Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK).

Tabel 3.20
Jumlah Penduduk menurut Status Perkawinan

Kabupaten/Kota	Belum Kawin	Kawin
Kabupaten Sambas	320.376	285.196
Kabupaten Mempawah	161.695	128.199
Kabupaten Sanggau	232.080	231.259
Kabupaten Ketapang	275.655	283.829
Kabupaten Sintang	192.454	200.787
Kabupaten Kapuas Hulu	112.975	118.669
Kabupaten Bengkayang	153.549	122.112
Kabupaten Landak	207.608	178.722
Kabupaten Sekadau	103.304	100.273
Kabupaten Melawi	109.392	115.372
Kabupaten Kayong Utara	60.637	60.396
Kabupaten Kubu Raya	315.904	265.051
Kota Pontianak	351.408	280.973
Kota Singkawang	128.388	94.295
Jumlah	2.725.425	2.465.133

Sumber : Data SIAK Hasil Konsolidasi Berkala Kemendagri Semester II Tahun 2018 Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Prov. Kalbar

Dari Tabel di atas, terlihat penduduk Kota Pontianak terbanyak belum kawin yaitu 351.408 jiwa, sedangkan penduduk yang berstatus sudah kawin terbanyak di Kabupaten Sambas 285.196 jiwa. Besarnya proporsi penduduk yang belum kawin karena masih besarnya jumlah penduduk yang berada pada umur sekolah/kuliah.

Tabel 3.21
Jumlah Penduduk Menurut Status Cerai

Kabupaten/Kota	Cerai	
	Cerai Hidup	Cerai Mati
Kabupaten Sambas	5.392	24.415
Kabupaten Mempawah	3.347	11.554
Kabupaten Sanggau	5.009	17.781
Kabupaten Ketapang	5.466	16.644
Kabupaten Sintang	4.335	11.265
Kabupaten Kapuas Hulu	2.379	8.147
Kabupaten Bengkayang	2.428	9.032
Kabupaten Landak	1.675	11.416
Kabupaten Sekadau	1.104	7.521
Kabupaten Melawi	1.415	6.357
Kabupaten Kayong Utara	856	4.085
Kabupaten Kubu Raya	5.195	18.413
Kota Pontianak	9.263	24.050
Kota Singkawang	4.028	9.684
Jumlah	51.892	180.364

Sumber : Data SIAK Hasil Konsolidasi Berkala Kemendagri Semester II Tahun 2018
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Prov. Kalbar

Pada tabel 3.21 adalah mereka yang berstatus cerai baik yang cerai hidup maupun cerai mati. Jumlah penduduk Kalimantan Barat yang berstatus cerai dan yang telah memiliki akta perceraian masih relatif kecil, sedang yang bercerai yang belum memiliki akta datanya belum tersedia.

A.4. Penyandang Cacat

Penyandang cacat di Kalimantan Barat pada tahun 2018 sebesar 7.520 jiwa, sebagian besar penyandang cacat adalah berupa cacat fisik yaitu 2.093 orang (27,83 %), dan cacat lainnya sebanyak 2.013 (26,77 %), Jumlah penyandang cacat Netra 1.074 (14,28 %), Rungu 975 (12,97 %), Mental/Jiwa 905 (12,03 %), Fisik/Mental 460 (6,12 %), sebagaimana pada tabel 3.22.

Penyandang cacat fisik lebih banyak berada di Kota Pontianak. Sedangkan penyandang cacat netra, rungu, mental/jiwa, fisik/mental dan lainnya lebih banyak berada di Kabupaten Kubu Raya, dan Kabupaten Ketapang.

Tabel 3.22
Jumlah Penduduk Penyandang Cacat

Kabupaten/Kota	Penyandang Cacat (Jiwa)						Jumlah (Jiwa)
	Fisik	Netra	Rungu	Mental/ Jiwa	Fisik/ Mental	Lainnya	
Kab. Sambas	52	47	41	87	22	36	285
Kab. Mempawah	162	211	87	95	55	44	654
Kab. Sanggau	99	54	107	99	64	41	464
Kab. Ketapang	211	325	104	83	47	95	865
Kab. Sintang	186	105	161	88	62	114	716
Kab. Kapuas Hulu	123	45	99	78	33	46	424
Kab. Bengkayang	47	11	15	15	7	7	102
Kab. Landak	51	34	32	47	28	33	225
Kab. Sekadau	48	24	29	38	8	16	163
Kab. Melawi	28	26	17	17	11	13	112
Kab. Kayong Utara	37	77	1	9	1	8	133
Kab. Kubu Raya	136	42	114	109	63	1,389	1,853
Kota Pontianak	872	69	143	107	48	146	1,385
Kota Singkawang	41	4	25	33	11	25	139
Kalimantan Barat	2,093	1,074	975	905	460	2,013	7,520
%	27.83	14.28	12.97	12.03	6.12	26.77	100

Sumber : Data SIAK Hasil Konsolidasi Berkala Kemendagri Semester II Tahun 2018
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Prov. Kalbar

A.5. Kabupaten, Kecamatan dan Desa Daerah Perbatasan

Daerah Perbatasan menurut Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Undang Undang Nomor 23 Tahun 2006 adalah daerah batas wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dan daerah batas wilayah negara tetangga yang disepakati bersama berdasarkan perjanjian lintas batas

(*crossing border agreement*) antara Pemerintah Republik Indonesia dan pemerintah negara tetangga.

Provinsi Kalimantan Barat merupakan satu-satunya Provinsi di Indonesia yang secara resmi telah mempunyai akses jalan darat untuk masuk dan keluar ke negara lain. Khusus untuk kawasan yang berbatasan dengan Malaysia Timur, telah dibangun Pos Pemeriksaan Lintas Batas (PPLB) Entikong di Kabupaten Sanggau kemudian menyusul dibukanya PPLB Aruk di Kecamatan Sajingan Kabupaten Sambas pada Januari 2011.

Kawasan Perbatasan Negara adalah bagian dari Wilayah Negara yang terletak pada sisi dalam sepanjang batas wilayah Indonesia dengan negara lain, di Kalimantan Barat terdapat 5 kabupaten, 15 kecamatan dan 150 desa yang terletak di daerah perbatasan. Untuk desa di lini I, terjadi penambahan desa karena ada pembentukan desa baru. Penetapan lini I berdasarkan Keputusan Gubernur Kalimantan Barat Nomor 189/BPKPK/2010 tanggal 12 April 2010 tentang Penetapan Kecamatan Perbatasan Lini 1 dan Lini 2 Provinsi Kalimantan Barat, yang menetapkan jumlah kecamatan yang berada pada posisi Lini 1 sebanyak 15 kecamatan, sedangkan untuk kawasan perbatasan yang berada pada Lini 2 sebanyak 33 kecamatan. Penetapan Kecamatan yang masuk dalam lini 2 melalui Keputusan Gubernur Nomor 189 Tahun 2010 tanggal 10 Mei 2010. Lini 1 adalah wilayah yang berbatasan langsung dengan Malaysia Timur, sedangkan wilayah yang tidak berbatasan langsung disebut daerah Lini 2. Wilayah kabupaten dan kecamatan yang terdapat di Lini 1 dan Lini 2 adalah sebagai berikut :

LINI 1 :

- Kabupaten Sambas 2 kecamatan, yaitu Kecamatan Paloh dan Sajingan Besar.
- Kabupaten Bengkayang 2 kecamatan, yaitu Kecamatan Siding dan Kecamatan Jagoi Babang.
- Kabupaten Sanggau 2 kecamatan, yaitu Kecamatan Sekayam dan Kecamatan Entikong.
- Kabupaten Sintang 2 kecamatan, yaitu Kecamatan Ketungau Tengah dan Ketungau Hulu.

- Kabupaten Kapuas Hulu 7 kecamatan, yaitu Kecamatan Badau, Batang Lupar, Embaloh Hulu, Kecamatan Puring Kencana, Empanang, Putussibau Utara dan Kecamatan Putussibau Selatan.

LINI 2:

- Kabupaten Sambas 6 kecamatan, yaitu Kecamatan Tangaran, Teluk Keramat, Galing, Jawai, Subah dan Sejangkung.
- Kabupaten Bengkayang 3 kecamatan, yaitu Kecamatan Seluas, Sanggau Ledo dan Kecamatan Tujuh Belas
- Kabupaten Sanggau 5 kecamatan, yaitu Kecamatan Beduai, Noyan, Jangkang, Bonti dan Kecamatan Kembayan.
- Kabupaten Kapuas Hulu 10 kecamatan, yaitu Kecamatan Semitau, Selimbau, Suhaid, Embaloh Hilir, Jongkong, Bunut Hilir, Kalis, Mandai, Empanang dan Kecamatan Silat Hilir.
- Kabupaten Sekadau 3 Kecamatan, yaitu Kecamatan Belitang Hilir, Belitang Hulu dan Belitang.
- Kabupaten Sintang 6 kecamatan, yaitu Kecamatan Ketungau Hilir, Sepauk, Tempunak, Sungai Tebelian, Binjai dan Kecamatan Sintang.

Tabel 3.23
Kabupaten, Kecamatan dan Desa serta Jumlah Penduduk Daerah Perbatasan Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2018

No	PERBATASAN							
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	KABUPATEN	NAMA KECAMATAN	NAMA DESA	LUAS WILAYAH (Km²)	JUMLAH PENDUDUK		L+P	KET
					LAKI-LAKI	PEREMPUAN	JUMLAH	
LINI I								
	SAMBAS			16.017	21.535	20.046	41.581	
1		PALOH		14.621	15.425	14.466	29.891	
			SEBUBUS	4.521	4.900	4.521	9.421	
			NIBUNG	1.463	1.516	1.446	2.962	
				1.168	1.204	1.118	2.322	
			TANAH HITAM	1.830	1.966	1.820	3.786	
			MATANG DANAU	2.383	2.334	2.185	4.519	
			KALIMANTAN	1.006	996	951	1.947	
			TEMAJUK	1.140	1.282	1.239	2.521	
			MENTIBAR	1.110	1.227	1.186	2.413	
2		SAJINGAN BESAR		1.396	6.110	5.580	11.690	

			KALIAU'	198	1.420	1.294	2.714	
			SEBUNGA	366	1.280	1.217	2.497	
			SANTABAN	174	1.307	1.112	2.419	
			SENATAB	110	1.503	1.408	2.911	
			SUNGAI BENING	548	600	549	1.149	
	SANGGAU			1397,17	30.783	28.178	58.961	
1		SEKAYAM		890,28	20.785	18.839	39.624	
			BALAI KARANGAN	78,05	6.423	5.615	12.038	
			PENGADANG	491,3	1.465	1.386	2.851	
			SOTOK	92,07	1.454	1.327	2.781	
			KENAMAN	100	1.341	1.273	2.614	
			RAUT MUARA	98	1.625	1.444	3.069	
			ENGKAHAN	82,26	1.420	1.351	2.771	
			BUNGKANG	79,2	1.704	1.657	3.361	
			LUBUK SABUK	103,29	1.816	1.580	3.396	
			SANGAI TEKAM	90,12	1.348	1.265	2.613	
			MELENGGANG	117,79	2.189	1.941	4.130	
2		ENTIKONG		506,89	9.998	9.339	19.337	
			NEKAN	89	1.335	1.250	2.585	
			SEMANGIT	103,5	1.357	1.318	2.675	
			ENTIKONG	100,82	5.034	4.728	9.762	
			PALA ASANG	99,57	613	548	1.161	
			SURUH TEMBAWANG	114	1.659	1.495	3.154	
	SINTANG				26.128	23.741	49.869	
1		KETUNGAU TENGAH			14.986	13.668	28.654	
			WIRAYUDA		1.300	1.278	2.578	
			TANJUNG SARI		414	356	770	
			PANDING JAYA		358	339	697	
			TIRTA KARYA		538	527	1.065	
			BAGELANG JAYA		761	700	1.461	
			SUMBER SARI		940	911	1.851	
			PANGGI AGUNG		679	618	1.297	
			KERTA SARI		240	213	453	
			ARGO MULYO		395	341	736	
			WANA BHAKTI		709	671	1.380	
			SWADAYA		426	359	785	
			MARGAHAYU		676	643	1.319	
			GUT JAYA BHAKTI		758	681	1.439	
			LANDAU BUAYA		383	332	715	
			KAYU DUJUNG		966	840	1.806	
			SENANGAN KECIL		576	488	1.064	
			SUNGAI AREH		544	474	1.018	
			MUNGGUK GELOMBANG		714	676	1.390	
			NANGA KELAPAN		618	518	1.136	
			MUNGGUK LAWANG		415	364	779	
			PANGGI RUGUK		291	241	532	
			BAKTI SENABUNG		268	264	532	
			ENGKITAN		351	296	647	

			LANDAU TEMIANG		177	166	343	
			PADUNG KUMANG		323	303	626	
			RADIN JAYA		427	377	804	
			SENANGAN JAYA		221	194	415	
			KUBU BERANGAN		252	259	511	
			SEMAREH		266	239	505	
2		KETUNGAU HULU			11.142	10.073	21.215	
			SENANING		614	589	1.203	
			EMPURA		439	413	852	
			SEBADAK		554	470	1.024	
			SEPILUK		728	651	1.379	
			SUNGAI SERIA		865	741	1.606	
			SUAK MEDANG		414	374	788	
			NANGA BAYAN		642	606	1.248	
			RASAU		215	210	425	
			JASA		414	382	796	
			SUNGAI BUGAU		528	491	1.019	
			NANGA BUGAU		578	479	1.057	
			EMPUNAK TAPANG KELADAN		617	534	1.151	
			SEBETUNG PALUK		389	358	747	
			MUAKAN PETINGGI		487	443	930	
			NANGA SEBAWANG		272	263	535	
			SEKAIH		362	329	691	
			BEKUAN LUYANG		625	605	1.230	
			SUNGAI PISAU		333	269	602	
			MUNGGUK ENTAWAK		145	135	280	
			EMBALEH		160	142	302	
			SEBULUH		214	192	406	
			RIAM SEJAWAK		245	223	468	
			ENGKERUH		147	147	294	
			SUNGAI KELIK		185	158	343	
			IDAI		168	143	311	
			SUNGAI MAWANG		183	172	355	
			UJUNG KEMPAS		310	266	576	
			NERACI JAYA		130	119	249	
			SEJAWAK		179	169	348	
	KAPUAS HULU			12387,75	35.523	34.247	69.770	
1		PUTUSSIBAU UTARA		3507,72	13.087	12.580	25.667	
			PUTUSSIBAU KOTA	457	4.666	4.485	9.151	
			HILIR KANTOR	29	1.736	1.704	3.440	
			PALA PULAU	299	1.045	1.064	2.109	
			SIBAU HILIR	705	1.205	1.044	2.249	
			PADUA MENDALAM	276	326	288	614	
			DATAH DIAN	690	363	338	701	
			SIBAU HULU	769	602	574	1.176	
			NANGA NYABAU		167	176	343	
			NANGA AWIN	23	565	510	1.075	
			ARIUNG MENDALAM		179	175	354	
			NANGA SAMBUS		391	369	760	
			BANUA TANGAH		249	245	494	

			TANJUNG BERUANG		166	159	325	
			TANJUNG KARANG	260	260	265	525	
			SELUAN		362	355	717	
			SUNGAI ULUK PALIN		317	341	658	
			TANJUNG LASA		215	222	437	
			LAUK		156	153	309	
			JANGKANG		117	113	230	
2		EMBALOH HULU		3.417	2.635	2.531	5.166	
			BANUA MARTINUS	834	300	313	613	
			MENUA SADAP	439	223	205	428	
			PULAU MANAK	226	311	298	609	
			BANUA UJUNG	374	384	367	751	
			SAUJUNG GILING MANIK	437	243	207	450	
			ULAK PAUK	315	322	298	620	
			LANGAN BARU	207	235	211	446	
			BATU LINTANG	113	228	251	479	
			RANTAU PRAPAT	134	165	161	326	
			TAMAO	338	224	220	444	
3		BATANG LUPAR		1.332	2.730	2.716	5.446	
			SETULANG	133	149	152	301	
			SEPANDAN	107	585	571	1.156	
			SUNGAI AJUNG	282	152	167	319	
			SUNGAI ABAU	147	184	168	352	
			LABIAN	169	316	342	658	
			MENSIAU	148	165	196	361	
			MELEMBA	159	181	156	337	
			LANJAK DERAS	68	520	520	1.040	
			SUNGAI SENUNUK	119	273	274	547	
			LABIAN IRAANG		205	170	375	
4		EMPANANG		444,5	1.730	1.648	3.378	
			KELING PANGGAU	105,5	242	236	478	
			NANGA KANTUK	49	489	475	964	
			TINTIN PENINJAU	76	238	234	472	
			BAJAU ANDAI	58	173	164	337	
			KUMANG JAYA	52	238	203	441	
			LAJA SANDANG	104	350	336	686	
5		BADAU		701	3.246	3.111	6.357	
			BADAU	67	1.357	1.306	2.663	
			JANTING	114	258	234	492	
			SEMUNTIK	54	115	122	237	
			KEKURAK	99	253	236	489	
			PULAU MAJANG	36	449	415	864	
			SERIANG	31	163	138	301	
			SEBINDANG	64	231	259	490	
			TINTING SELIGI	119	141	144	285	
			TAJUM	117	279	257	536	
6		PUTUSSIBAU SELATAN		2497,50	10.970	10.668	21.638	
			KEDAMIN HULU	535	3.211	3.196	6.407	

			KEDAMIN HILIR	242	2.180	2.187	4.367	
			SUNGAI ULUK	362	616	607	1.223	
			JARAS	278	284	265	549	
			MELAPI	113,5	505	518	1.023	
			KEDAMIN DARAT	612	675	625	1.300	
			TANJUNG JATI	335	277	296	573	
			SAYUT		602	520	1.122	
			URANG UNSA		220	208	428	
			SUKA MAJU		588	569	1.157	
			CEMPAKA BARU		367	353	720	
			BERINGIN JAYA		252	210	462	
			BUNGAN JAYA		330	316	646	
			TANJUNG LOKANG		280	222	502	
			KAREHO		214	211	425	
			INGKO TAMBE		369	365	734	
7		PURING KENCANA		490	1.125	993	2.118	
			SUNGAI ANTU		264	208	472	
			MERAKAI PANJANG	92	226	220	446	
			KANTUK ASAM	86	177	160	337	
			KANTUK BUNUT	173	167	143	310	
			SUNGAI MAWANG	67	208	191	399	
			LANGAU	72	83	71	154	
	BENGKAYANG			1176,2	8.993	8.330	17.323	
1		JAGOI BABANG		612,9	4.713	4.323	9.036	
			JAGOI		1.495	1.416	2.911	
			KUMBA		690	597	1.287	
			SEKIDA		1.010	944	1.954	
			GERSIK		711	607	1.318	
			SEMUNYING JAYA		277	295	572	
			SINAR BARU		530	464	994	
2		SIDING		563,3	4.280	4.007	8.287	
			SIDING		631	523	1.154	
			TAMONG		331	332	663	
			SUNGKUNG I		629	623	1.252	
			HLI BUEI		672	644	1.316	
			TANGGUH		379	355	734	
			TAWANG		328	333	661	
			SUNGKUNG II		684	604	1.288	
			SUNGKUNG III		626	593	1.219	
LINI II								
	SAMBAS			2.201,40	115.246	108.549	223.795	
1		TELUK KERAMAT		495,68	38.346	36.139	74.485	
			SUNGAI KUMPAI	26,85	1.795	1.639	3.434	
			SEKURA	46,86	4.661	4.545	9.206	
			TRI MANDAYAN	36,85	1.450	1.398	2.848	
			PEDADA	4	775	750	1.525	
			LELA	25,1	1.666	1.452	3.118	

			PURINGAN	11,62	919	849	1.768	
			BERLIMANG	9,23	1.668	1.582	3.250	
			SUNGAI BARU	33,6	2.246	2.047	4.293	
			SENGAWANG	30,54	2.194	1.978	4.172	
			TELUK KASEH	23,1	699	662	1.361	
			SEPADU	15,5	1.212	1.178	2.390	
			TAMBATAN	17,28	859	853	1.712	
			KUBANGGA	11,19	1.468	1.393	2.861	
			SUNGAI SERABEK	95	1.779	1.625	3.404	
			SAYANG SEDAYU	11,62	1.333	1.214	2.547	
			PIPIT TEJA	14,47	1.982	1.904	3.886	
			MATANG SEGANTAR	9,25	1.042	1.003	2.045	
			MULIA	9,79	1.051	1.016	2.067	
			TELUK KUMBANG	14,55	1.303	1.278	2.581	
			SAMUSTIDA		2.668	2.511	5.179	
			TANJUNG KERUCUT	31,83	1.416	1.306	2.722	
			SEBAGU	16,31	765	787	1.552	
			MEKAR SEKUNTUM	33,88	1.242	1.151	2.393	
			KUALA PANGKALAN KERAMAT	31,95	1.244	1.198	2.442	
			SABING		909	820	1.729	
2		JAWAI		270,4	24.603	23.159	47.762	
			SARANG BURUNG DANAU	66	2.878	2.731	5.609	
			SUNGAI NILAM	22	1.174	1.159	2.333	
			SARANG BURUNG KOLAM	36,25	1.804	1.691	3.495	
			SARANG BURUNG USRAT	14,35	2.095	1.940	4.035	
			SARANG BURUNG KUALA	41,65	1.567	1.502	3.069	
			PELIMPAAN	25	1.728	1.557	3.285	
			PARIT SETIA	10,8	1.689	1.629	3.318	
			BAKAU	10	2.121	1.956	4.077	
			SUNGAI NYIRIH	10,75	1.589	1.531	3.120	
			SENTEBANG	21,6	4.224	3.895	8.119	
			DUNGUN LAUT	12	1.800	1.741	3.541	
			LAMBAU		1.120	1.034	2.154	
			MUTUS DARUSSALAM		814	793	1.607	
3		SEJANGKUNG		291,26	14.000	13.197	27.197	
			SULUNG	12,5	693	656	1.349	
			PENAKALAN	6,5	653	642	1.295	
			SEKUDUK	13,25	1.013	998	2.011	
			SETALIK	19	794	803	1.597	
			PARIT RAJA	33,5	1.748	1.669	3.417	
			PIANTUS	11,5	1.035	968	2.003	
			PERIGI LANDU	18,81	784	757	1.541	
			SENDOYAN	24	2.148	2.056	4.204	
			SENUJUH	61	833	764	1.597	
			PERIGI LIMUS	5,5	975	898	1.873	
			SEMANGA	60,7	2.467	2.220	4.687	
			SEPANTAI	25	857	766	1.623	

4		SUBAH		603,01	12.185	11.299	23.484	
			BALAI GEMURUH	124,8	1.321	1.247	2.568	
			SUNGAI SAPA'	61,19	1.290	1.244	2.534	
			MADAK	113,86	1.195	1.065	2.260	
			SABUNG	127,54	834	799	1.633	
			TEBUAH ELOK	94,35	771	675	1.446	
			SUNGAI DEDEN	19,25	1.666	1.474	3.140	
			BUKIT MULYA	20,25	1.506	1.377	2.883	
			MUKTI RAHARJA	13,25	913	878	1.791	
			SEMPURNA	19,87	1.682	1.629	3.311	
			MENSADE	8,65	392	356	748	
			KARABAN JAYA		615	555	1.170	
5		GALING		354,29	12.733	12.155	24.888	
			SAGU	31,18	889	804	1.693	
			SUNGAI PALAH	34,92	1.047	1.052	2.099	
			GALING	65,99	1.661	1.615	3.276	
			TEMPAPAN KUALA	53,26	1.125	1.097	2.222	
			TEMPAPAN HULU	76,4	1.990	1.856	3.846	
			RATU SEPUDAK	20,95	1.050	1.004	2.054	
			TRI KEMBANG	21,29	1.684	1.584	3.268	
			TRI GADU	5,27	967	954	1.921	
			TELUK PANDAN	24,21	1.021	992	2.013	
			SIJANG	20,82	1.299	1.197	2.496	
6		TANGARAN		186,67	13.379	12.600	25.979	
			TANGARAN	80,88	1.718	1.635	3.353	
			SIMPANG EMPAT	13,87	3.301	3.101	6.402	
			MERABUAN	12	961	869	1.830	
			SEMATA	23,85	1.881	1.816	3.697	
			MERPATI	12,82	1.140	1.039	2.179	
			PANCUR	18,25	1.527	1.428	2.955	
			ARUNG PARAK	25	1.835	1.736	3.571	
			ARUNG MEDANG		1.016	976	1.992	
	SANGGAU			4.244,70	56.855	51.677	108.532	
1		NOYAN		487,9	6.035	5.279	11.314	
			NOYAN	110,59	1.145	1.013	2.158	
			EMPOTO	85,71	1.033	918	1.951	
			SEMONGAN	181,95	1.160	977	2.137	
			SUNGAI DANGIN	111,22	1.664	1.446	3.110	
			IDAS	33,63	1.033	925	1.958	
2		JANGKANG		1.589,20	15.578	13.765	29.343	
			BALAI SEBUT	93,14	1.830	1.692	3.522	
			JANGKANG BENUA	136,27	1.481	1.285	2.766	
			TANGGUNG	145,98	1.547	1.382	2.929	
			EMPIYANG	187,75	1.820	1.571	3.391	
			PISANG	194,61	1.291	1.105	2.396	
			KETORI	174,14	1.148	947	2.095	
			SEMOMBAT	81,73	979	802	1.781	
			TERATI	83,86	1.091	915	2.006	

			SAPE	158,92	2.394	2.308	4.702	
			SELAMPUNG	161,32	916	861	1.777	
			SEMIRAU	125,65	1.081	897	1.978	
3		BONTI		1.121,80	12.174	11.095	23.269	
			BONTI	55	1.167	1.063	2.230	
			SAMI	85,4	519	511	1.030	
			BAHTA	138,06	1.106	1.006	2.112	
			UPE	146,7	1.344	1.304	2.648	
			TUNGGUL BOYOK	98,94	926	847	1.773	
			EMPODIS	95,78	969	904	1.873	
			KAMPUH	126	1.915	1.693	3.608	
			BANTAI	149,75	2.619	2.423	5.042	
			MAJEL	168,77	1.609	1.344	2.953	
4		BEDUAI		435	6.694	6.165	12.859	
			KASRO MEGO	46,7	1.713	1.607	3.320	
			BERENG BERKAWAT	73,3	1.119	1.063	2.182	
			MUARA ILAI	134,4	1.739	1.555	3.294	
			THANG RAYA	54,2	1.026	935	1.961	
			MAWANG MUDA	126,4	1.097	1.005	2.102	
5		KEMBAYAN		610,8	16.374	15.373	31.747	
			TANJUNG BUNGA	60	1.031	892	1.923	
			SEMAYANG	14	1.673	1.579	3.252	
			SEBONGKUH	58	958	924	1.882	
			KUALA DUA	45	1.479	1.351	2.830	
			TANJUNG MERPATI	83	3.179	2.982	6.161	
			SEJUAH	78,3	1.293	1.235	2.528	
			MOBUI	75	969	902	1.871	
			TANAP	60	1.312	1.278	2.590	
			SEBUDUH	52	1.286	1.226	2.512	
			KELOMPU	75	2.159	2.028	4.187	
			TUNGGAL BHAKTI	10,5	1.035	976	2.011	
	SINTANG			5.508,40	115.015	108.122	223.137	
1		SINTANG		277,05	36.719	35.875	72.594	
			LADANG		2.194	2.169	4.363	
			KAPUAS KANAN HULU		6.028	5.880	11.908	
			TANJUNG PURI		4.444	4.333	8.777	
			KAPUAS KANAN HILIR		2.693	2.653	5.346	
			KAPUAS KIRI HILIR		733	714	1.447	
			KAPUAS KIRI HULU		894	914	1.808	
			AKCAYA		1.152	1.124	2.276	
			ALAI		1.102	1.098	2.200	
			RAWA MAMBOK		1.090	1.054	2.144	
			SENGKUANG		1.659	1.581	3.240	
			MENGKURAI		1.351	1.275	2.626	
			KEDABANG		464	421	885	
			MEKAR JAYA		563	558	1.121	
			BATU LALAU		154	156	310	

			MENYUMBUNG TENGAH		884	926	1.810	
			ULAK JAYA		878	878	1.756	
			BANING KOTA		4.248	4.194	8.442	
			TERTUNG		471	454	925	
			MUNGGUK BANTOK		297	260	557	
			TELUK KELANSAM		313	288	601	
			SUNGAI ANA		1.833	1.763	3.596	
			MERTI GUNA		1.286	1.290	2.576	
			TANJUNG KELANSAM		287	244	531	
			ANGGAH JAYA		315	324	639	
			LALANG BARU		271	259	530	
			TEBING RAYA		179	157	336	
			MAIL JAMPONG		103	115	218	
			JERORA SATU		625	614	1.239	
			KEBIAU BARU		208	179	387	
2		TEMPUNAK		1.027	15.285	14.085	29.370	
			NANGA TEMPUNAK		784	764	1.548	
			MENSIAP BARU		970	887	1.857	
			TANJUNG PERADA		491	455	946	
			SUKA JAYA		814	733	1.547	
			MANGKURAT BARU		557	526	1.083	
			PERIBANG BARU		1.040	968	2.008	
			REPAK SARI		553	507	1.060	
			PAGAL BARU		735	689	1.424	
			KENYABUR BARU		800	767	1.567	
			BENUA BARU		457	409	866	
			TINUM BARU		677	667	1.344	
			PANGKAL BARU		887	807	1.694	
			PULAU JAYA		839	753	1.592	
			KUALA TIGA		535	468	1.003	
			GURUNG MALI		336	295	631	
			MERTI JAYA		385	324	709	
			BENUA KENCANA		475	442	917	
			BALAI HARAPAN		673	618	1.291	
			TEMPUNAK KAPUAS		562	520	1.082	
			RIAM BATU		454	382	836	
			PUDAU BERSATU		398	366	764	
			KUPAN JAYA		418	371	789	
			SUNGAI BULUH		439	415	854	
			JAYA MENTARI		519	492	1.011	
			PEKULAI BERSATU		174	157	331	
			MENSIAP JAYA		313	303	616	
3		SEPAUK		1.825,70	26.557	24.396	50.953	
			NANGA SEPAUK		765	736	1.501	
			TANJUNG RIA		1.846	1.730	3.576	
			SEKUBANG		1.028	1.025	2.053	
			KENYAUK		521	494	1.015	
			LENGKENAT		886	849	1.735	
			MANIS RAYA		1.392	1.335	2.727	
			TEMIANG KAPUAS		376	362	738	

			ENSABANG		438	367	805	
			MAIT HILIR		815	724	1.539	
			SEKUJAM TIMBAI		426	397	823	
			SEMUNTAI		997	874	1.871	
			SIRANG SETAMBANG		925	855	1.780	
			NANGA LIBAU		1.054	930	1.984	
			BERNAYAU		718	597	1.315	
			SINAR PEKAYAU		762	693	1.455	
			NANGA PARI		789	696	1.485	
			BULUH KUNING		533	497	1.030	
			TEMAWANG MUNTAI		1.020	989	2.009	
			TAWANG SARI		908	868	1.776	
			GERNIS JAYA		598	524	1.122	
			PAOH BENUA		835	796	1.631	
			BEDAYAN		1.168	1.110	2.278	
			TANJUNG HULU		811	750	1.561	
			SUNGAI RAYA		639	596	1.235	
			LANDAU PANJANG		551	510	1.061	
			BANGUN SEKAYU		352	317	669	
			SUKAU BERSATU		478	410	888	
			KEMANTAN		370	325	695	
			PENINSUNG		546	493	1.039	
			SEPULUT		597	550	1.147	
			TEMAWANG BULAI		469	430	899	
			SUNGAI SEGAK		432	363	795	
			TANJUNG BALAI		526	482	1.008	
			SINAR HARAPAN		441	403	844	
			RIAM KEMPADIK		385	315	700	
			NANGA LAYUNG		301	281	582	
			LIMAU BAKTI		343	294	637	
			TANJUNG BAWANG		218	192	410	
			SUNGAI JAUNG		298	237	535	
4		KETUNGAU HILIR		1.544,50	11.731	10.692	22.423	
			NANGA KETUNGAU		704	632	1.336	
			SETUNGKUP		763	684	1.447	
			SUNGAI MALI		454	419	873	
			AIR NYURUK		766	694	1.460	
			NANGA MERKAK		740	698	1.438	
			SUNGAI DERAS		505	484	989	
			NANGA SEJIRAK		727	627	1.354	
			SEMUNTAI		416	388	804	
			SENIBUNG		253	228	481	
			TANJUNG BAUNG		377	349	726	
			BAUNG SENGATAP		518	508	1.026	
			SEMAJAU MEKAR		614	591	1.205	
			BELUH MULYO		837	782	1.619	
			BATU AMPAR		363	329	692	
			BUKIT SIDIN PERMAI		659	588	1.247	
			BETUNG PERMAI		552	428	980	
			KENUAK		809	722	1.531	

			JENTAWANG HILIR		323	284	607	
			BATU NYADI		371	328	699	
			RATU DAMAI		342	296	638	
			LEPUNG PANTAK		217	229	446	
			PAMPANG DUA		177	159	336	
			MUNGUK KELAPA		177	177	354	
			MAUNG		67	68	135	
5		SUNGAI TEBELIAN		526,5	17.547	16.398	33.945	
			RANSI DAKAN		713	659	1.372	
			SUNGAI UKOI		1.430	1.288	2.718	
			MANTER		1.215	1.143	2.358	
			MERARAI SATU		1.747	1.671	3.418	
			MERARAI DUA		1.291	1.202	2.493	
			KAJANG BARU		664	674	1.338	
			GURUNG KEMPADIK		764	724	1.488	
			NOBAL		329	293	622	
			BAYA BETUNG		318	323	641	
			BONET ENGKABANG		252	254	506	
			BONET LAMA		1.010	943	1.953	
			BANCOH		663	577	1.240	
			PEREMBANG		807	711	1.518	
			SOLAM RAYA		1.248	1.129	2.377	
			LEBAK UBAH		932	855	1.787	
			MELAYANG SARI		505	487	992	
			SARAI		404	333	737	
			RARAI		891	851	1.742	
			PENJERNANG		158	124	282	
			PENJERNANG HULU		288	267	555	
			RIAM KIJANG		43	53	96	
			BAYA MULYA		41	39	80	
			LAMAN RAYA		248	242	490	
			SABANG SURAI		176	175	351	
			BALAI AGUNG		1.054	997	2.051	
			KUNYAI		356	384	740	
6		BINJAI HULU		307,65	7.176	6.676	13.852	
			AMPAR BEDANG		548	484	1.032	
			TELAGA SATU		775	714	1.489	
			TELAGA DUA		645	615	1.260	
			BINJAI HILIR		729	672	1.401	
			BINJAI HULU		1.025	1.033	2.058	
			SUNGAI RISAP		470	427	897	
			DAK JAYA		1.277	1.220	2.497	
			MENSIKU		763	712	1.475	
			EMPAKA KEBIAU RAYA		299	260	559	
			SUNGAI RISAP MENSIKU BERSATU		283	243	526	
			SIMBA RAYA		362	296	658	
	KAPUAS HULU			7.998,68	46.361	43.953	90.314	
1		EMBALOH HILIR		1869,1	2.896	2.749	5.645	

			NANGA EMBALOH	108,3	582	522	1.104	
			KELILING SEMULUNG	108,3	283	290	573	
			LAWIK	108,3	226	209	435	
			NANGA LAUK	85,33	303	313	616	
			NANGA PALIN	85,33	476	466	942	
			KIRIN NANGKA	160,43	425	399	824	
			PALA PINTAS	85,33	169	148	317	
			UJUNG BAYUR	45,76	186	165	351	
			BELATONG	160,43	246	237	483	
2		BUNUT HILIR		867,54	4.204	4.142	8.346	
			BUNUT HILIR	32,54	338	343	681	
			BUNUT HULU	97	549	554	1.103	
			TELUK AUR	130	461	445	906	
			NANGA TUAN	120	369	359	728	
			UJUNG PANDANG	285	334	316	650	
			EMPANGAU	95	508	485	993	
			TEMBANG	73	286	298	584	
			BUNUT TENGAH	35	330	327	657	
			ENTIBAB		493	494	987	
			KAPUAS RAYA		198	201	399	
			EMPANGAU HILIR		338	320	658	
3		JONGKONG		564	5.446	5.355	10.801	
			JONGKONG KIRI HILIR	81	410	400	810	
			JONGKONG KANAN	100	331	320	651	
			JONGKONG KIRI HULU	75	848	900	1.748	
			JONGKONG PASAR	48	588	585	1.173	
			UJUNG SAID	130	328	299	627	
			TEMENANG	92	246	242	488	
			UJUNG JAMBU	12	459	445	904	
			BONTAI	26	309	313	622	
			JONGKONG KIRI TENGAH		422	421	843	
			JONGKONG TANJUNG		272	284	556	
			KANDUNG SULI		265	216	481	
			PENEPIAN RAYA		334	336	670	
			KARYA BARU		248	232	480	
			NANGA SERIAN		386	362	748	
4		SELIMBAU		741,3	6.605	6.269	12.874	
			GUDANG HULU	115,25	545	579	1.124	
			GUDANG HILIR	102,1	861	796	1.657	
			DALAM	67,61	823	759	1.582	
			NIBUNG	76,28	389	410	799	
			PIASAK HILIR	134,5	413	397	810	
			ENGKERENGAS	111,25	214	189	403	
			GERAYAU	55,67	196	196	392	
			BENUIS	78,64	227	197	424	
			TITIAN KUALA	78,64	528	541	1.069	
			SEKUBAH		163	141	304	
			PIASAK HULU		365	330	695	
			SEKULAT		623	562	1.185	

			NANGA LEBOYAN		413	400	813	
			VEGA		242	205	447	
			MAWAN		285	278	563	
			SEMALAH		161	141	302	
			TEMPURAU		157	148	305	
5		SEMITAU		562,7	4.535	4.253	8.788	
			SEMITAU HULU	125,7	1.024	985	2.009	
			KENERAK	70	293	265	558	
			NANGA SEBERUANG	93	343	338	681	
			ENTIPAN	93	420	362	782	
			KENEPAI KOMPLEK	181	216	199	415	
			SEMITAU HILIR		609	629	1.238	
			NANGA KENEPAI		206	193	399	
			TUA ABANG		264	265	529	
			NANGA LEMEDAK		384	343	727	
			MARSEDAN RAYA		346	304	650	
			PADUNG KUMANG		186	164	350	
			SEKEDAU		244	206	450	
6		EMPANANG		444,5	1.730	1.648	3.378	
			KELING PANGGAU	48,55	242	236	478	
			NANGA KANTUK	75,95	489	475	964	
			TINTIN PENINJAU	57,5	238	234	472	
			BAJAU ANDAI	51,55	173	164	337	
			KUMANG JAYA	103,7	238	203	441	
			LAJA SANDANG	107,25	350	336	686	
7		SILAT HILIR		1.104,98	9.758	9.017	18.775	
			PERIGI	150	925	869	1.794	
			BARU	65	812	782	1.594	
			PANGERAN	104	707	648	1.355	
			MIAU MERAH	110	1.289	1.208	2.497	
			SETUNGGUL	123	528	458	986	
			SUNGAI SENA	108	918	848	1.766	
			PENAI	120	978	941	1.919	
			NANGA NUAR	110	640	621	1.261	
			BONGKONG	70,65	544	498	1.042	
			SEBERU	49,33	785	732	1.517	
			SENTABAI	95	764	661	1.425	
			RUMBIH		560	472	1.032	
			BUKIT PENAI		308	279	587	
8		KALIS		1.184,00	6.691	6.272	12.963	
			NANGA SEBINTANG	395	248	236	484	
			NANGA LEBANGAN	255	226	181	407	
			NANGA KALIS	40	1.056	1.040	2.096	
			NANGA RAUN	243	449	423	872	
			BAHENAP	224	320	294	614	
			NANGA TUBUK	30	613	568	1.181	
			NANGA DANAU	71	272	251	523	
			KENSURAY	25,4	298	255	553	

			RANTAU KALIS	51	322	294	616	
			KALIS RAYA	67	810	824	1.634	
			TEKUDAK	193	692	654	1.346	
			SEMERANTAU		317	269	586	
			TAPANG DAAN		336	302	638	
			SEGIAM		170	160	330	
			RIBANG KADENG		223	186	409	
			RANTAU BUMBUN		190	166	356	
			PENIUNG		149	169	318	
9		SUHAID		620,56	4.496	4.248	8.744	
			MENSUSAI	74,7	365	342	707	
			KERENGAS	175,16	173	159	332	
			MANTAN	114,76	291	233	524	
			NANGA SUHAID	152	1.290	1.266	2.556	
			TANJUNG	67,5	505	500	1.005	
			MADANG PERMAI	160,72	718	693	1.411	
			LAUT TAWANG		366	324	690	
			JONGKONG HULU		207	193	400	
			MENAPAR		178	156	334	
			LUBUK PENGAIL		108	106	214	
			TANJUNG HARAPAN		295	276	571	
	BENGKAYANG			1.267,1	26.554	24.758	51.312	
1		SELUAS		432,6	10.642	9.728	20.370	
			SELUAS		2.650	2.456	5.106	
			BENGKAWAN		746	674	1.420	
			SAHAN		2.970	2.757	5.727	
			MAYAK		2.037	1.860	3.897	
			KALON		979	914	1.893	
			SENTANGAU JAYA		1.260	1.067	2.327	
2		SANGGAU LEDO		613,5	7.921	7.588	15.509	
			LEMBANG		2.730	2.687	5.417	
			GUA		1.329	1.269	2.598	
			BANGE		1.853	1.710	3.563	
			DANTI		759	697	1.456	
			SANGO		1.250	1.225	2.475	
3		TUJUH BELAS		221	7.991	7.442	15.433	
			BENGKILU		1.732	1.590	3.322	
			PISAK		2.022	1.913	3.935	
			KAMUH		1.518	1.436	2.954	
			SINAR TEBUDAK		2.719	2.503	5.222	
	SEKADAU			2	30.731	28.450	59.181	
1		BELITANG HILIR		764,3	12.459	11.450	23.909	
			SUNGAI AYAK SATU	61,05	1.627	1.611	3.238	
			SUNGAI AYAK DUA	85,24	3.143	2.844	5.987	
			ENTABUK	50,92	1.062	965	2.027	
			TAPANG PULAU	75,05	1.917	1.764	3.681	
			KUMPANG BIS	131,92	1.225	1.097	2.322	

			MENAWAI TEKAM	114,42	939	800	1.739	
			SEMADU	131,72	1.128	1.019	2.147	
			MERBANG	113,98	993	955	1.948	
			EMPAJAK		425	395	820	
2		BELITANG HULU		1162,7	11.036	10.218	21.254	
			SEBETUNG	89	1.069	941	2.010	
			SEBERUK SATU	101	924	841	1.765	
			SUNGAI TAPAH	161,2	1.229	1.178	2.407	
			IJUK	104	896	839	1.735	
			MENGARET	83	429	391	820	
			KUMPANG ILONG	88,5	1.244	1.163	2.407	
			SUNGAI ANTU HULU	80,5	754	694	1.448	
			TERDUK DAMPAK	106	776	724	1.500	
			PAKIT MULAU	86	494	473	967	
			TABUK HULU	133	956	878	1.834	
			BATUK MULAU	65,5	774	712	1.486	
			BALAI SEPUAK	65	1.139	1.063	2.202	
			BUKIT RAMBAT		352	321	673	
3		BELITANG		281	7.236	6.782	14.018	
			NANGA ANSAR	71	1.072	973	2.045	
			PADAK	60,5	827	779	1.606	
			SETUNTUNG	83,5	1.253	1.169	2.422	
			BELITANG SATU	43	937	897	1.834	
			BELITANG DUA	23	1.423	1.328	2.751	
			MENUA PRAMA		669	603	1.272	
			MABOH PERMAI		1.055	1.033	2.088	

Sumber : Data SIAK Hasil Konsolidasi Berkala Kemendagri Semester II Tahun 2018
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Prov. Kalbar

Untuk mengetahui fasilitas pendidikan SD, SMP, SMA dan setara SMK dan yang bersekolah di kawasan perbatasan per kecamatan Kalimantan Barat dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel 3.24
Data Gedung Sekolah di Kawasan Perbatasan Tahun 2018

Kabupaten	SD	SMP	SMA	SMK	Jumlah
Kab. Sambas	37	14	3	2	56
Kab. Bengkayang	30	9	3	1	43
Kab. Sanggau	46	14	2	3	65
Kab. Sintang	75	18	5	3	101
Kab. Kapuas Hulu	125	24	10	3	162
Jumlah	313	79	23	12	427

Sumber : Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Prov. Kalbar Tahun 2018

A.6 Orang Asing dan Kepemilikan Dokumen Keimigrasian

Orang Asing adalah orang bukan warga negara Indonesia. Orang asing yang ada di wilayah Provinsi Kalimantan Barat dan yang bermaksud tinggal dalam waktu tertentu, atau yang akan tinggal tetap dapat memohon kepada Kantor Imigrasi di Pontianak, Singkawang, Sambas, Sanggau, Entikong, Kapuas Hulu dan Ketapang. Untuk permohonan izin tinggal, baik izin tinggal terbatas maupun izin tinggal tetap harus melengkapi syarat-syarat yang telah ditentukan.

Izin tinggal terbatas adalah izin tinggal yang diberikan kepada orang asing untuk tinggal di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam jangka waktu terbatas sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan dan yang dimaksud dengan izin tinggal tetap adalah izin tinggal yang diberikan kepada orang asing untuk tinggal menetap di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan. Penduduk Kalimantan Barat yang berada pada Lini 1 atau yang berbatasan langsung dengan negara tetangga, yang akan melakukan perjalanan ke luar negeri dapat menggunakan pas lintas batas (PLB), ini diberlakukan, sesuai dengan UU Nomor 6 Tahun 2012 tentang Keimigrasian pada pasal 29 yang menyebutkan "Surat Perjalanan lintas batas atau pas lintas batas dapat dikeluarkan bagi Warga Negara Indonesia yang berdomisili di wilayah perbatasan Negara Republik Indonesia dengan negara lain sesuai dengan perjanjian lintas batas" sedangkan selain daripada itu diberlakukan peraturan yang sama yaitu menggunakan paspor.

Pengeluaran paspor dan PLB yang dikeluarkan oleh ketujuh kantor imigrasi selama tahun 2018 dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 3.25
Data Pengeluaran Dokumen Keimigrasian
Provinsi Kalimantan Barat
Tahun 2018

NO	KANTOR IMIGRASI	DATA PENGELUARAN DOKUMEN KEIMIGRASIAN					
		PASPOR 48 HAL	PASPOR 24 HAL	PLB	ITK	ITAS	ITAP
1	KANIM KELAS I TPI PONTIANAK	40.649	52	-	621	441	37
2	KANIM KELAS II NON TPI SINGKAWANG	27.545	-	2.270	908	333	3
3	KANIM KELAS II TPI SAMBAS	22.150	1.634	3.230	27	7	-

4	KANIM KELAS II TPI SANGGAU	10.480	-	-	35	147	2
5	KANIM KELAS II TPI ENTIKONG	9.483	-	4.510	23	6	-
6	KANIM KELAS III NON TPI PUTUSSIBAU	3.861	4	2.248	1	37	-
7	KANIM KELAS III NON TPI KETAPANG	4.328	-	-	135	807	-
JUMLAH		118.496	1.690	12.258	1.750	1.778	42

Sumber : Kanwil Kementerian Hukum dan HAM Kalbar, Tahun 2018

Pengeluaran dokumen keimigrasian selama tahun 2018 khususnya Izin Tinggal Terbatas (ITAS) sebanyak 1.778 dan yang terbesar terdapat di Kanim Kelas III Non TPI Ketapang sedangkan untuk Izin Tinggal Tetap (ITAP) sebanyak 42 serta ada 1.750 kunjungan orang asing. Sedangkan untuk pengeluaran blanko dokumen keimigrasian jenis paspor biasa 48 halaman sebanyak 118.496 buku, untuk yang 24 halaman sebanyak 1.690 buku. Perbedaan paspor 24 dan 48 halaman terletak pada jumlah halaman dan juga sesuai permintaan pemohon karena selain biayanya berbeda juga kalau paspor 24 halaman untuk keperluan yang tidak membutuhkan waktu lama dan keperluan mendesak misalnya untuk Umroh/Haji, berobat atau ada kerjaan mendesak seperti menghadiri rapat dan lain sebagainya. Kalau yang 48 hal biasanya digunakan oleh para TKI yang akan bekerja keluar negeri berobat atau ada kerjaan mendesak seperti menghadiri rapat dan lain sebagainya. Kalau yang 48 hal biasanya digunakan oleh para TKI yang akan bekerja keluar negeri.

A.7. Rentan Administrasi Kependudukan

A.7.1 Penduduk Rentan

Penduduk Rentan yang dimaksudkan ini adalah rentan Administrasi Kependudukan, yaitu penduduk yang mengalami hambatan dalam memperoleh dokumen kependudukan yang disebabkan oleh bencana alam dan korban bencana sosial, orang terlantar dan komunitas terpencil. Pendataan penduduk korban bencana alam dan penduduk korban bencana sosial dilakukan *sesuai aturan*.

Penanganan penduduk rentan bencana alam dan bencana sosial memerlukan data atau kelengkapan administrasi kependudukan bagi penduduk yang terkena bencana alam dan sosial. Pencatatan Biodata penduduk rentan di Kalimantan Barat pada tahun 2017 dan 2018 belum pernah dilakukan karena penduduk yang mengalami bencana tersebut belum ada.

A.7.2 . Penduduk Terpencil

Komunitas terpencil juga merupakan penduduk rentan, di Kalimantan Barat komunitas terpencil merupakan kelompok masyarakat yang secara geografis bertempat tinggal di daerah terpencil dan terisolir. Komunitas Terpencil adalah kelompok sosial budaya yang bersifat lokal dan terpencar serta kurang atau belum terlibat dalam jaringan dan pelayanan baik sosial,

ekonomi maupun politik. Kondisi tersebut menyebabkan terbatasnya atau tidak adanya akses pelayanan sosial yang diperoleh sehingga hidup dalam kondisi tertinggal. Komunitas terpencil berbentuk komunitas relative kecil yang tertutup dan homogen. Pada umumnya terpencil secara geografis dan relative sulit dijangkau sehingga hidup dengan system ekonomi sub sistem dengan peralatan dan teknologi yang sederhana dan lingkungan hidupnya sangat tergantung pada sumber daya alam setempat. Di Kalimantan Barat komunitas terpencil yang masih memerlukan bantuan pemberdayaan Pemerintah berjumlah 4.827 KK, yang tersebar pada 8 kabupaten sebagaimana tabel berikut ini.

Tabel 3.26
Komunitas Terpencil Di Kalimantan Barat

NO	Kabupaten	Jumlah KK
1	Kabupaten Sambas	1.044
2	Kabupaten Mempawah	252
3	Kabupaten Sanggau	-
4	Kabupaten Ketapang	982
5	Kabupaten Sintang	394
6	Kabupaten Kapuas Hulu	763
7	Kabupaten Bengkayang	660
8	Kabupaten Landak	434
9	Kabupaten Sekadau	-
10	Kabupaten Melawi	298
11	Kabupaten Kayong Utara	-
12	Kabupaten Kubu Raya	-
Jumlah		4.827

Sumber : Dinas Sosial Provinsi Kalbar, Tahun 2018

Dari tabel di atas dapat diketahui bahwa komunitas terpencil terbanyak terdapat di Kabupaten Sambas 1.044 KK dan Kabupaten Ketapang 982 KK. sedangkan untuk Kabupaten Sanggau, Sekadau, Kayong Utara dan Kubu Raya tidak ada data mengenai komunitas adat terpencil.

B. KUALITAS PENDUDUK

B.1. Indikator Pendidikan

Indikator pendidikan diklasifikasikan menurut bentuk pendidikan yaitu pendidikan umum, pendidikan masyarakat dan pendidikan kedinasan, pendidikan umum maknanya kurang lebih sama dengan pendidikan formal

maka indifikasi indikator pendidikan ini merupakan salah satu faktor penting untuk melihat kualitas penduduk yang berlaku untuk semua jenjang pendidikan, meliputi:

- Pendidikan dasar dimulai dari pendidikan Pra sekolah (TK) penduduk usia 4 – 6 tahun dan pendidikan Sekolah Dasar umur 7 – 12 tahun.
- Pendidikan menengah yang meliputi pendidikan menegah pertama usia 13 – 15 tahun baik umum maupun kejuruan dan menengah lanjutan 16 – 18 tahun baik umum maupun kejuruan.
- Pendidikan tinggi yang meliputi Universitas, Institut, Sekolah tinggi maupun Akademi. Data yang digunakan untuk semua kelompok usia sekolah dan kelompok umum untuk mendapatkan keadaan pendidikan baik itu pada usia aktif maupun kelompok umur yang sudah tidak pada usia sekolah, Selain bersumber dari data primer, indikator ini juga membahas indikator pendidikan yang bersumber dari data sekunder dari instansi lain seperti jumlah sekolah dan jumlah guru.

Selain itu untuk mengetahui kondisi sosial suatu daerah, indikator pendidikan juga digunakan untuk mengetahui tingkat kesejahteraan penduduk. Tingkat kualitas pendidikan di Provinsi Kalimantan Barat, yaitu :

B.1.1 Angka Melek Huruf

Angka Melek Huruf (AMH) adalah persentase penduduk yang berumur 10 tahun ke atas yang bisa membaca dan menulis serta mengerti kalimat sederhana dalam hidupnya sehari-hari. AMH berguna untuk mengukur keberhasilan program-program pemberantasan buta huruf dan menunjukkan kemampuan penduduk untuk menyerap informasi dari berbagai media, sehingga AMH ini dapat mencerminkan potensi perkembangan intelektual penduduk sekaligus kontribusi terhadap pembangunan daerah, Berdasarkan data dari Dinas Pendidikan Provinsi Kalimantan Barat jumlah angka melek huruf (AMH) Kalimantan Barat sebesar 98,24 %, tidak ada rincian perkabupaten/ kota.

Adapun jumlah sekolah dan jumlah guru di Provinsi Kalimantan Barat tahun 2018 dapat digambarkan pada table 3.27 di bawah ini.

Tabel 3.27
Jumlah Sekolah dan Jumlah Guru TK, SD, SMP,SLB,SMA,SMK
Provinsi Kalbar

NO	Kabupaten/Kota	SD	Guru SD	SMP	Guru SMP	SLB	Guru SLB	SMA	Guru SMA	SMK	Guru SMK	JML Sekolah	JML Guru
1	Sambas	413	3.797	128	1.550	1	7	37	669	24	448	603	6.471
2	Mempawah	189	1.726	49	608	1	12	12	311	10	199	261	2.856
3	Sanggau	475	3.185	125	1.228	2	10	28	478	18	272	648	5.173
4	Ketapang	535	4.196	140	1.462	1	27	34	597	22	435	732	6.717
5	Sintang	440	3.121	122	1.228	1	6	37	571	18	364	618	5.290
6	Kapuas Hulu	407	2.323	101	995	1	11	31	478	5	94	545	3.901
7	Bengkayang	273	2.275	82	880	1	10	30	477	10	193	396	3.835
8	Landak	456	2.795	106	1.176	1	9	45	667	9	217	617	4.864
9	Sekadau	237	1.437	63	607	1	5	21	301	6	147	328	2.497
10	Melawi	256	1.915	109	819	1	11	21	332	12	179	399	3.256
11	Kayong Utara	103	974	39	418	1	7	13	222	5	84	161	1.705
12	Kubu Raya	375	3.201	147	1.413	1	8	60	867	39	402	622	5.891
13	Kota Pontianak	165	2.906	78	1.479	5	74	50	1.120	31	878	329	6.457
14	Kota Singkawang	95	1.149	34	559	3	33	17	341	12	300	161	2.382
JUMLAH		4.419	35.000	1.323	14.422	21	230	436	7.431	221	4.212	6.420	61.295

Sumber : LPMP Kalbar, Tahun 2018, diolah

Data dari LPMP Kalimantan Barat jumlah sekolah sebanyak 6.420 unit, sekolah paling banyak terdapat di Kabupaten Ketapang 732 unit, Kabupaten Sanggau 648 unit dan Kabupaten Kubu Raya 622 unit. Jumlah sekolah paling sedikit terdapat di Kota Kabupaten Kayong Utara 161 unit, Kota Singkawang 161 unit, dan Kabupaten Mempawah 261 unit. Jumlah guru di Provinsi Kalimantan Barat sebanyak 61.295 orang dan jumlah guru yang paling banyak terdapat di Kabupaten Ketapang 6.717 orang, Kabupaten Sambas 6.471 orang dan Kota Pontianak 6.457.

Sedangkan yang paling sedikit gurunya terdapat di Kabupaten Kayong Utara 1.705 orang, Kota Singkawang 2.382 orang dan Kabupaten Sekadau 2.497 orang. Untuk jumlah TK dan jumlah guru TK datanya tidak ada dari LPMP.

B.1.2 Angka Partisipasi Kasar (APK)

Angka Partisipasi Kasar (APK) adalah rasio jumlah siswa berapapun umurnya, yang sedang sekolah di tingkat pendidikan tertentu terhadap jumlah penduduk kelompok umur sekolah yang berkaitan dengan jenjang pendidikan tertentu.

APK ini menunjukkan tingkat partisipasi penduduk secara umum di suatu tingkat pendidikan. APK merupakan indikator yang paling sederhana untuk mengukur daya serap penduduk umur sekolah di masing-masing jenjang pendidikan, seperti yang terdapat pada tabel berikut ini.

Tabel 3.28
Angka Partisipasi Kasar /Gross Enrollment Ratio Tahun 2018

Jenjang Pendidikan	Jumlah Siswa*	Jumlah Penduduk	APK
Pra Sekolah/School *TK / Pre-primary*	-	197.272	-
Laki-laki/Male	-	101.946	-
Perempuan /Female	-	95.326	-
SD/ *Primary School*	588.452	594.621	98,96
Laki-laki/ *Male*	308.606	306.744	100,61
Perempuan / *Female*	279.846	287.877	97,21
SLTP/Junior SS	233.507	310.184	75,28
Laki-laki/ *Male*	116.688	159.266	73,27
Perempuan /*Female*	116.819	150.918	77,41
SLTA/*Senior SS*	193.592	316.420	61,18
Laki-laki/*Male*	95.510	161.946	58,98
Perempuan /*Female*	98.082	154.474	63,49

Sumber: Data SIAK Hasil Konsolidasi Berkala Kemendagri Semester II Tahun 2018
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Prov. Kalbar
**Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Prov. Kalbar, diolah*

Keterangan:
1.TK/ *Pre-Primary*: Seluruh siswa TK
Pre-Primary School level : penduduk berumur 5-6 tahun
2.Tk.SD(SD+MI) : Seluruh siswa SD
Primary School level (PS+Islamic PS):penduduk berumur 7-12 tahun
3. Tk.SMP (SMP+MTs): Seluruh siswa SMP
Junior SS level (JSS+Islamic JSS) : penduduk berumur 13 - 15 tahun
4. Tk.SM (SM+MA) : Seluruh siswa SMA sederajat
Senior SS level (SSS + Islamic SSS) : penduduk berumur 16 -18 tahun

Angka Partisipasi Kasar jenjang pendidikan SD/sederajat sebesar 98,96 persen. Angka Partisipasi Kasar tingkat SD/sederajat masih tinggi karena masih terdapat anak umur di atas 12 tahun yang masih bersekolah di tingkat SD/sederajat atau sebaliknya ada siswa yang berumur di bawah 7 tahun sudah masuk SD.

Tabel 3.29
APK SD se Kabupaten/Kota Tahun 2018

KABUPATEN/KOTA	Jmlh Murid SD*	Jmlh Pddk 7 - 12 Th	APK SD
SAMBAS	70.642	71.806	98,38
MEMPAWAH	26.627	32.283	82,48
SANGGAU	53.403	51.142	104,42
KETAPANG	61.870	63.534	97,38
SINTANG	55.299	46.611	118,64
KAPUAS HULU	30.982	27.867	111,18

BENGKAYANG	35.854	33.576	106,78
LANDAK	44.562	44.379	100,41
SEKADAU	24.268	23.143	104,86
MELAWI	24.445	24.843	98,40
KAYONG UTARA	13.789	14.651	94,12
KUBU RAYA	55.913	67.647	82,65
KOTA PONTIANAK	65.270	67.098	97,28
KOTA SINGKAWANG	25.528	26.041	98,03
JUMLAH	588.452	594.621	98,96

Sumber : Data SIAK Hasil Konsolidasi Berkala Kemendagri Semester II Tahun 2018
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Prov. Kalbar
**Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Prov. Kalbar, Tahun 2018 diolah*

Untuk APK TK/PAUD tidak dapat dihitung dengan sempurna diakibatkan dengan tidak ada data dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Kalimantan Barat, hanya dapat dirata-ratakan untuk setiap Kabupaten/Kota berkisar di angka 61 % , sedangkan untuk APK SD Kabupaten/Kota se Kalimantan Barat sebesar 98,96 %.

Untuk mengetahui APK SMP dan SMA di masing-masing Kabupaten/Kota di Provinsi Kalimantan Barat sebagaimana disajikan pada tabel 3.30 di bawah ini :

Tabel 3.30
APK SMP – SMA se Kabupaten/Kota Tahun 2018

Kabupaten/Kota	Jmlh Murid SMP*	Jmlh Pddk 13 - 15 Th	APK SMP	Jmlh Murid SMA/SMK*	Jmlh Pddk 16-18 Th	APK SMA
SAMBAS	26.028	35.215	73,91	18.916	36.127	52,36
MEMPAWAH	9.035	17.390	51,96	8.125	18.535	43,84
SANGGAU	20.214	26.995	74,88	14.911	29.204	51,06
KETAPANG	23.252	35.558	65,39	17.565	36.392	48,27
SINTANG	21.433	23.896	89,69	15.762	22.380	70,43
KAPUAS HULU	12.181	14.570	83,60	8.868	13.032	68,05
BENGKAYANG	13.690	17.484	78,30	9.991	18.151	55,04
LANDAK	21.304	23.720	89,81	16.519	24.767	66,70
SEKADAU	10.014	12.080	82,90	8.165	12.434	65,67
MELAWI	10.300	13.913	74,03	7.691	13.933	55,20
KAYONG UTARA	5.771	8.106	71,19	5.107	7.449	68,56
KUBU RAYA	22.090	35.075	62,98	18.309	35.686	51,31
KOTA PONTIANAK	27.914	33.521	83,27	33.246	35.328	94,11
KOTA SINGKAWANG	10.281	12.661	81,20	10.417	13.002	80,12
JUMLAH	233.507	310.184	75,28	193.592	316.420	61,18

Sumber : Data SIAK Hasil Konsolidasi Berkala Kemendagri Semester II Tahun 2018
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Prov. Kalbar
**Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Prov. Kalbar, Tahun 2018 diolah*

Dari tabel tersebut di atas dapat diketahui bahwa Angka Partisipasi Kasar jenjang pendidikan SMP/SLTP/sederajat sebesar 75,28 persen dan Angka Partisipasi Kasar jenjang pendidikan SMA/SLTA/sederajat sebesar 61.18 persen.

B.1.3 Angka Partisipasi Murni (APM)

Angka Partisipasi Murni (APM) adalah persentase siswa pada kelompok umur sekolah yang bersekolah di jenjang pendidikan yang sesuai dengan kelompok umur tersebut. APM ini merupakan indikator yang menunjukkan daya serap penduduk umur sekolah di masing-masing jenjang pendidikan yang lebih baik dari APK, karena APM melihat partisipasi penduduk kelompok umur standar di jenjang pendidikan yang sesuai dengan standar tersebut. Nilai APM lebih rendah dari nilai APK, karena umur yang dihitung pada jenjang pendidikan berdasarkan umur dalam kategori pendidikan tertentu, seperti tabel 3.31 berikut ini.

Tabel 3.31
APM SD se Kabupaten/Kota Tahun 2018

KAB/KOTA	Murid SD Usia 7-12 Th*	Pddk Usia 7-12 Th	APM SD
Kab. Sambas	60.916	71.806	84,83
Kab. Mempawah	23.729	32.283	73,50
Kab. Sanggau	46.263	51.142	90,46
Kab. Ketapang	53.350	63.534	83,97
Kab. Sintang	47.797	46.611	102,54
Kab. Kapuas Hulu	26.538	27.867	95,23
Kab. Bengkayang	30.849	33.576	91,88
Kab. Landak	39.906	44.379	89,92
Kab. Sekadau	21.432	23.143	92,61
Kab. Melawi	21.418	24.843	86,21
Kab. Kayong Utara	11.907	14.651	81,27
Kab. Kubu Raya	49.065	67.647	72,53
Kota Pontianak	60.511	67.098	90,18
Kota Singkawang	22.796	26.041	87,54
JUMLAH	516.477	594.621	86,86

Sumber : Data SIAK Hasil Konsolidasi Berkala Kemendagri Semester II Tahun 2018
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Prov. Kalbar
** Dinas Pendidikan Prov. Kalbar, Tahun 2018 diolah*

Untuk APM TK/PAUD tidak dapat dihitung dikarenakan tidak adanya data dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Kalimantan Barat, sedangkan rata-rata Angka Partisipasi Murni kabupaten/kota tingkat SD sebesar 86,86, APM

tertinggi terdapat di Kabupaten Sintang yaitu 102,54 dan yang terkecil di Kabupaten Kubu Raya yaitu 72,53. Untuk Angka Partisipasi Murni jenjang pendidikan SMP/SLTP dan SMA/SMK sebagaimana disajikan pada tabel 3.32 berikut ini.

Tabel 3.32
APM SMP – SMA/SMK se Kabupaten/Kota Tahun 2018

KABUPATEN/KOTA	Murid Usia 13-15 Th*	Pddk Usia 13-15 Th	APM SMP	Murid Usia 16-18 Th*	Pddk Usia 16-18 Th	APM SMA
Sambas	17.662	35.215	50,15	13.758	36.127	38,08
Mempawah	6.601	17.390	37,96	6.287	18.535	33,92
Sanggau	13.956	26.995	51,70	10.583	29.204	36,24
Ketapang	15.929	35.558	44,80	12.629	36.392	34,70
Sintang	14.742	23.896	61,69	11.324	22.380	50,60
Kapuas Hulu	8.251	14.570	56,63	6.209	13.032	47,64
Bengkayang	8.941	17.484	51,14	6.671	18.151	36,75
Landak	14.658	23.720	61,80	11.202	24.767	45,23
Sekadau	6.938	12.080	57,43	5.811	12.434	46,73
Melawi	7.263	13.913	52,20	5.475	13.933	39,30
Kayong Utara	4.109	8.106	50,69	3.607	7.449	48,42
Kubu Raya	15.448	35.075	44,04	13.174	35.686	36,92
Kota Pontianak	23.697	33.521	70,69	27.988	35.328	79,22
Kota Singkawang	7.822	12.661	61,78	8.035	13.002	61,80
JUMLAH	166.017	310.184	53,52	142.753	316.420	45,12

Sumber : Data SIAK Hasil Konsolidasi Berkala Kemendagri Semester II Tahun 2018
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Prov. Kalbar
** Dinas Pendidikan Prov. Kalbar, Tahun 2018 diolah*

Perhitungan Angka Partisipasi Murni ini menunjukkan tingkat partisipasi penduduk yang murni di suatu tingkat pendidikan, dan Angka Partisipasi Murni merupakan indikator untuk mengukur daya serap penduduk umur sekolah pada masing-masing jenjang pendidikan, seperti yang terdapat pada tabel berikut ini. Kalau dilihat tabel di atas Angka Partisipasi Murni jenjang SMP/SLTP sebesar 67.82, sedangkan Angka Partisipasi Murni jenjang SMA/SLTA sebesar 50.82.

Tabel 3.33
Angka Partisipasi Murni/Net Enrollment Ratio Tahun 2018

Jenjang Pendidikan	Jumlah Siswa *	Jumlah Penduduk	APM
Tk.SD / *Primary School level*	516.477	594.621	86,86
Tk.SLTP / *Junior SS level*	166.017	310.184	53,52
Tk.SLTA/ *Senior SS level*	142.753	316.420	45,12

Sumber : Data SIAK Hasil Konsolidasi Berkala Kemendagri Semester II Tahun 2018
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Prov. Kalbar
** Dinas Pendidikan Prov. Kalbar, Tahun 2018 diolah*

Keterangan:

1.Tk.SD(SD+MI) : Siswa dan Penduduk usia 7-12 tahun
Primary School level (PS+Islamic PS):Pupils and Populations aged 7-12 years

2. Tk.SMP (SMP+MTs): Siswa dan Penduduk usia 13-15 tahun
Junior SS level (JSS+Islamic JSS) : Pupils and Population aged 13 - 15 years

3. Tk.SM (SM+MA) : Siswa dan Penduduk Usia 16 - 18 tahun
Senior SS level (SSS + Islamic SSS) : Pupils and Population aged 16 -18 years

B.1.4 Rata-Rata Angka Harapan Lama Sekolah dan Angka Rata-Rata Lama Sekolah

Harapan lamanya sekolah atau Estimate Years School adalah lamanya sekolah (dalam tahun) yang diharapkan dirasakan oleh anak pada umur tertentu di masa mendatang, dan dihitung untuk penduduk 7 tahun keatas yang dapat digunakan untuk mengetahui kondisi pembangunan system pendidikan di berbagai jenjang yang ditunjukkan dalam bentuk lamanya pendidikan yang diharapkan dapat dicapai oleh setiap anak. Harapan lamanya sekolah penduduk Provinsi Kalimantan Barat secara nasional masih rendah, pada tahun 2018 nasional 12,91 sedangkan Provinsi Kalimantan Barat hanya 12,55.

Lamanya sekolah atau years of schooling adalah sebuah angka yang menunjukkan lamanya bersekolah seseorang dari masuk sekolah dasar sampai dengan tingkat pendidikan terakhir. Lama bersekolah penduduk Provinsi Kalimantan Barat dibanding dengan tingkat nasional rata-rata lama sekolah masih rendah, pada tahun 2018 baru menunjukkan angka 7,12, sedangkan angka rata-rata nasional 8,17 yang berarti rata-rata pendidikan masyarakat di Kalimantan Barat adalah di antara SMP kelas 1(satu) hingga SMP kelas 2 (dua), demikian juga halnya yang terjadi di Kabupaten, menunjukkan angka yang masih relatif rendah terutama di Kabupaten Kayong Utara 5,86 dan Kabupaten Bengkayang 6,27, yang sudah melampaui angka nasional baru Kota Pontianak yaitu 9,90. Untuk mengetahui angka Harapan Lamanya Sekolah dan angka Rata-

rata Lamanya Sekolah di Provinsi Kalimantan Barat dapat dilihat pada table 3.34.

Tabel 3.34
Angka Harapan Lama Sekolah dan Angka Rata-Rata Lama Sekolah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2018

PROVINSI/ KABUPATEN/KOTA	ANGKA HARAPAN LAMA SEKOLAH TAHUN 2016 – 2018			ANGKA RATA LAMA SEKOLAH TAHUN 2016 – 2018		
	2016	2017	2018	2016	2017	2018
INDONESIA	12.72	12.85	12.91	7.95	8.1	8.17
KALIMANTAN BARAT	12.37	12.5	12.55	6.98	7.05	7.12
KAB. SAMBAS	11.92	12.38	12.52	6.42	6.67	6.68
KAB. MEMPAWAH	12.29	12.3	12.31	6.46	6.47	6.63
KAB. SANGGAU	11.05	11.53	11.54	6.92	6.93	6.94
KAB. KETAPANG	11.34	11.76	11.77	6.68	7.03	7.04
KAB. SINTANG	11.27	11.54	11.98	6.71	6.72	6.73
KAB. KAPUAS HULU	11.84	11.85	12.03	7.01	7.02	7.25
KAB. BENGKAYANG	11.6	12	12.01	6.08	6.09	6.27
KAB. LANDAK	12.35	12.36	12.37	7.07	7.08	7.09
KAB. SEKADAU	11.34	11.53	11.56	6.56	6.57	6.58
KAB. MELAWI	11.05	11.12	11.13	6.52	6.53	6.66
KAB. KAYONG UTARA	11.75	11.78	11.79	5.84	5.85	5.86
KAB. KUBU RAYA	12.84	13.21	13.59	6.57	6.58	6.81
KOTA PONTIANAK	14.49	14.72	14.81	9.78	9.79	9.90
KOTA SINGKAWANG	12.85	12.86	12.87	7.29	7.3	7.57

Sumber : BPS Provinsi Kalbar, Tahun 2018, diolah

Dalam upaya meningkatkan rata-rata lama sekolah tersebut, Kabupaten/Kota di Kalimantan Barat sudah mencanangkan wajib belajar 12 tahun. Selain itu berbagai macam upaya juga sudah dilakukan kabupaten/kota untuk mendorong siswanya dalam menuntaskan wajib belajar 9 tahun dan wajib belajar 12 tahun ini, antara lain pemberian baju seragam sekolah bagi siswa SD/sederajat, menggratiskan biaya sekolah bagi siswa miskin, penyediaan sarana transportasi menuju sekolah, dan pemberian bea siswa dan lain-lain.

B.1.5. Angka Putus Sekolah

Angka Putus Sekolah (APS) pada jenjang pendidikan tertentu dapat diketahui melalui jumlah murid yang putus sekolah pada jenjang pendidikan, kemudian jumlah murid menurut jenjang pendidikan berdasarkan jenis kelamin . Adalah sebagai berikut :

Tabel 3.35
Angka Putus Sekolah

No	KAB/KOTA	SD			SLTP			SLTA			SMK		
		LK	PR	JML	LK	PR	JML	LK	PR	JML	LK	PR	JML
1	Kab. Sambas	20	8	28	25	14	39	15	13	28	4	2	6
2	Kab. Mempawah	7	8	15	3	2	5	5	2	7	2	2	4
3	Kab. Sanggau	27	13	40	14	4	18	1	4	5	11	8	19
4	Kab. Ketapang	30	16	46	16	7	23	10	4	14	16	12	28
5	Kab. Sintang	20	16	36	12	12	24	14	13	27	7	12	19
6	Kab. Kapuas Hulu	58	27	85	4	4	8	7	7	14	0	1	1
7	Kab. Bengkayang	7	0	7	2	2	4	2	0	2	0	0	0
8	Kab. Landak	8	3	11	3	0	3	2	7	9	0	0	0
9	Kab. Sekadau	2	2	4	17	1	18	9	5	14	1	1	2
10	Kab. Melawi	14	10	24	5	7	12	1	1	2	0	0	0
11	Kab. Kayong Utara	3	1	4	1	1	2	9	5	14	0	0	0
12	Kab. Kubu Raya	10	5	15	7	5	12	5	6	11	18	13	31
13	Kota Pontianak	16	11	27	21	19	40	21	20	41	1	0	1
14	Kota Singkawang	4	1	5	20	3	23	0	0	0	4	4	8
JUMLAH		226	121	347	150	81	231	101	87	188	64	55	119

Sumber : Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Prov. Kalbar, Tahun 2018 diolah

B.2. Indikator Kesehatan

B.2.1. Kelahiran

Kelahiran atau fertilitas merupakan salah satu indikator kualitas penduduk, karena indikator kelahiran sangat berguna untuk menentukan kebijakan dan perencanaan program pembangunan sosial terutama kesejahteraan ibu dan anak.

a. Angka Kelahiran Menurut Umur (Age Spesifik Fertility Rate/ASFR)

Angka kelahiran menurut umur (Age specific Fertility Rate/ASFR) merupakan angka yang menunjukkan banyaknya kelahiran per 1000 perempuan reproduktif (umur 15-49 tahun).

Angka kelahiran menurut umur merupakan indikator kelahiran yang sudah memperhitungkan perbedaan kelahiran dari perempuan pada setiap kelompok umur. Secara alamiah kemampuan (potensi) perempuan untuk melahirkan berbeda menurut umur. Jika digambarkan dengan grafik, angka kelahiran menurut umur akan berbentuk U terbalik, dengan puncak berada pada kelompok umur reproduksi muda. Angka Kelahiran menurut Kelompok Umur

(ASFR) akan berguna untuk pelaksanaan program KB dan peningkatan pelayanan kesehatan ibu dan anak.

Indikator ASFR ini merupakan data dasar untuk membuat proyeksi penduduk. Hasil proyeksi penduduk merupakadn basis data untuk perencanaan pembangunan penduduk di tahun mendatang. Dinas Kesehatan sebagai sumber data belum memiliki data penduduk mengenai jumlah kelahiran hidup menurut kelompok umur, data yang tersedia yaitu jumlah kelahiran hidup per kabupaten.

Tabel 3.36
Angka Kelahiran Menurut Kelompok Umur (ASFR)

Umur	Jumlah Penduduk Perempuan		Jumlah Kelahiran Hidup		Angka Kelahiran Menurut Umur (ASFR)
	Σ	%	Σ	%	
15-19	255.303	16,79	-		-
20-24	228.462	15,02	-		-
25-29	227.872	14,98	-		-
30-34	232.206	15,27	-		-
35-39	227.578	14,96	-		-
40-44	189.754	12,48	-		-
45-49	159.570	10,49	-		-
Jumlah	1.520.745	100			

Sumber : Data SIAK Hasil Konsolidasi Berkala Kemendagri Semester II Tahun 2018
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Prov. Kalbar

Angka kelahiran menurut kelompok umur (ASFR) belum dapat dihitung, dikarenakan data jumlah kelahiran dari ibu kelompok umur 15-49 tahun tidak tersedia. Namun perhitungan indikator ini sangat penting.

Angka kelahiran menurut umur juga merupakan indikator kelahiran yang memperhitungkan fertilitas dari perempuan usia subur dengan memperhatikan karakteristik kelompok umurnya. Secara alamiah potensi (fekunditas) perempuan untuk melahirkan berbeda menurut umur, dan menjadi steril setelah menopause atau usia 49 tahun. Secara sosial ada kecenderungan, saat ini perempuan ingin membatasi jumlah anak setelah umur 35 tahun. Untuk itu, Angka Kelahiran menurut Kelompok Umur (ASFR) akan berguna dalam pelaksanaan program KB dan peningkatan pelayanan kesehatan ibu dan anak.

Indikator ASFR ini merupakan data dasar untuk mengembangkan proyeksi penduduk dan untuk mengetahui jumlah penduduk menurut umur dan

jenis kelamin di masa yang akan datang. Hasil proyeksi penduduk merupakan basis data untuk perencanaan pembangunan manusia di tahun-tahun mendatang.

b. Angka Kelahiran Total (Total Fertility/TFR)

TFR merupakan gambaran mengenai rata-rata jumlah anak yang dilahirkan seseorang perempuan sampai akhir masa reproduksinya.

Angka kelahiran total biasanya digunakan sebagai indikator untuk melihat keberhasilan pelaksanaan program pengendalian kelahiran (program KB) di suatu daerah. TFR ini juga dapat digunakan untuk membantu para pengambil kebijakan dan perencana dalam mengembangkan program-program pelayanan kesehatan dan penurunan tingkat kelahiran, sekaligus sebagai bahan evaluasi keberhasilan pembangunan sosial ekonomi.

Sama halnya dengan angka ATFR Angka Kelahiran Total Provinsi Kalimantan Barat (TFR) juga belum dapat disajikan, jadi perhitungan TFR Provinsi Kalimantan Barat belum bisa dihitung karena angka kelahiran berdasarkan kelompok umur belum diketahui, sementara ini hanya diketahui jumlah kelahiran hidup per kabupaten, jadi belum bisa menghitung kelahiran hidup berdasarkan kelompok umur penduduk perempuan.

Tabel 3.37
Angka Kelahiran Total (Total Fertility Rate/TFR)

Umur	Perempuan		Kelahiran Hidup	ASFR	TFR
15-19	255.303	16,79			
20-24	228.462	15,02			
25-29	227.872	14,98			
30-34	232.206	15,27			
35-39	227.578	14,96			
40-44	189.754	12,48			
45-49	159.570	10,49			
Jumlah	1.520.745	100			

Sumber : Data SIAK Hasil Konsolidasi Berkala Kemendagri Semester II Tahun 2018
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Prov. Kalbar

B.2.2. Kematian (Mortalitas)

Indikator kematian biasanya digunakan untuk melihat kualitas kesehatan suatu kelompok penduduk di suatu wilayah tertentu. Kematian penduduk dikelompokkan dalam kematian bayi, kematian anak, kematian ibu dan kematian dewasa. Pembagian kematian ini dimaksudkan untuk melihat faktor penyebab kematian yang biasanya spesifik pada setiap kelompok umur. Kematian bayi misalnya digunakan menjadi indikator penting untuk mengukur tingkat kesehatan masyarakat. Angka kematian bayi dianggap paling sensitif terhadap perubahan tingkat kesehatan dan kesejahteraan masyarakat.

a. Bayi Lahir Mati

Keadaan bayi saat dilahirkan menunjukkan gejala lahir hidup atau lahir mati, kondisi lahir mati yaitu kondisi dimana bayi yang baru dilahirkan tapi tidak berapa lama meninggal. Kematian bayi biasanya disebabkan oleh dua hal yaitu:

- Kematian bayi endogen yang umum disebut kematian neonatal adalah kematian bayi yang terjadi pada bulan pertama setelah dilahirkan, yang umumnya disebabkan oleh faktor-faktor yang dibawa sejak lahir, yang diperoleh dari orang tuanya pada saat konsepsi atau didapat selama kehamilan.
- Kematian bayi eksogen atau kematian post neonatal adalah kematian bayi yang terjadi setelah berumur satu bulan sampai menjelang umur satu tahun yang umumnya disebabkan oleh faktor-faktor lingkungan dari luar.

Angka kematian bayi ini berguna untuk pengembangan program kesehatan ibu dan anak. Tabel berikut menyajikan angka kematian bayi untuk Provinsi Kalimantan Barat.

Tabel 3.38
Bayi Lahir Mati Kabupaten/Kota di Provinsi Kalimantan Barat

Kabupaten/Kota	Kelahiran Hidup		Lahir Mati		%
	Σ	%	Σ	%	Lahir Mati
SAMBAS	10.800	11,88	95	15,86	8,80
MEMPAWAH	4.529	4,98	30	5,01	6,62
SANGGAU	9.025	9,93	51	8,51	5,65
KETAPANG	8.631	9,49	54	9,02	6,26
SINTANG	8.258	9,08	49	8,18	5,93
KAPUAS HULU	4.222	4,64	55	9,18	13,03
BENGKAYANG	4.938	5,43	36	6,01	7,29
LANDAK	6.968	7,66	57	9,52	8,18
SEKADAU	3.102	3,41	27	4,51	8,70
MELAWI	3.225	3,55	23	3,84	7,13
KAYONG UTARA	1.962	2,16	24	4,01	12,23
KUBU RAYA	8.856	9,74	39	6,51	4,40
KOTA PONTIANAK	12.082	13,29	38	6,34	3,15
KOTA SINGKAWANG	4.315	4,75	21	3,51	4,87
JUMLAH	90.913	100	599	100	6,59

Sumber : Dinas Kesehatan Prov. Kalbar 2018, diolah

Dari tabel tersebut dapat diketahui bahwa dari 90.913 kelahiran hidup terdapat 599 kematian bayi, dengan persentase lahir mati di Provinsi Kalimantan Barat sebesar 6,59, artinya dari 1.000 kelahiran hidup terjadi kematian bayi sebanyak 6 hingga 7 orang bayi, angka ini mengalami penurunan dari tahun sebelumnya yaitu 7 per 1000 kelahiran hidup. Kematian bayi terbesar terjadi di Kabupaten Kapuas Hulu 13-14 dan Kayong Utara 12-13 kematian bayi per 1.000 kelahiran hidup sedangkan kematian bayi terkecil ada di Kota Pontianak yaitu 3 sampai 4 kematian bayi dari 1.000 kelahiran hidup.

b. Angka Kematian Neonatal

Kematian neonatal adalah kematian yang terjadi pada bayi sebelum bayi genap satu bulan. Informasi Angka Kematian Neonatal ini berguna untuk pengembangan program-program pelayanan kesehatan ibu saat hamil, karena kematian neonatal ini disebabkan faktor endogen yang berhubungan dengan kondisi pada waktu kehamilan. Angka Kematian Neonatal, disajikan pada tabel di bawah ini.

Tabel 3.39
Angka Kematian Neonatal/NNDR Kabupaten/Kota
Di Provinsi Kalimantan Barat

Kabupaten/Kota	Kelahiran Hidup		Kematian Neonatal		AK Neonatal
	∑	%	∑	%	
SAMBAS	10.800	11,88	73	14,23	6,76
MEMPAWAH	4.529	4,98	21	4,09	4,64
SANGGAU	9.025	9,93	48	9,36	5,32
KETAPANG	8.631	9,49	42	8,19	4,87
SINTANG	8.258	9,08	61	11,89	7,39
KAPUAS HULU	4.222	4,64	46	8,97	10,90
BENGKAYANG	4.938	5,43	37	7,21	7,49
LANDAK	6.968	7,66	19	3,70	2,73
SEKADAU	3.102	3,41	19	3,70	6,13
MELAWI	3.225	3,55	23	4,48	7,13
KAYONG UTARA	1.962	2,16	28	5,46	14,27
KUBU RAYA	8.856	9,74	37	7,21	4,18
KOTA PONTIANAK	12.082	13,29	29	5,65	2,40
KOTA SINGKAWANG	4.315	4,75	30	5,85	6,95
JUMLAH	90.913	100	513	100	5,64

Sumber : Dinas Kesehatan Prov. Kalbar tahun 2018, diolah

Dari tabel di atas, terlihat bahwa dari 90,913 kelahiran hidup terjadi kematian bayi di seluruh kabupaten/kota di bawah 1 (satu) bulan atau kematian neonatal sebanyak 513 bayi, ini menunjukkan bahwa Angka Kematian Neonatal di Provinsi Kalimantan Barat sebesar 5,64, yang artinya bahwa dari 1.000 kelahiran hidup terjadi kematian bayi di bawah usia 1 (satu) bulan sebanyak 5 bayi.

Angka Kematian Neonatal terbesar berada di Kabupaten Sambas yaitu 14.23 yang artinya bahwa dari 1.000 kelahiran hidup terjadi kematian bayi di bawah usia 1 (satu) bulan sebanyak 14-15 bayi. Angka kematian yang paling kecil adalah Kabupaten Landak yaitu sebanyak 3,70 yang artinya terjadi kematian 4 (empat) orang bayi dalam 1 (satu) tahunnya untuk 1.000 kelahiran hidup. Adapun sebab-sebab kematian pada kelompok neonatal ini umumnya dikarenakan oleh BBLR (Berat Bayi Lahir Rendah), asfiksia, tetanus neonaturum, sepsis, kelainan kongenital masalah ikterus dan disebabkan oleh hal-hal lainnya, secara jelas

kematian neonatal di masing-masing kabupaten di Kalimantan Barat dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 3.40
Penyebab Kematian Neonatal Kabupaten/Kota
Di Provinsi Kalimantan Barat

Kabupaten/Kota	Sebab Kematian Neonatal					
	BBLR	Asfeksia	Tetanus Neonaturum	Sepsis	Kelainan Kongenital	Lain-lain
Sambas	19	21	0	1	1	31
Mempawah	5	3	0	0	3	10
Sanggau	23	8	0	2	5	10
Ketapang	10	16	0	2	6	8
Sintang	6	20	0	14	4	17
Kapuas Hulu	5	16	0	1	5	19
Bengkayang	9	9	0	2	4	13
Landak	4	6	0	0	7	2
Sekadau	3	5	0	0	2	9
Melawi	1	9	0	1	1	11
Kayong Utara	7	12	1	1	1	6
Kubu Raya	16	10	1	2	0	8
Kota Pontianak	9	9	0	5	3	3
Kota Singkawang	7	9,00	0	3	6	5
JUMLAH	124	153	2	34	48	152

Sumber : Dinas Kesehatan Prov. Kalbar Tahun 2018

Pada tabel di atas jelas terlihat bahwa kematian pada neonatal banyak disebabkan oleh BBLR (Berat Bayi Lahir Rendah) sebanyak 124 kasus, Asfeksia 153 kasus, dan penyebab lainnya yang disebabkan karena tetanus neonaturum, sepsis, kelainan Bawaan, kasus kematian yang terjadi di Kalbar yang disebabkan karena faktor lain-lain terjadi sebanyak 152 kasus. Dari kasus-kasus yang terjadi tersebut di atas dapat diketahui bahwa kondisi di Kalbar masih banyak masyarakat yang kehidupannya di bawah garis kemiskinan, menyebabkan banyak bayi lahir dalam keadaan kekurangan gizi dan gizi buruk, yang mengakibatkan banyaknya kematian yang disebabkan berat bayi tidak memenuhi standar.

c. Angka Kematian Post Neo-Natal

Kematian Post Neonatal (Post Neo-Natal Death Rate) adalah kematian yang terjadi pada bayi berumur 1 bulan sampai dengan kurang dari 1 tahun per

1000 kelahiran hidup selama 1 tahun. Angka Kematian Post Neo-Natal disajikan pada tabel di bawah ini.

Tabel 3.41
Angka Kematian Post Neo-Natal

Kabupaten/Kota	Kelahiran Hidup		Kematian Post Neo-Natal		AK Post Neo-Natal
	Σ	%	Σ	%	
SAMBAS	10.800	11,88	19	15,20	1,76
MEMPAWAH	4.529	4,98	5	4,00	1,10
SANGGAU	9.025	9,93	10	8,00	1,11
KETAPANG	8.631	9,49	18	14,40	2,09
SINTANG	8.258	9,08	13	10,40	1,57
KAPUAS HULU	4.222	4,64	19	15,20	4,50
BENGKAYANG	4.938	5,43	11	8,80	2,23
LANDAK	6.968	7,66	10	8,00	1,44
SEKADAU	3.102	3,41	2	1,60	0,64
MELAWI	3.225	3,55	6	4,80	1,86
KAYONG UTARA	1.962	2,16	8	6,40	4,08
KUBU RAYA	8.856	9,74	1	0,80	0,11
KOTA PONTIANAK	12.082	13,29	1	0,80	0,08
KOTA SINGKAWANG	4.315	4,75	2	1,60	0,46
JUMLAH	90.913	100	125	100	1,37

Sumber : Dinas Kesehatan Prov. Kalbar tahun 2018, diolah

Pada table di atas diketahui bahwa di Provinsi Kalimantan Barat dari 90,913 kelahiran hidup, terdapat 1 yang meninggal pada umur 1 bulan sampai dengan kurang dari 1 tahun per 1000 kelahiran hidup selama 1 tahun. Angka kematian post neo-natal terbesar berada di Kabupaten Kapuas Hulu yaitu 15,20, yang artinya bahwa dari 1000 kelahiran hidup terjadi kematian bayi umur 1 bulan sampai dengan kurang dari 1 tahun sebanyak antara 15 sampai 16 bayi.

Dari data Dinas Kesehatan Provinsi Penyebab kematian Post Neonatal kebanyakan disebabkan oleh antara lain Pneumonia, Diare dan kelainan saluran cerna dan banyak juga oleh sebab lain-lain yang terjadi.

d. Angka Kematian Anak dan Balita

Yang dimaksud dengan anak adalah penduduk yang berumur 1 sampai menjelang 5 tahun atau tepatnya 1 tahun sampai dengan 4 tahun 11 bulan 29 hari. Sedangkan Balita adalah semua anak termasuk bayi yang baru berumur 0 sampai menjelang tepat 5 tahun. Angka Kematian Balita adalah jumlah kematian anak berusia 0-4 tahun selama satu tahun tertentu per 1000 anak umur yang sama pada pertengahan tahun itu. Adapun angka kematian balita

Kabupaten/Kota di Provinsi Kalimantan Barat sebagai mana disajikan pada tabel berikut ini.

Tabel 3.42
Angka Kematian Balita Kabupaten/Kota di Provinsi Kalimantan Barat

Kabupaten/Kota	Penduduk Usia < 5 (0-4 Th)		Kematian Balita < 5 (0-4 Th)		Angka Kematian Balita
	n (jiwa)	%	n (jiwa)*	%	
Kab. Sambas	46.569	12,36	98	14,48	2,10
Kab. Mempawah	21.890	5,81	26	3,84	1,19
Kab. Sanggau	31.609	8,39	58	8,57	1,83
Kab. Ketapang	37.506	9,95	62	9,16	1,65
Kab. Sintang	27.058	7,18	81	11,96	2,99
Kab. Kapuas Hulu	17.632	4,68	70	10,34	3,97
Kab. Bengkayang	20.728	5,50	51	7,53	2,46
Kab. Landak	28.135	7,47	34	5,02	1,21
Kab. Sekadau	14.107	3,74	22	3,25	1,56
Kab. Melawi	14.166	3,76	29	4,28	2,05
Kab. Kayong Utara	8.529	2,26	39	5,76	4,57
Kab. Kubu Raya	42.808	11,36	39	5,76	0,91
Kota Pontianak	47.220	12,53	31	4,58	0,66
Kota Singkawang	18.899	5,01	37	5,47	1,96
Jumlah	376.856	100	677	100	1,80

Sumber : Data SIAK Hasil Konsolidasi Berkala Kemendagri Semester II Tahun 2018
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Prov. Kalbar
** Dinas Kesehatan Prov. Kalbar, Tahun 2018 diolah*

Dari tabel tersebut dapat diketahui Angka Kematian Balita (AKABA) 1,80 %, yang artinya bahwa pada tahun 2018 di Provinsi Kalimantan Barat dari 1.000 balita terjadi hampir 2 kematian balita. Angka Kematian Balita tertingi terjadi di Kabupaten Sambas yaitu 14.48%, yang artinya dari 1.000 balita terjadi 14 kematian balita. Angka Kematian Balita ini diduga akan tinggi bila terjadi keadaan kasus kekurangan gizi atau gizi buruk, tingkat kebersihan lingkungan rendah, tingginya prevalensi penyakit menular pada balita, atau kecelakaan yang terjadi di dalam atau di sekitar rumah.

e. Kematian Ibu

Kematian ibu adalah kematian perempuan yang disebabkan kehamilan, persalinan dan nifas (pasca melahirkan), bukan disebabkan oleh hal-hal lain seperti penyakit maupun kecelakaan.

Untuk menghitung angka kematian ibu secara langsung dibutuhkan data ibu yang meninggal karena sebab-sebab kehamilan, persalinan dan nifas serta jumlah bayi yang dilahirkan dalam kurun waktu tertentu. Jumlah ibu yang meninggal karena sebab-sebab di atas cukup sulit untuk diperoleh mengingat bahwa pelaporan kematian seringkali tidak disertai dengan penyebab kematian. Selain itu masyarakat seringkali tidak memahami penyebab kematian ibu karena kehamilan, persalinan dan nifas. Oleh sebab itu dalam perhitungan kematian ibu biasanya dilakukan dengan perhitungan tidak langsung. Untuk menghitung angka kematian ibu dapat dihitung berdasarkan data yang diperoleh dari Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Barat Kematian ibu di Provinsi Kalimantan Barat disajikan dalam tabel 3.43 berikut ini.

Tabel 3.43
Kematian Ibu/Maternal Mortality Provinsi Kalbar 2018

KABUPATEN/KOTA	Jumlah Lahir Hidup	Kematian Maternal								AKI
		Pendarahan	Hipertensi kehamilan	infeksi	Gangguan Sistem Peredaran Darah Jantung, Strok, dll	Gangguan Metabolik	Partus Lama	Lain-lain	JML	
KAB. SAMBAS	10.800	3	2	0	0	0	0	1	6	55,56
KAB. MEMPAWAH	4.529	1	0	0	0	0	0	1	2	44,16
KAB. SANGGAU	9.025	5	3	0	0	0	0	0	8	88,64
KAB. KETAPANG	8.631	7	2	0	1	0	0	0	10	115,86
KAB. SINTANG	8.258	7	1	0	0	0	0	3	11	133,20
KAB. KAPUAS HULU	4.222	2	0	0	1	0	0	0	3	71,06
KAB. BENGKAYANG	4.938	3	0	0	1	0	0	3	7	141,76
KAB. LANDAK	6.968	1	0	0	0	0	0	5	6	86,11
KAB. SEKADAU	3.102	2	0	0	0	0	0	1	3	96,71
KAB. MELAWI	3.225	3	0	0	1	0	0	0	4	124,03
KAB. KAYONG UTARA	1.962	1	0	0	0	0	0	0	1	50,97
KAB. KUBU RAYA	8.856	4	3	1	0	0	0	6	14	158,08
KOTA PONTIANAK	12.082	0	3	0	2	0	0	1	6	49,66
KOTA SINGKAWANG	4.315	2	2	0	0	0	0	1	5	115,87
JUMLAH	90.913	41	16	1	6	0	0	22	86	94,60

Sumber: Dinas Kesehatan Prov. Kalbar, Tahun 2018, diolah

$$AKI = \frac{\text{Jumlah Kematian Ibu}}{\text{Jumlah Kelahiran Hidup}} xK$$

Dimana:
Jumlah Kematian Ibu yang dimaksud adalah banyaknya kematian ibu yang disebabkan karena kehamilan, persalinan sampai 42 hari setelah melahirkan, pada tahun tertentu, di daerah tertentu.
Jumlah kelahiran Hidup adalah banyaknya bayi yang lahir hidup pada tahun tertentu, di daerah tertentu.
Konstanta =100.000 bayi lahir hidup.
Sumber: Datastatistik-indonesia.com

Dari tabel tersebut di atas menunjukkan bahwa angka kematian ibu di Provinsi Kalimantan Barat yang tercatat selama tahun 2018 sebesar 94,60, yang artinya bahwa dari 100.000 kelahiran hidup terjadi kematian ibu sebanyak 95 kematian ibu pada saat kehamilan, persalinan dan pasca persalinan. Apa bila dilihat menurut kabupaten/kota kematian Ibu tertinggi berada di Kabupaten Kubu Raya yaitu 158,08 yang artinya terdapat 158 orang ibu meninggal dari 100.000 kelahiran hidup.

f. Jumlah Penduduk Menurut Status Gizi

Status gizi bayi dan balita sangat penting untuk melihat tingkat kesehatan dan tumbuh kembang bayi dan balita. Bayi dan balita dengan status gizi kurang atau buruk, dapat berakibat buruk bagi tumbuh kembang bayi dan balita baik dari sisi fisik maupun kecerdasan. Di Provinsi Kalimantan Barat yang tercatat di Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Barat, bahwa kasus gizi buruk pada tahun 2018 terjadi sebanyak kurang lebih 397 kasus. Latar belakang penyebab terjadinya kasus gizi buruk ini adalah faktor ekonomi, lingkungan yang tidak sehat dan kurangnya akses pelayanan, tetapi dengan kondisi seperti ini telah diambil langkah-langkah yaitu dengan dibentuknya pusat perawatan gizi buruk di bawah koordinasi Dinas Kesehatan dan seluruhnya sudah mendapat perawatan. Kasus gizi buruk yang terjadi di Kabupaten/Kota selama tahun 2018, sebagaimana pada tabel 3.45 di bawah ini.

Tabel 3.44
Status Gizi Buruk Di Provinsi Kalimantan Barat

Kabupaten/Kota	Gizi Buruk	Persentase (%)
Kab. Sambas	8	2,02
Kab. Mempawah	12	3,02
Kab. Sanggau	69	17,38
Kab. Ketapang	58	14,61
Kab. Sintang	31	7,81
Kab. Kapuas Hulu	103	25,94
Kab. Bengkayang	48	12,09
Kab. Landak	7	1,76
Kab. Sekadau	2	0,50
Kab. Melawi	1	0,25
Kab. Kayong Utara	1	0,25
Kab. Kubu Raya	12	3,02
Kota Pontianak	29	7,30
Kota Singkawang	16	4,03
Jumlah	397	100

Sumber : Dinas Kesehatan Prov. Kalbar Tahun 2018

Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa kasus gizi buruk terbanyak di Kabupaten Kapuas Hulu 25,94 persen dan diikuti Kabupaten Sanggau 17,38 persen serta Kabupaten Ketapang 14,61 persen. Sedangkan kasus gizi buruk relative kecil terdapat di Kabupaten Melawi dan Kabupaten Kayong Utara sebesar 0,25 persen.

B.3. Indikator Ekonomi

B.3.1. Jumlah Tenaga Kerja dan Angkatan Kerja

a.1. Jumlah dan Proporsi Tenaga Kerja Menurut Kelompok Umur

Tenaga Kerja (Manpower) adalah seluruh penduduk usia kerja (15 – 64 tahun) yang dianggap mempunyai potensi untuk bekerja secara produktif menghasilkan barang dan jasa. Indikator ini berguna sebagai wacana pengambilan kebijakan dalam menyusun rencana ketenagakejaan. Disamping itu juga untuk mengetahui berapa banyak tenaga kerja (penduduk usia kerja) potensial.

Tabel 3.45
Proporsi Tenaga Kerja Berdasarkan Kelompok Umur
Provinsi Kalimantan Barat

Kelompok Umur	Laki-Laki		Perempuan		Jumlah	
	n (jiwa)	%	n (jiwa)	%	n (jiwa)	%
15-19 tahun	268.476	13,77	255.303	13,91	523.779	13,84
20-24 tahun	241.799	12,40	228.462	12,45	470.261	12,42
25-29 tahun	236.909	12,15	227.872	12,41	464.781	12,28
30-34 tahun	244.638	12,55	232.206	12,65	476.844	12,60
35-39 tahun	245.449	12,59	227.578	12,40	473.027	12,50
40-44 tahun	203.678	10,45	189.754	10,34	393.432	10,39
45-49 tahun	175.754	9,02	159.570	8,69	335.324	8,86
50-54 tahun	136.891	7,02	128.807	7,02	265.698	7,02
55-59 tahun	112.089	5,75	107.172	5,84	219.261	5,79
60-64 tahun	83.524	4,29	78.998	4,30	162.522	4,29
Total	1.949.207	100	1.835.722	100	3.784.929	100
Jmlh.Pddk Kalbar (n)	2.791.477		2.631.337		5.422.814	
Persentase (%)	69,83		69,76		69,80	

Sumber : Data SIAK Hasil Konsolidasi Berkala Kemendagri Semester II Tahun 2018
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Prov. Kalbar

Penghitungan persentase tenaga kerja dilaksanakan dengan membandingkan antara jumlah penduduk usia 15 tahun keatas (usia kerja) dengan jumlah penduduk keseluruhan.

$$\text{Proporsi Tenaga Kerja (Manpower)} = \frac{3.784.929}{5.422.814} \times 100 = 69,80$$

Dari tabel dan perhitungan tersebut di atas dapat dijelaskan bahwa jumlah penduduk Provinsi Kalimantan Barat tahun 2018 sebesar 5.422.814 jiwa dan jumlah penduduk usia kerja (15 – 64 tahun) sebesar 3.784.929 jiwa, maka prosentase Tenaga Kerja di Provinsi kalimantan Barat sebesar 69,80 persen. Apabila dilihat per jenis kelamin, dari table 3.46 terlihat pula bahwa jumlah penduduk usia 15-64 tahun (tenaga kerja) laki-laki lebih tinggi (69,83 persen) dibandingkan perempuan (69,76 persen).

a.2. Jumlah dan Proporsi Tenaga Kerja Menurut Kabupaten/Kota

Jumlah dan proporsi penduduk usia kerja menurut Kabupaten/Kota serta jenis kelamin di Provinsi Kalimantan Barat dapat disajikan sebagai berikut.

Tabel 3.46
Proporsi Tenaga Kerja Kabupaten/Kota Di Provinsi Kalimantan Barat

Kabupaten/ Kota	Laki-Laki		Perempuan		Jumlah	
	n (jiwa)	%	n (jiwa)	%	n (jiwa)	%
Kab. Sambas	222.972	11,44	210.124	11,45	433.096	11,44
Kab. Mempawah	108.251	5,55	102.222	5,57	210.473	5,56
Kab. Sanggau	180.647	9,27	166.092	9,05	346.739	9,16
Kab. Ketapang	215.411	11,05	198.749	10,83	414.160	10,94
Kab. Sintang	147.518	7,57	138.248	7,53	285.766	7,55
Kab. Kapuas Hulu	86.529	4,44	82.253	4,48	168.782	4,46
Kab. Bengkayang	102.800	5,27	94.533	5,15	197.333	5,21
Kab. Landak	146.271	7,50	131.921	7,19	278.192	7,35
Kab. Sekadau	77.236	3,96	71.273	3,88	148.509	3,92
Kab. Melawi	85.585	4,39	80.908	4,41	166.493	4,40
Kab. Kayong Utara	44.710	2,29	42.019	2,29	86.729	2,29
Kab. Kubu Raya	215.114	11,04	205.524	11,20	420.638	11,11
Kota Pontianak	233.824	12,00	233.387	12,71	467.211	12,34
Kota Singkawang	82.339	4,22	78.469	4,27	160.808	4,25
Total	1.949.207	100	1.835.722	100	3.784.929	100

Sumber : *Data SIAK Hasil Konsolidasi Berkala Kemendagri Semester II Tahun 2018*
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Prov. Kalbar

Jika diperhatikan menurut Kabupaten/Kota, dari tabel 3.47 terlihat bahwa persentase tenaga kerja (penduduk usia kerja) yang terbesar terdapat di Kota Pontianak 12,34 persen dan diikuti Kabupaten Sambas 11,44 persen, dan Kabupaten Kubu Raya 11,11 Persen. Sedangkan yang terkecil terdapat di Kabupaten Kayong Utara 2,29 dan diikuti Kabupaten Sekadau 3,92, dan Kota Singkawang 4,25 persen.

b. Jumlah dan Proporsi Angkatan Kerja

b.1. Jumlah dan Proporsi Angkatan Kerja Menurut Kelompok Umur

Angkatan Kerja (*labor force*) adalah penduduk usia produktif (15 – 64 tahun) yang bekerja dan sedang mencari pekerjaan atau yang terlibat dan berusaha terlibat dalam kegiatan produktif (Tidak termasuk Ibu Rumah Tangga,

Pelajar, Mahasiswa, Pensiunan, Cacat Mental, dan Cacat Fisik dan Mental). Adapun proporsi Angkatan Kerja di Provinsi Kalimantan Barat dapat di sajikan pada tabel berikut ini.

Tabel 3.47
Proporsi Angkatan Kerja Berdasarkan Kelompok Umur
Di Provinsi Kalimantan Barat

Kelompok Umur	Laki-Laki		Perempuan		Jumlah	
	n (jiwa)	%	n (jiwa)	%	n (jiwa)	%
15-19 tahun	78.910	5,09	63.416	10,74	142.326	6,65
20-24 tahun	124.619	8,03	62.303	10,55	186.922	8,73
25-29 tahun	204.768	13,20	84.159	14,26	288.927	13,49
30-34 tahun	240.141	15,48	86.847	14,71	326.988	15,27
35-39 tahun	239.445	15,44	76.540	12,97	315.985	14,76
40-44 tahun	198.091	12,77	60.369	10,23	258.460	12,07
45-49 tahun	170.673	11,00	51.389	8,71	222.062	10,37
50-54 tahun	127.705	8,23	43.798	7,42	171.503	8,01
55-59 tahun	106.968	6,90	39.066	6,62	146.034	6,82
60-64 tahun	59.733	3,85	22.424	3,80	82.157	3,84
Total	1.551.053	100	590.311	100	2.141.364	100
Jlh.Pddk Kalbar (n)	2.791.477		2.631.337		5.422.814	
Persentase (%)	55,56		22,43		39,49	

Sumber : ***Data SIAK Hasil Konsolidasi Berkala Kemendagri Semester II Tahun 2018***
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Prov. Kalbar

Apabila dilihat dari kelompok umur terlihat bahwa persentase angkatan kerja tertinggi berada pada kelompok umur 30–34 tahun.

b.2. Jumlah dan Proporsi Angkatan Kerja Menurut Kabupaten/Kota

Proporsi Angkatan kerja menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Kalimantan Barat disajikan sebagaiman pada tabel di bawah ini :

Tabel 3.48
Proporsi Angkatan Kerja Menurut Kabupaten/Kota
Di Provinsi Kalimantan Barat

Kabupaten/ Kota	Laki-Laki		Perempuan		Jumlah	
	n (jiwa)	%	n (jiwa)	%	n (jiwa)	%
Kab. Sambas	180.598	11,86	126.621	21,93	307.219	14,63
Kab. Mempawah	82.729	5,43	20.900	3,62	103.629	4,94
Kab. Sanggau	118.468	7,78	42.150	7,30	160.618	7,65
Kab. Ketapang	178.824	11,75	42.325	7,33	221.149	10,53
Kab. Sintang	118.468	7,78	42.150	7,30	160.618	7,65
Kab. Kapuas Hulu	71.192	4,68	30.469	5,28	101.661	4,84
Kab. Bengkayang	79.941	5,25	29.588	5,13	109.529	5,22
Kab. Landak	111.712	7,34	42.079	7,29	153.791	7,32
Kab. Sekadau	63.001	4,14	32.980	5,71	95.981	4,57
Kab. Melawi	70.866	4,65	25.068	4,34	95.934	4,57
Kab. Kayong Utara	36.427	2,39	8.330	1,44	44.757	2,13
Kab. Kubu Raya	171.365	11,26	46.412	8,04	217.777	10,37
Kota Pontianak	177.190	11,64	66.472	11,51	243.662	11,60
Kota Singkawang	61.655	4,05	21.733	3,76	83.388	3,97
Total	1.522.436	100	577.277	100	2.099.713	100
Jlh.Pddk Usia Kerja	1.949.207		1.835.722		3.784.929	
Persentase	78,11		31,45		55,48	

Sumber : *Data SIAK Hasil Konsolidasi Berkala Kemendagri Semester II Tahun 2018*
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Prov. Kalbar

Dari tabel tersebut di atas, terlihat bahwa jumlah angkatan kerja di Provinsi Kalimantan Barat tahun 2018 sebesar 2,099,713 orang (55,48 persen). Jika dilihat menurut jenis kelamin, penduduk usia kerja laki-laki yang memasuki pasar kerja lebih tinggi dibandingkan dengan penduduk usia kerja perempuan yaitu mencapai 78,11 persen. Apabila dilihat menurut kabupaten/kota, persentase angkatan kerja tertinggi berada di Kabupaten Sambas yaitu 14,63 persen, diikuti Kota Pontianak 11,60 persen, Kabupaten Ketapang 10,53 persen dan Kabupaten Kubu Raya 10,37 persen. Sedangkan yang terendah berada di Kabupaten Kayong utara 2,13 persen dan diikuti Kota Singkawang 3.97 persen, Kabupaten Melawi 4.57 persen dan Kabupaten Sekadau 4.57 persen.

B.3.2 Angka Partisipasi Angkatan Kerja (APAK)

Angkatan partisipasi angkatan kerja adalah yang menggambarkan banyaknya angkatan kerja, yaitu penduduk yang sedang bekerja dan yang mencari pekerjaan dari penduduk usia 15-64 tahun terhadap penduduk usia 15-64 tahun. Indikator ini untuk mengetahui bagian dari tenaga kerja yang sesungguhnya terlibat dalam kegiatan produktif yang dapat menghasilkan barang dan jasa dalam jangka waktu tertentu.

Angka Partisipasi Angkatan Kerja (APAK) Provinsi Kalimantan Barat dapat disajikan sebagai berikut.

Tabel 3.49
Angka Partisipasi Angkatan Kerja (APAK)

Kelompok Umur	Angkatan Kerja			Penduduk 15-64 Tahun (Tenaga Kerja)			Angka Partisipasi Angkatan Kerja (APAK)		
	Lk	Pr	Total	Lk	Pr	Total	Lk (%)	Pr (%)	Total (%)
15-19 tahun	78.910	63.416	142.326	268.476	255.303	523.779	29,39	24,84	27,17
20-24 tahun	124.619	62.303	186.922	241.799	228.462	470.261	51,54	27,27	39,75
25-29 tahun	204.768	84.159	288.927	236.909	227.872	464.781	86,43	36,93	62,16
30-34 tahun	240.141	86.847	326.988	244.638	232.206	476.844	98,16	37,40	68,57
35-40 tahun	239.445	76.540	315.985	245.449	227.578	473.027	97,55	33,63	66,80
40-44 tahun	198.091	60.369	258.460	203.678	189.754	393.432	97,26	31,81	65,69
45-49 tahun	170.673	51.389	222.062	175.754	159.570	335.324	97,11	32,20	66,22
50-54 tahun	127.705	43.798	171.503	136.891	128.807	265.698	93,29	34,00	64,55
55-59 tahun	106.968	39.066	146.034	112.089	107.172	219.261	95,43	36,45	66,60
60-64 tahun	59.733	22.424	82.157	83.524	78.998	162.522	71,52	28,39	50,55
Jumlah	1.551.053	590.311	2.141.364	1.949.207	1.835.722	3.784.929	79,57	32,16	56,58

Sumber : Data SIAK Hasil Konsolidasi Berkala Kemendagri Semester II Tahun 2018
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Prov. Kalbar

Dari tabel di atas menunjukkan bahwa 56,58 persen dari angkatan kerja di Provinsi Kalimantan Barat telah berpartisipasi dalam pasar kerja. Partisipasi angkatan kerja penduduk perempuan lebih rendah (32,16%) apabila dibandingkan partisipasi angkatan kerja penduduk laki-laki sebesar (79,57%).

Selanjutnya untuk melihat kualitas sumberdaya manusia khususnya angkatan kerja, salah satunya dapat ditinjau dari tingkat pendidikan formal tertinggi yang ditamatkan. Karena hal ini dapat menggambarkan kualitas

angkatan kerja dengan melihat mayoritas pendidikan angkatan kerja tersebut. Jika angkatan kerja memiliki pendidikan yang cukup tinggi, maka akan memudahkan angkatan kerja tersebut untuk masuk ke pasar kerja.

Pada tabel dibawah ini disajikan proporsi angkatan kerja menurut pendidikan yang ditamatkan di Provinsi Kalimantan Barat tahun 2018, sebagai berikut :

Tabel 3.50
Jumlah dan Proporsi Penduduk Angkatan Kerja Menurut Pendidikan Yang Ditamatkan dan Jenis Kelamin

Jenjang Pendidikan	Laki-Laki		Perempuan		Jumlah	
	n (jiwa)	%	n (jiwa)	%	n (jiwa)	%
Tidak/Belum Sekolah	714.311	25,59	714.051	27,14	1.428.362	26,34
Belum Tamat SD/Sederajat	415.690	14,89	397.465	15,11	813.155	15,00
Tamat SD/Sederajat	753.128	26,98	737.443	28,03	1.490.571	27,49
SLTP/Sederajat	368.957	13,22	334.565	12,71	703.522	12,97
SLTA/Sederajat	429.173	15,37	339.012	12,88	768.185	14,17
Diploma I/II	12.549	0,45	13.648	0,52	26.197	0,48
Akademi/Diploma III/S.Muda	23.380	0,84	30.321	1,15	53.701	0,99
Diploma IV/Strata I	68.684	2,46	62.120	2,36	130.804	2,41
Strata II	5.310	0,19	2.570	0,10	7.880	0,15
Strata III	295	0,01	142	0,01	437	0,01
Jumlah	2.791.477	100	2.631.337	100	5.422.814	100

Sumber : Data SIAK Hasil Konsolidasi Berkala Kemendagri Semester II Tahun 2018
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Prov. Kalbar

Dari tabel tersebut terlihat bahwa proporsi penduduk usia kerja di Propinsi Kalimantan Barat yang paling banyak adalah tamatan SD/sejerajat yaitu sebesar 1.490.571 orang (27,49 persen), sedangkan yang paling sedikit adalah tamatan Strata III sebanyak 437 orang (0,01 persen). Hal ini mencerminkan kualitas angkatan kerja di Provinsi Kalimantan Barat masih sangat rendah.

B.3.3. Jumlah dan Proporsi Penduduk Menurut Jenis Pekerjaan

Berdasarkan database SIAK dan sesuai dengan formulir F1.01 (pendaftaran penduduk) jenis pekerjaan sebagaimana table di berikut ini.

Tabel 3.51
Jumlah Penduduk Menurut Jenis Pekerjaan
di Provinsi Kalimantan Barat (Sesuai Formulir F.1.01)

NO	JENIS PEKERJAAN	JENIS KELAMIN		JUMLAH
		Laki-Laki	Perempuan	
1	BELUM/TIDAK BEKERJA	793.696	715.279	1.508.975
2	MENGURUS RUMAH TANGGA	706	983.459	984.165
3	PELAJAR/MAHASISWA	479.469	419.605	899.074
4	PENSIUNAN	16.506	5.043	21.549
5	PEGAWAI NEGERI SIPIL	50.179	37.895	88.074
6	TENTARA NASIONAL INDONESIA	10.121	204	10.325
7	KEPOLISIAN RI	10.098	557	10.655
8	PERDAGANGAN	8.416	2.147	10.563
9	PETANI/PEKEBUN	612.928	281.401	894.329
10	PETERNAK	599	142	741
11	NELAYAN/PERIKANAN	23.646	699	24.345
12	INDUSTRI	757	259	1.016
13	KONSTRUKSI	956	68	1.024
14	TRANSPORTASI	1.072	24	1.096
15	KARYAWAN SWASTA	248.014	55.956	303.970
16	KARYAWAN BUMN	8.318	2.780	11.098
17	KARYAWAN BUMD	1.293	353	1.646
18	KARYAWAN HONORER	9.341	10.373	19.714
19	BURUH HARIAN LEPAS	62.863	2.873	65.736
20	BURUH TANI/PERKEBUNAN	26.567	7.147	33.714
21	BURUH NELAYAN/PERIKANAN	1.834	46	1.880
22	BURUH PETERNAKAN	247	96	343
23	PEMBANTU RUMAH TANGGA	102	2.816	2.918
24	TUKANG CUKUR	134	10	144
25	TUKANG LISTRIK	271	2	273
26	TUKANG BATU	420	9	429
27	TUKANG KAYU	5.477	10	5.487
28	TUKANG SOL SEPATU	78	7	85
29	TUKANG LAS/PANDAI BESI	710	10	720
30	TUKANG JAHIT	490	459	949

31	TUKANG GIGI	47	6	53
32	PENATA RIAS	37	118	155
33	PENATA BUSANA	15	17	32
34	PENATA RAMBUT	113	173	286
35	MEKANIK	2.360	6	2.366
36	SENIMAN	141	16	157
37	TABIB	89	11	100
38	PARAJI	423	132	555
39	PERANCANG BUSANA	3	18	21
40	PENTERJEMAH	9	4	13
41	IMAM MESJID	158	0	158
42	PENDETA	1.850	258	2.108
43	PASTOR	306	0	306
44	WARTAWAN	228	17	245
45	USTADZ/MUBALIGH	368	21	389
46	JURU MASAK	55	93	148
47	PROMOTOR ACARA	5	2	7
48	ANGGOTA DPR-RI	1	2	3
49	ANGGOTA DPD	2	1	3
50	ANGGOTA BPK	2	0	2
51	PRESIDEN	0	0	0
52	WAKIL PRESIDEN	0	0	0
53	ANGGOTA MAHKAMAH KONSTITUSI	0	0	0
54	ANGGOTA KABINET/KEMENTERIAN	1	0	1
55	DUTA BESAR	0	0	0
56	GUBERNUR	1	0	1
57	WAKIL GUBERNUR	1	0	1
58	BUPATI	10	1	11
59	WAKIL BUPATI	10	1	11
60	WALIKOTA	2	1	3
61	WAKIL WALIKOTA	2	0	2
62	ANGGOTA DPRD PROVINSI	29	7	36
63	ANGGOTA DPRD KABUPATEN/KOTA	324	38	362
64	DOSEN	1.043	789	1.832

65	GURU	7.623	11.012	18.635
66	PILOT	7	0	7
67	PENGACARA	146	24	170
68	NOTARIS	73	45	118
69	ARSITEK	74	10	84
70	AKUNTAN	14	11	25
71	KONSULTAN	311	47	358
72	DOKTER	484	517	1.001
73	BIDAN	0	2.221	2.221
74	PERAWAT	1.109	2.259	3.368
75	APOTEKER	44	133	177
76	PSIKIATER/PSIKOLOG	3	10	13
77	PENYIAR TELEVISI	4	3	7
78	PENYIAR RADIO	20	16	36
79	PELAUT	482	4	486
80	PENELITI	89	18	107
81	SOPIR	6.064	7	6.071
82	PIALANG	33	8	41
83	PARANORMAL	36	6	42
84	PEDAGANG	10.156	2.274	12.430
85	PERANGKAT DESA	2.757	438	3.195
86	KEPALA DESA	833	17	850
87	BIARAWATI	25	606	631
88	WIRASWASTA	371.100	78.619	449.719
89	LAINNYA	7.047	1.571	8.618
JUMLAH		2.791.477	2.631.337	5.422.814

Sumber : Data SIAK Hasil Konsolidasi Berkala Kemendagri Semester II Tahun 2018
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Prov. Kalbar

Untuk lebih memudahkan pemangku kepentingan dalam pengambilan kebijakan, maka jumlah dan proporsi penduduk menurut jenis pekerjaan dapat di sederhanakan sebagai berikut.

Tabel 3.52
Jumlah dan Proporsi Penduduk
Menurut Jenis Pekerjaan

No.	Jenis Pekerjaan	Jenis Kelamin				Jumlah	
		Laki-Laki		Perempuan			
		n (jiwa)	%	n (jiwa)	%	n (jiwa)	%
1	Belum / Tidak Bekerja	793.696	28,43	715.279	27,18	1.508.975	27,83
2	Mengurus Rumah Tangga	706	0,03	983.459	37,37	984.165	18,15
3	Pelajar / Mahasiswa	479.469	17,18	419.605	15,95	899.074	16,58
4	PNS	50.179	1,80	37.895	1,44	88.074	1,62
5	TNI	10.121	0,36	204	0,01	10.325	0,19
6	POLRI	10.098	0,36	557	0,02	10.655	0,20
7	Pensiunan	16.506	0,59	5.043	0,19	21.549	0,40
8	Bekerja / Lainnya	1.430.702	51,25	469.295	17,83	1.899.997	35,04
Jumlah		2.791.477	100	2.631.337	100	5.422.814	100

Sumber : Data SIAK Hasil Konsolidasi Berkala Kemendagri Semester II Tahun 2018
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Prov. Kalbar

B.3.4. Pengangguran Terbuka

Pengangguran merupakan bagian dari angkatan kerja yang tidak bekerja atau sedang mencari pekerjaan (baik yang belum pernah bekerja maupun yang sudah pernah bekerja), atau sedang mempersiapkan suatu usaha, mereka yang tidak mencari pekerjaan karena merasa tidak mungkin untuk mendapatkan pekerjaan atau mereka yang sudah memiliki pekerjaan tetapi belum mulai bekerja.

Adapun tingkat penganguran menurut struktur umur di Provinsi Kalimantan Barat sebagaimana disajikan pada tabel berikut ini :

Tabel 3.53
Tingkat Pengangguran Terbuka Menurut Kelompok Umur
Di Provinsi Kalimantan Barat

Kelompok Umur	Angkatan Kerja			Jumlah
	Bekerja	Pencari Kerja	Jumlah Angkatan Kerja	%
15-19 tahun	10.835	146.461	157.296	93,11
20-24 tahun	86.414	81.778	168.192	48,62
25-29 tahun	221.552	48.421	269.973	17,94
30-34 tahun	297.897	25.319	323.216	7,83
35-34 tahun	308.908	13.394	322.302	4,16
40-44 tahun	259.289	6.195	265.484	2,33
45-49 tahun	223.096	4.005	227.101	1,76
50-54 tahun	179.575	2.586	182.161	1,42
55-59 tahun	147.971	2.477	150.448	1,65
60-64 tahun	106.676	2.865	109.541	2,62
KALBAR	1.842.213	333.501	2.175.714	15,33

Sumber : *Data SIAK Hasil Konsolidasi Berkala Kemendagri Semester II Tahun 2018*
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Prov. Kalbar

Dari tabel tersebut di atas terlihat bahwa angka pengangguran terbuka di Provinsi Kalimantan Barat sebesar 15,33 persen. Besarnya angka pengangguran terbuka mempunyai implikasi sosial yang luas karena mereka yang tidak bekerja tidak mempunyai pendapatan. Semakin tinggi angka pengangguran terbuka, maka akan semakin besar potensi kerawanan sosial dalam masyarakat.

Apabila dilihat dari struktur umur, angka pengangguran terbuka di Provinsi Kalimantan Barat terbanyak pada kelompok umur 15-19 tahun sebanyak 157.296 (93,11 persen). Penduduk kelompok umur 15-19 tahun ini seharusnya masih duduk di bangku pendidikan, belum masuk ke pasar kerja. Hal ini perlu menjadi perhatian khusus dari pemerintah Provinsi Kalimantan Barat untuk menyediakan sarana dan prasarana pendidikan serta meningkatkan akses masyarakat untuk memperoleh pendidikan. Hal lain yang perlu diperhatikan adalah bahwa pengangguran pada kelompok umur muda ini harus

ditangani dengan baik dengan memberikan bekal keterampilan khusus melalui Balai Latihan Kerja (BLK) maupun training-training sesuai permintaan pasar, sehingga mereka dapat terserap di pasar kerja.

Selanjutnya, untuk mengetahui angka pengganguran terbuka pada Kabupaten/Kota di Provinsi Kalimantan Barat, dapat dilihat pada tabel 3.55.

Tabel 3.54
Tingkat Pengangguran Terbuka Menurut Kabupaten/Kota
Di Provinsi Kalimantan Barat

Kabupaten/Kota	Angkatan Kerja			Jumlah
	Bekerja	Pencari Kerja	Jumlah Angkatan Kerja	%
Kab. Sambas	283.346	27.857	311.203	8,95
Kab. Mempawah	83.388	22.502	105.890	21,25
Kab. Sanggau	177.718	26.198	203.916	12,85
Kab. Ketapang	183.924	41.474	225.398	18,40
Kab. Sintang	140.427	23.402	163.829	14,28
Kab. Kapuas Hulu	98.098	4.239	102.337	4,14
Kab. Bengkayang	97.108	13.777	110.885	12,42
Kab. Landak	127.598	30.016	157.614	19,04
Kab. Sekadau	83.759	14.037	97.796	14,35
Kab. Melawi	78.816	19.520	98.336	19,85
Kab. Kayong Utara	37.140	8.393	45.533	18,43
Kab. Kubu Raya	172.819	47.848	220.667	21,68
Kota Pontianak	201.525	47.374	248.899	19,03
Kota Singkawang	76.547	6.864	83.411	8,23
KALBAR	1.842.213	333.501	2.175.714	15,33

Sumber : Data SIAK Hasil Konsolidasi Berkala Kemendagri Semester II Tahun 2018
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Prov. Kalbar

Dari tabel di atas terlihat bahwa angka pengangguran tertinggi terdapat di Kabupaten Kubu Raya yaitu sebanyak 47.848 orang (21,68 persen), sedangkan yang angka pengangguran terkecil terdapat di Kabupaten Kapuas Hulu 4.239 orang (4,14 persen).

B.4. Indikator Sosial

B.4.1 Jumlah Penduduk Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial

Masalah sosial akan timbul seiring dengan adanya ketidak sesuaian antara yang diinginkan dengan kenyataan, peristiwa tersebut terkait erat dengan ketidakmampuan manusia untuk memenuhi kebutuhan dasar hidupnya dan atau kebutuhan lain yang menjadi tujuan hidupnya. Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) adalah seseorang, keluarga atau kelompok masyarakat, yang karena suatu hambatan, kesulitan atau gangguan, tidak dapat melaksanakan fungsi sosialnya, dan karenanya tidak dapat menjalin hubungan yang serasi dan kreatif dengan lingkungannya sehingga tidak dapat terpenuhi kebutuhan hidupnya (jasmani, rohani, dan sosial) secara memadai dan wajar. Hambatan, kesulitan dan gangguan tersebut dapat berupa kemiskinan, ketelantaran, kecacatan, ketunasusilaan, keterbelakangan atau keterasingan dan kondisi atau perubahan lingkungan (secara mendadak) yang kurang mendukung atau menguntungkan seperti terjadinya bencana.

Kondisi yang juga dapat mendorong terjadinya PMKS adalah terjadinya mobilitas penduduk terutama yang datang dari pulau Jawa untuk mengadu nasib tanpa bekal pengetahuan dan keterampilan, hal ini biasanya membawa dampak social yang akhirnya banyak yang dikembalikan ke daerah asalnya.Penyandang masalah kesejahteraan sosial tersebut yang sering ditimbulkan antara lain anak terlantar, anak nakal, anak jalanan, pengemis, gelandangan dan lain sebagainya. Data Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 3.55
Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS)
Provinsi Kalbar Tahun 2018

No.	Jenis Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial	Jumlah	%
1	Anak Telantar (dalam panti)	4.249	0,60
2	Anak Telantar (luar panti)	2.568	0,36
3	Anak Yang Berhadapan dengan Hukum	245	0,03
4	Anak Yang Memerlukan Perlindungan Khusus	53	0,01
5	Anak Jalanan	348	0,05
6	Gelandangan/Pengemis	125	0,02
7	Lanjut Usia Telantar (dalam panti)	27.478	3,90

8	Lanjut Usia Telantar (luar panti)	-	-
9	Penyandang Disabilitas	2.267	0,32
10	Bekas Warga Binaan Lembaga Pemasyarakatan (BWBLP)	-	-
11	Korban Penyalahgunaan NAPZA	745	0,11
12	Korban Trafficking	14	0,002
13	Pekerja Migran Bermasalah Sosial	261	0,04
14	Korban Bencana Alam	42.627	6,06
15	Korban Bencana Sosial	37	0,01
16	Fakir Miskin	588.757	83,67
17	Komunitas Adat Terpencil	2.861	0,41
18	Anak Balita Terlantar	9	0,001
19	Anak dengan Kedisabilitasan	582	0,08
20	Anak Korban Tindak Kekerasan	20	0,003
21	Tuna Susila/ WTS	79	0,01
22	Pemulung	5	0,001
23	Kelompok Minoritas (Waria, dsb)	46	0,01
24	Orang dengan HIV/AIDS	1.838	0,26
25	Korban Tindak Kekerasan	141	0,02
26	Perempuan Rawan Ekonomi Sosial	20.303	2,89
27	Keluarga Bermasalah Sosial Psikologis	276	0,04
28	Wanita Korban Tindak Kekerasan	43	0,01
29	Anak Nakal	70	0,01
30	Korban Bencana Kebakaran	7	0,001
31	Keluarga Rentan	486	0,07
32	Rumah Tidak Layak Huni	1.732	0,25
33	Kurang Mampu	5.395	0,77
34	Daerah Rawan Bencana	9	0,001
JUMLAH		703.676	100

Sumber : Dinas Sosial Prov. Kalbar, Tahun 2018

Dari data di atas dapat disampaikan bahwa penyandang masalah kesejahteraan sosial terbanyak adalah Fakir Miskin 588.757 orang (83,67 persen) dan Korban Bencana Alam sebanyak 42.627 orang (6,06 persen). Sedangkan penyandang masalah kesejahteraan sosial terkecil adalah Pemulung 5 orang (0,001 persen) dan Korban Bencana Kebakaran sebanyak 7 orang (0,001 persen), kecilnya angka tersebut dikarenakan masih belum lengkapnya data dari kabupaten/kota hingga akhir tahun 2018.

Banyaknya jumlah penduduk yang menyandang masalah sosial di Provinsi Kalimantan Barat, membuat masyarakat yang mempunyai kemampuan dan rasa kepedulian terhadap sesama tergerak serta terketuk hatinya untuk meringankan beban saudaranya, adapun usaha atau kegiatan yang dilakukan masyarakat atau lembaga sosial per kabupaten/kota dapat dilihat seperti daftar tabel di bawah ini.

Tabel 3.56
Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS)
Provinsi Kalbar Tahun 2018

NO	KABUPATEN/ KOTA	PSKS PERORANGAN		PSKS KELUARGA		PSKS KELEMBAGAAN				JUMLAH
		PSM	TKSK	LK3	FCU	LKS	KARANG TARUNA	FORUM CSR KESOS	WKSBM	
1	Pontianak	179	6	1	-	49	29	1	-	265
2	Singkawang	151	5	1	1	12	26	-	5	201
3	Kubu Raya	72	9	1	-	34	103	-	-	219
4	Mempawah	307	9	1	-	31	20	-	5	373
5	Sambas	132	19	1	-	7	37	-	-	196
6	Bengkayang	137	17	1	-	6	-	-	-	161
7	Landak	2	13	1	-	5	14	-	-	35
8	Sanggau	394	15	1	-	9	162	-	5	586
9	Sekadau	52	7	1	-	2	5	-	5	72
10	Melawi	9	11	1	-	3	25	-	-	49
11	Sintang	132	14	1	-	13	250	-	-	410
12	Kapuas Hulu	89	23	1	-	3	40	-	-	156
13	Ketapang	62	20	1	-	27	30	-	-	140
14	Kayong Utara	-	6	1	-	1	13	-	-	21
JUMLAH		1.718	174	14	1	202	754	1	20	2.884

Sumber : Dinas Sosial Prov. Kalbar Tahun 2018

B.4.2. Proporsi Penduduk Penyandang Cacat Berdasarkan Kabupaten/Kota

Untuk mengetahui berapa besar angka kecacatan pada suatu daerah, dapat diketahui dengan menghitung jumlah penduduk yang cacat dibanding dengan jumlah penduduk. Jenis kecacatan pada dasarnya tidak hanya merupakan kecacatan fisik tetapi juga cacat mental, dari yang paling ringan sampai dengan yang paling berat. Pada umumnya penduduk penyandang cacat

ini tidak seluruhnya terdata, karena kecacatan dianggap memalukan keluarga, Berikut ini adalah angka kecacatan di masing-masing Kabupaten/Kota.

Tabel 3.57
Angka Kecacatan Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2018

Kab/Kota	Penduduk Cacat		∑ Penduduk	Angka Kecacatan
	∑	%		
KAB. SAMBAS	285	3,79	635.379	0,04
KAB. MEMPAWAH	654	8,70	304.795	0,21
KAB. SANGGAU	464	6,17	486.129	0,10
KAB. KETAPANG	865	11,50	581.594	0,15
KAB. SINTANG	716	9,52	408.841	0,18
KAB. KAPUAS HULU	424	5,64	242.170	0,18
KAB. BENGKAYANG	102	1,36	287.121	0,04
KAB. LANDAK	225	2,99	399.421	0,06
KAB. SEKADAU	163	2,17	212.202	0,08
KAB. MELAWI	112	1,49	232.536	0,05
KAB. KAYONG UTARA	133	1,77	125.974	0,11
KAB. KUBU RAYA	1.853	24,64	604.563	0,31
KOTA PONTIANAK	1.385	18,42	665.694	0,21
KOTA SINGKAWANG	139	1,85	236.395	0,06
JUMLAH	7.520	100	5.422.814	0,14

Sumber : *Data SIAK Hasil Konsolidasi Berkala Kemendagri Semester II Tahun 2018*
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Prov. Kalbar

Dari tabel di atas, dapat diinformasikan bahwa jumlah penyandang cacat di Kalbar berjumlah 7.520 jiwa dengan proporsi terbesar berada di Kabupaten Kubu Raya yaitu 24,64 persen, Kota Pontianak dan Kabupaten Ketapang masing-masing sebesar 18,42 persen dan 11,50 persen. Jika dilihat dari besarnya angka kecacatan dibandingkan dengan jumlah penduduk, maka angka kecacatan Provinsi Kalimantan Barat adalah 0,14 persen. Meskipun angka kecacatan kecil namun perlu mendapat perhatian pemerintah Provinsi Kalimantan Barat untuk menangani para penderita cacat, termasuk memberikan peluang pendidikan, pekerjaan dan memperoleh kehidupan yang layak bagi penderita kecacatan.

Bila dilihat dari proporsi penduduk penyandang cacat per Kabupaten, Kabupaten Kubu Raya merupakan kabupaten yang mempunyai angka kecacatan

tertinggi yaitu 0,31 kemudian Kabupaten Mempawah sebesar 0,21 persen dan Kota Pontianak yaitu 0,21 persen. Sedangkan angka kecacatan terkecil terdapat di Kabupaten Sambas dan Kabupaten Bengkayang yaitu masing-masing 0,04 persen dari total penduduknya.

B.4.3. Program Pengentasan Kemiskinan

Kondisi kemiskinan di Provinsi Kalimantan Barat cukup memprihatinkan, karena angka kemiskinan cukup tinggi jika dibandingkan dengan keempat Provinsi lainnya se Kalimantan, walaupun angka kemiskinan Kalimantan Barat masih di bawah angka kemiskinan nasional. Menurut data dari Dinas Sosial Provinsi yang kami terima jumlah Angka kemiskinan yang ada di Kalimantan Barat berjumlah 588.757 jiwa dan yang terbanyak terdapat di Kabupaten Sambas. Ini juga akan mempengaruhi kondisi secara keseluruhan yaitu angka Indeks Pembangunan Manusia (IPM) di Kalimantan Barat, yang mana pada tahun 2017 pada posisi ke 30 (66,26) dari 34 Provinsi se Indonesia dan pada tahun 2018 tetap menempati ranking ke 30 dengan angka IPM Kalimantan Barat meningkat menjadi 66.98 dan masih dibawah rata-rata IPM Nasional yaitu sebesar 71,39. *(Sumber Badan Pusat Statistik (BPS) Nasional & Provinsi Kalbar Tahun 2018).*

Tabel 3.58
Data Fakir Miskin
Kalimantan Barat
Tahun 2018

NO	KABUPATEN/KOTA	JUMLAH
1	SAMBAS	181.153
2	MEMPAWAH	114.871
3	SANGGAU	21.592
4	KETAPANG	54.862
5	SINTANG	42.646
6	KAPUAS HULU	3
7	BENGKAYANG	4.346
8	LANDAK	43.732
9	SEKADAU	12.293
10	MELAWI	26.244
11	KAYONG UTARA	11.130
12	KUBU RAYA	28.860
13	PONTIANAK	31.761
14	SINGKAWANG	15.264
JUMLAH		588.757

Sumber : Dinas Sosial Prov. Kalbar Tahun 2018

C. Mobilitas Penduduk

Mobilitas penduduk meliputi semua gerakan (*movement*) penduduk yang melintasi batas wilayah tertentu dalam periode waktu tertentu pula. Batas wilayah umumnya dipergunakan batas administrasi misalnya : provinsi, kabupaten, kecamatan, atau kelurahan. manusia melakukan mobilitas dengan suatu tujuan yaitu untuk meningkatkan kualitas hidupnya mulai dengan pemenuhan kebutuhan pangan. Dengan kata lain dapat dinyatakan bahwa seseorang akan melakukan mobilitas dengan tujuan untuk memperoleh pekerjaan atau pendapatan, dengan demikian daerah tujuan mobilitas penduduk merupakan daerah dimana terdapat peluang yang lebih besar untuk memperoleh pekerjaan yang lebih baik atau peningkatan pendapatan. Sehingga kesempatan kerja yang tersedia di suatu daerah merupakan salah satu faktor pendorong adanya mobilitas penduduk. Selanjutnya, jika kebutuhan dasarnya telah dapat terpenuhi maka mobilitas dilakukan dengan tujuan memenuhi kebutuhan sekunder, termasuk wisata.

Pengertian mobilitas penduduk adalah pergerakan penduduk dari suatu daerah ke daerah lain. Baik untuk sementara maupun untuk jangka waktu yang lama atau menetap. Apabila perpindahan bertujuan untuk menetap di daerah tujuan maka disebut migrasi, jadi migrasi dapat diartikan perpindahan penduduk dari satu daerah ke daerah lain yang bertujuan untuk menetap.

Mobilitas penduduk ada dua tipe yaitu mobilitas permanen atau yang disebut dengan migrasi dan mobilitas non permanen (sirkuler). Saat ini sedang dipersiapkan Rancangan Peraturan Pemerintah (RPP) tentang mobilitas penduduk baik permanen dan non permanen, akan disepakati pengertian tentang mobilitas penduduk non permanen karena penduduk sering melakukan mobilitas non permanen terutama terjadi di kota besar dan juga terhadap mahasiswa yang sedang melaksanakan studinya.

Kedua tipe ini berpengaruh positif maupun negatif di daerah asal maupun di daerah tujuan. Oleh sebab itu pengerahan mobilitas perlu dilakukan agar persebaran penduduk sesuai dengan daya dukung maupun daya tampung lingkungan (daduling) baik fisik maupun sosial.

C.1 Mobilitas Penduduk Permanen (Migrasi)

Migrasi adalah perpindahan penduduk dengan tujuan untuk menetap dari suatu tempat ke tempat lain melewati batas administratif (migrasi internal) atau batas politik/negara (migrasi internasional). Atau dengan kata lain, migrasi diartikan perpindahan permanen dari suatu daerah (negara) ke daerah (negara) lain. Migrasi dapat merefleksikan perbedaan pertumbuhan ekonomi dan ketidakmerataan fasilitas pembangunan antara satu daerah dengan daerah lainnya.

Migrasi dipengaruhi oleh daya dorong *(push factor)* suatu wilayah dan daya tarik *(pull factor)* wilayah lainnya. Daya dorong menyebabkan orang pergi ke tempat lain, misalnya karena di daerah itu tidak tersedia sumber daya yang memadai untuk memberikan jaminan kehidupan, yang biasanya tidak terlepas dari kemiskinan dan pengangguran. Sedangkan daya tarik wilayah adalah jika suatu wilayah mampu atau dianggap mampu menyediakan fasilitas dan sumber penghidupan penduduk, baik bagi penduduk wilayah itu sendiri maupun penduduk di sekitarnya dan daerah-daerah lain, sehingga daya tarik ini menyebabkan penduduk bermigrasi untuk meningkatkan taraf hidup. Kondisi pindah datang penduduk di Provinsi Kalimantan Barat dapat diketahui pada tabel berikut ini.

Tabel 3.59
Mobilitas Penduduk Permanen (Migrasi)

Kab/Kota	PINDAH			DATANG		
	L	P	L+P	L	P	L+P
Kab. Sambas	2.229	2.357	4.586			3.380
Kab. Mempawah	990	1.036	2.026	1.915	1.908	3.823
Kab. Sanggau	4.780	5.320	10.100	4.840	5.075	9.915
Kab. Ketapang	178	141	319	242	195	437
Kab. Sintang	1.195	1.094	2.289	1.221	1.135	2.356
Kab. Kapuas Hulu	1.055	973	2.028	1.100	882	1.982
Kab. Bengkayang	1.666	1.812	3.478	1.516	1.625	3.141
Kab. Landak	1.438	1.797	3.235	194	234	428
Kab. Sekadau	868	1.027	1.895	742	655	1.397
Kab. Melawi	788	884	1.672	799	675	1.474
Kab. Kayong Utara	1.665	1.700	3.365			3.582
Kab. Kubu Raya	4.422	4.229	8.651	4.972	4.792	9.764

Kota Pontianak	5.867	5.764	11.631	8.159	8.596	16.755
Kota Singkawang	2.320	1.297	3.617	1.902	1.941	3.843
Jumlah	29.461	29.431	58.892	27.602	27.713	62.277

Sumber: Dinas Dukcapil Kab/Kota, tahun 2018

Migrasi penduduk di Kalimantan Barat sesuai hasil dari data penduduk tentang pindah datang antar provinsi dan atau antar kabupaten pada 2018 tercatat sebanyak 58.892 orang yang pindah dan 62.277 orang datang dari daerah lain. Dari data tersebut dapat diketahui bahwa migrasi penduduk untuk yang pindah banyak terjadi di Kota Pontianak yaitu 11.631 dan 16.755 orang datang, peristiwa pindah di Kota Pontianak tinggi dibanding Kabupaten/Kota lainnya, dikarenakan adanya penduduk atau pelajar yang melanjutkan studinya atau kuliah di luar Provinsi atau luar negeri.

C.2 Mobilitas Penduduk Non Permanen

Mobilitas non permanen atau mobilitas sirkuler adalah gerak penduduk dari suatu wilayah menuju ke wilayah lain dengan tidak ada niatan untuk menetap, biasanya dianggap sebagai penduduk musiman atau penduduk pendatang atau penduduk sementara di Kabupaten/Kota. Mobilitas penduduk non permanen dapat didefinisikan sebagai gerak penduduk yang melintas batas provinsi atau kabupaten menuju provinsi atau kabupaten lain dalam jangka waktu kurang dari enam bulan. Hal ini sesuai dengan paradigma geografis yang didasarkan atas konsep ruang (space) dan waktu (time). Data mobilitas penduduk sirkuler ini sulit didapat, karena para pelaku mobilitas sirkuler tidak memberitahu kepergian mereka kepada kantor desa di daerah asal, begitu juga dengan kedatangan mereka di daerah tujuan.

BAB IV
KEPEMILIKAN DOKUMEN KEPENDUDUKAN

Menurut Pasal 59 ayat (1) Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan menyatakan bahwa dokumen kependudukan meliputi biodata kependudukan, Kartu Keluarga, Kartu Tanda Penduduk (KTP-EL), Surat Keterangan Kependudukan, dan Setiap penduduk Indonesia wajib memiliki dokumen kependudukan sebagaimana tersebut dalam Pasal 59 ayat (1) di atas. Tertib administrasi kependudukan lahir dari kelengkapan dokumen kependudukan yang dimiliki oleh penduduk.

Dokumen kependudukan mempunyai kekuatan hukum mengikat secara perdata bagi pemiliknya. Kepemilikan dokumen kependudukan bermanfaat untuk mendapatkan pelayanan yang lebih baik dari instansi pemerintah dan non pemerintah. Bagi pemerintah, di samping untuk mempermudah memberikan pelayanan juga dalam rangka untuk melibatkan penduduk sebagai subyek dan obyek pembangunan, data penduduk diperlukan untuk mempermudah penyusunan perencanaan pembangunan, melibatkan penduduk dalam pembangunan demokrasi, untuk mempermudah alokasi anggaran pemerintah, serta untuk mempermudah penemuan identitas penduduk yang mengalami musibah dan mempermudah mengetahui alamat pelaku kriminalitas.

A. Kepemilikan Kartu Keluarga

Kartu Keluarga merupakan salah satu dari beberapa dokumen kependudukan yang wajib dimiliki oleh setiap keluarga. KartuKeluargamemuat keterangan mengenai kolom nomor KK, nama lengkap kepala keluarga dan anggota keluarga, NIK, jenis kelamin, alamat, tempat lahir, tanggal lahir, agama, pendidikan, pekerjaan, status perkawinan, status hubungan dalam keluarga, kewarganegaraan, dokumen imigrasi, nama orang tua.

Informasi dalam KK dapat dimanfaatkan untuk berbagai keperluan, karena itu informasi dalam KK harus diperbaiki sesuai perubahan yang dialami oleh pemilik KK tersebut.

Jumlah penduduk Kalimantan Barat yang telah memiliki KK sampai dengan akhir tahun 2018 tersaji dalam tabel sebagai berikut :

Tabel 4.1
Kepemilikan Kartu Keluarga Penduduk Kabupaten/Kota
Di Provinsi Kalimantan Barat

NO	KABUPATEN / KOTA	JUMLAH KELUARGA YANG MEMILIKI KK	% KEPEMILIKAN KK
1	Kab. Sambas	176.939	11,72
2	Kab. Mempawah	81.003	5,37
3	Kab. Sanggau	134.408	8,90
4	Kab. Ketapang	176.844	11,72
5	Kab. Sintang	114.851	7,61
6	Kab. Kapuas Hulu	76.367	5,06
7	Kab. Bengkayang	74.481	4,93
8	Kab. Landak	101.280	6,71
9	Kab. Sekadau	58.980	3,91
10	Kab. Melawi	67.431	4,47
11	Kab. Kayong Utara	35.811	2,37
12	Kab. Kubu Raya	162.109	10,74
13	Kota Pontianak	185.653	12,30
14	Kota Singkawang	63.275	4,19
Jumlah		1.509.432	100

Sumber :SIAK Dinas Dukcapil Prov. Kalbar Semester II Tahun 2018

B. Kepemilikan Kartu Tanda Penduduk Elektronik (KTP-EL)

Setelah diberlakukannya Peraturan Presiden No.112 Tahun 2013 tentang Perubahan Masa Berlaku Kartu Tanda Penduduk (KTP), maka terhitung sejak 1 Januari 2015 KTP yang berlaku adalah KTP elektronik (KTP-el) yang berarti KTP konvensional sudah tidak berlaku lagi. KTP-el sangat erat kaitannya dengan Nomor Induk Kependudukan (NIK) atau Nomor KTP akan mengantarkan penduduk untuk memiliki identitas tunggal, sebagaimana jargon yang diusung sejak awal program KTP-el adalah 1 (satu) KTP 1 (satu) Identitas atau pada dunia internasional dikenal dengan istilah *Single Identity Number(SIN).* Program KTP-el ini dimulai tahun 2011 melalui perekaman data diri kependudukan beserta biometriknya meliputi sidik jari dan iris mata, sehingga dapat dipastikan ketunggalannya.

Kepemilikan KTP-el dan persentase penduduk wajib KTP-el Kabupaten/ Kota di Provinsi Kalimantan Barat sampai dengan akhir tahun 2018 sebagaimana disajikan dalam tabel 4.2 sebagai berikut :

Tabel 4.2
Persentase Penduduk Wajib KTP-el Dan Data Perekaman KTP-el Kabupaten/Kota Di Kalimantan Barat

KABUPATEN/ KOTA	PENDUDUK WAJIB KTP-el				DATA PEREKAMAN KTP-el			
	LK	PR	JML	%	LK	PR	JML	%
Kab. Sambas	227.487	217.117	444.604	11,59	201.029	193.179	394.208	88,66
Kab. Mempawah	110.628	105.459	216.087	5,63	87.086	83.396	170.482	78,90
Kab. Sanggau	182.112	167.718	349.830	9,12	143.185	129.153	272.338	77,85
Kab. Ketapang	215.014	198.017	413.031	10,76	155.682	143.561	299.243	72,45
Kab. Sintang	149.477	138.831	288.308	7,51	131.765	122.359	254.124	88,14
Kab. Kapuas Hulu	86.387	82.315	168.702	4,40	84.406	80.554	164.960	97,78
Kab. Bengkayang	103.425	94.939	198.364	5,17	79.526	73.017	152.543	76,90
Kab. Landak	146.991	132.495	279.486	7,28	125.722	110.597	236.319	84,55
Kab. Sekadau	78.281	72.387	150.668	3,93	70.314	63.757	134.071	88,98
Kab. Melawi	86.673	81.129	167.802	4,37	63.578	59.180	122.758	73,16
Kab. Kayong Utara	45.352	42.442	87.794	2,29	35.182	32.527	67.709	77,12
Kab. Kubu Raya	217.405	207.368	424.773	11,07	185.532	175.573	361.105	85,01
Kota Pontianak	239.882	242.886	482.768	12,58	214.423	219.285	433.708	89,84
Kota Singkawang	83.859	81.326	165.185	4,30	73.817	71.111	144.928	87,74
JUMLAH	1.972.973	1.864.429	3.837.402	100	1.651.247	1.557.249	3.208.496	83,61

Sumber : *Data SIAK Hasil Konsolidasi Berkala Kemendagri Semester II Tahun 2018*
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Prov. Kalbar

Dari tabel di atas, diketahui bahwa dari jumlah penduduk wajib KTP-el sebanyak 3,837,402 jiwa, yang telah melakukan perekaman KTP-el sebanyak 3,208,496 jiwa (83.61 %) yang belum memiliki KTP-el sebanyak 628.906 jiwa (16.39 %).

C. Dokumen Akta Pencatatan Sipil

Akta Pencatatan Sipil adalah dokumen kependudukan yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil. Akta pencatatan sipil mempunyai kekuatan hukum perdata mengikat dan melindungi pemiliknya.

Akta Pencatatan Sipil terdiri dari antara lain Kutipan Akta Kelahiran, Kematian, Perkawinan, Perceraian, Pengakuan Anak, dan Pengesahan Anak.

1. Pencatatan Kelahiran

Pencatatan Kelahiran merupakan dokumen kependudukan yang pertama kali dimiliki oleh seseorang sejak dia dilahirkan. Akta Kelahiran merupakan bukti autentik mengenai asal usul seorang anak. Oleh Karena itu, Akta Kelahiran menjadi rujukan utama terhadap identitas seseorang.

Di dalam Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan diatur bahwa setiap kelahiran dalam waktu paling lambat 60 hari sejak kelahiran wajib segera dilaporkan ke Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil untuk dicatatkan dalam Register Akta Kelahiran dan diterbitkan Kutipan Akta Kelahiran. Pencatatan kelahiran dilakukan melalui tiga jenis pencatatan, yaitu (1) anak pasangan suami isteri; (2), anak seorang ibu dan (3) anak yang tidak diketahui asal usulnya.

Data di bawah ini menunjukkan jumlah kelahiran yang dilaporkan ke Instansi Pelaksana dan dicatat dalam Register Akta Kelahiran serta diterbitkan Kutipan Akta Kelahirannya.

Tabel 4.3
Jumlah Penerbitan Akta Kelahiran Kabupaten/Kota
Di Provinsi Kalimantan Barat

Kabupaten/Kota	Jumlah Penerbitan Akta Kelahiran		
	Tahun 2016	Tahun 2017	Tahun 2018
Kab. Sambas	191.253	224.326	246,000
Kab. Mempawah	55.776	97.725	111,671
Kab. Sanggau	63.926	91.422	129,167
Kab. Ketapang	107.717	195.104	227,077
Kab. Sintang	119.781	173.473	128,724
Kab. Kapuas Hulu	43.207	65.742	92,529
Kab. Bengkayang	25.612	31.023	44,790
Kab. Landak	113.593	115.770	130,761
Kab. Sekadau	69.518	75.087	79,757
Kab. Melawi	48.126	52.909	61,319
Kab. Kayong Utara	33.495	36.166	50,691

Kab. Kubu Raya	143.177	229.249	261,538
Kota Pontianak	297.670	445.249	362,877
Kota Singkawang	90.167	101.485	115,895
Jumlah	1.403.018	1.934.730	2.042.796

Sumber : Data Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab/Kota Tahun 2016-2018, Diolah SIAK Dinas Dukcapil Tahun 2018

2. Pencatatan Kematian

Pencatatan kematian merupakan dokumen kependudukan yang terakhir kali diterbitkan ketika seseorang meninggal dunia. Berkaitan dengan data kependudukan Akta Kematian menjadi penting, Karena menjadi factor pengurang jumlah penduduk. Selain itu Akta Kematian juga menjadi bukti autentik kematian seseorang.

Data di bawah ini menunjukkan jumlah kematian yang dilaporkan ke Instansi Pelaksana dan dicatat dalam Register Akta Kematian serta diterbitkan Kutipan Akta Kematiannya.

Tabel 4.4
Penerbitan Akta Kematian Kabupaten/Kota
Di Provinsi Kalimantan Barat

Kabupaten/Kota	Jumlah Penerbitan Akta Kematian		
	Tahun 2016	Tahun 2017	Tahun 2018
Kabupaten Sambas	90	373	562
Kabupaten Mempawah	96	1.308	1.182
Kabupaten Sanggau	69	113	529
Kabupaten Ketapang	48	1.494	3.034
Kabupaten Sintang	1.316	2.995	4.069
Kabupaten Kapuas Hulu	54	268	134
Kabupaten Bengkayang	39	1	184
Kabupaten Landak	2.415	65	474
Kabupaten Sekadau	17	212	212
Kabupaten Melawi	17	378	93
Kabupaten Kayong Utara	127	69	1.448
Kabupaten Kubu Raya	354	1.138	414
Kota Pontianak	2.803	20.523	3.208
Kota Singkawang	239	200	397
Jumlah	7.684	29.137	15.940

Sumber : Data Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab/Kota Tahun 2016-2018

3. Pencatatan Perkawinan

Perkawinan yang sah berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan wajib dilaporkan oleh penduduk kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil ditempat terjadinya perkawinan paling lambat 60 hari sejak tanggal perkawinan.

Tabel 4.5 data yang menunjukkan jumlah perkawinan yang dilaporkan ke Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten/Kota dalam Register Akta Perkawinan serta diterbitkan Kutipan Akta Perkawinannya.

Tabel 4.5
Jumlah Penerbitan Akta Perkawinan Kabupaten/Kota
Di Provinsi Kalimantan Barat

Kabupaten/Kota	Jumlah Penerbitan Akta Perkawinan		
	Tahun 2016	Tahun 2017	Tahun 2018
Kabupaten Sambas	3.683	1.944	26.830
Kabupaten Mempawah	365	1.018	30.617
Kabupaten Sanggau	880	124	55.169
Kabupaten Ketapang	364	520	34.695
Kabupaten Sintang	1.152	519	37.829
Kabupaten Kapuas Hulu	1.001	3.153	37.313
Kabupaten Bengkayang	339	3.093	4.767
Kabupaten Landak	580	50	10.793
Kabupaten Sekadau	491	531	26.708
Kabupaten Melawi	472	690	18.912
Kabupaten Kayong Utara	23	36	12.624
Kabupaten Kubu Raya	7.500	3.901	53.867
Kota Pontianak	1.000	2.737	149.070
Kota Singkawang	554	3.446	29.722
Jumlah	18.404	21.762	528.916

Sumber : SIAK Dinas Dukcapil Prov.Kalbar Semester II Tahun 2016-2018, Diolah Dinas Dukcapil Kab/Kota Tahun 2018

4. Pencatatan Perceraian

Perceraian wajib dilaporkan oleh yang bersangkutan kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil paling lambat 60 hari sejak putusan pengadilan tentang perceraian yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap. Berdasarkan laporan tersebut, Pejabat Pencatatan Sipil wajib mencatatnya dalam Register Akta Perceraian dan menerbitkan Kutipan Akta Perceraiannya

yang masing-masing diberikan kepada suami dan istri yang bercerai. Dengan diterbitkannya Akta Perceraian, maka Kutipan Akta Perkawinan yang bersangkutan dicabut.

Tabel 4.6
Jumlah Penerbitan Akta Perceraian Kabupaten/Kota
Di Provinsi Kalimantan Barat

Kabupaten/Kota	Jumlah Penerbitan Akta Perceraian		
	Tahun 2016	Tahun 2017	Tahun 2018
Kabupaten Sambas	1.015	352	2.335
Kabupaten Mempawah	0	825	1.254
Kabupaten Sanggau	2	666	900
Kabupaten Ketapang	8	57	392
Kabupaten Sintang	29	33	844
Kabupaten Kapuas Hulu	0	150	213
Kabupaten Bengkayang	49	17	149
Kabupaten Landak	2.404	46	98
Kabupaten Sekadau	0	3	58
Kabupaten Melawi	0	69	92
Kabupaten Kayong Utara	0	41	107
Kabupaten Kubu Raya	10	48	1.440
Kota Pontianak	44	52	7.055
Kota Singkawang	23	13	1.344
Jumlah	5.988	2.372	16.281

Sumber : Data Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab/Kota Tahun 2016-2018, Diolah Dinas Dukcapil Tahun 2018

5. Pencatatan Pengakuan Anak dan Pengesahan Anak

Pengakuan Anak adalah pengakuan secara hukum dari seorang ayah biologis terhadap anaknya yang lahir di luar ikatan perkawinan yang sah atas persetujuan ibu kandung anak tersebut. Sehingga pengakuan anak dibatasi hanya untuk anak yang dilahirkan dari perkawinan yang telah sah menurut hukum agama tetapi belum sah menurut hukum negara, hal ini dimaksudkan utnuk melindungi hak anak, sehingga dengan pengakuan anak dimaksud maka anak yang bersangkutan mempunyai hubungan perdata dengan ayahnya.

Akta Pengakuan Anak ini penting, Karena sebagaimana diketahui bahwa anak yang lahir di luar ikatan perkawinan yang sah, maka dalam Akta Kelahiran hanya dicatat sebagai anak dari seorang ibu. Dengan adanya pengakuan anak ini, maka secara hukum anak tersebut memiliki hubungan keperdataan dengan

ayah biologisnya, artinya anak tersebut memiliki hak dan kewajiban terhadap ayah biologisnya, dan demikian pula sebaliknya.

Pengesahan anak yaitu pengesahan status seorang anak yang lahir dari perkawinan yang telah sah menurut hukum agama, pada saat pencatatan perkawinan dari kedua orang tua anak tersebut telah sah menurut hukum negara, dengan penjelasan pengesahan anak yang selama ini hanya dengan catatan pinggir diubah dengan pemberian akta pengesahan anak sebagaimana diatur dalam Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan.

Untuk data pengakuan anak dan pengesahahan anak pada saat ini belum bisa di tampilkan karena pencatatan dan peloporannya di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Kabupaten / Kota masih dilaksanakan secara manual, belum menggunakan SIAK.

Ini membuat keterlambatan Kabupaten / Kota dalam menyampaikan laporan, selain itu juga kelemahan lainya adalah laporan yang di terima tidak berlanjut.

BAB V
PENUTUP

Penyusunan Buku Profil Perkembangan Kependudukan Provinsi Kalimantan Barat adalah dalam rangka melaksanakan amanat Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 65 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Profil Perkembangan Kependudukan, mengamanatkan bahwa profil perkembangan kependudukan dilakukan setiap tahun anggaran.

Profil perkembangan kependudukan menggambarkan kondisi, perkembangan dan prospek kependudukan Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2018. Sumber data yang digunakan dalam penyusunan profil perkembangan kependudukan Kalimantan Barat 2018 berdasarkan data yang diperoleh dari Data SIAK Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Kalimantan Barat , Profil Perkembangan Kependudukan Kabupaten/Kota se Kalimantan Barat dan data dari unit kerja terkait di tingkat Provinsi Kalimantan Barat.

Data yang tertuang dalam Buku Profil Perkembangan Kependudukan dapat dimanfaatkan untuk berbagai keperluan, diantaranya untuk menyusun perencanaan di bidang kesehatan, pendidikan, ketenagakerjaan, serta untuk keperluan lainnya yang diinginkan unit kerja.

Buku Profil Perkembangan Kependudukan 2018 tidak luput dari kelemahan, baik karena kemampuan tim penyusun maupun kelemahan data yang diperoleh dan ditampilkan. Untuk kesempurnaan Buku Profil Perkembangan Kependudukan 2018, tim penyusun tetap terbuka untuk menerima kritik dan saran demi kebaikan dalam penyusunan Buku Profil Perkembangan Kependudukan 2018. Semoga Tuhan Yang Maha Esa dapat membalas budi baik pemberi kritik dan saran perbaikan.

Akhirnya, kepada semua pihak diucapkan terima kasih, semoga Allah SWT selalu melindungi kita semua Amin.